



PERLINDUNGAN HUKUM DESAIN INDUSTRI BATIK BANYUMASAN

TESIS

**Disusun dalam rangka memenuhi persyaratan
Program Magister Ilmu Hukum**

Disusun Oleh :

Raditya Permana, SH.

Pembimbing :

Prof. Dr. Sri Redjeki Hartono, SH.

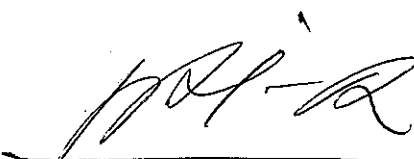
**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2002**

PERLINDUNGAN HUKUM DESAIN INDUSTRI BATIK BANYUMASAN

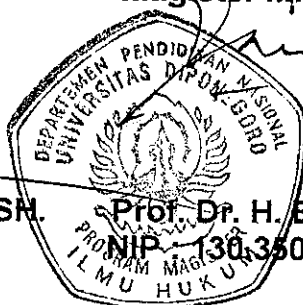
**Dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada tanggal : 17 Juni 2002**

**Tesis ini telah diterima sebagai persyaratan memperoleh gelar
Magister Ilmu Hukum**

Pembimbing


**Prof. Dr. Sri Redjeki Hartono, SH.
NIP : 130. 368. 053.**

**Mengetahui
Ketua Program
Magister Ilmu Hukum**



**Prof. Dr. H. Barda Nawawi Arief, SH.
NIP : 130.350.519.**

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami panjatkan kepada **Allah SWT** yang telah melimpahkan segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga kami diberikan jalan yang terang dan kesehatan, sehingga dapat menyelesaikan Tesis untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum dengan baik.

Kami mengucapkan terima kasih yang tulus, kepada **Prof. Dr. Sri Redjeki Hartono, SH.**, yang telah berkenan memberikan bimbingan kepada kami, sehingga kami dapat menyelesaikan Tesis berjudul **Perlindungan Hukum Desain Industri Batik Banyumasan** dengan baik. Semoga **Allah SWT** selalu melimpahkan rahmat-Nya.

Kami juga mengucapkan terima kasih kepada ;

1. **Prof. Dr. H. Barda Nawawi Arief, SH.**, selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, yang telah memberikan dukungan dan masukan demi sempurnanya Tesis ini..
2. **Prof. Ronny Hanitijo Soemitro. SH.**, yang telah memberikan banyak masukan demi sempurnanya Tesis ini.
3. **Budiharto, SH.,MS.**, yang telah banyak membantu selama kegiatan perkuliahan.
4. **Etty Susilowati, SH.,MS.**, yang telah banyak membantu dalam proses pembuatan Tesis ini.
5. **Prof. Teguh Djiwanto, SE.,MM.**, yang telah memberikan banyak pinjaman bahan kajian pustaka.
6. **Ali Murtadlo, SE.**, atas waktunya pada saat pencarian data lapangan.
7. **Disperindagkop Kabupaten Banyumas**, atas data yang telah diberikan.
8. Ayahanda **Prof. H. Showam Majhuri, SE.,MS.**, Ibunda **Tri Listyaning**, Adik **Anggoro Sigit**, atas segala asuhan, bimbingan dan doanya, semoga **Allah SWT** selalu melimpahkan rahmat-Nya.
9. Keluarga besar **Drs. Kaboel Soemardjo**, keluarga besar **Prof. Drs. Roediro**, keluarga besar **H. Moh Bakri**, keluarga **Ir. Julian Qemal**

Pasha, Opa Soetojo, Oma Soekasih Soeherman, Keluarga Besar Heri Soemarlani, atas segala dukungan dan perhatiannya, semoga **Allah SWT** membalas semua kebaikan.

10. **Anita Setiarini, SE.**, atas segala doa, atensi, motivasi dan pengertiannya.
11. Teman-teman **angkatan 2000** HET Magister Ilmu Hukum Undip, atas segala kerjasama dan persaudaraannya,
12. Teman-teman **angkatan '95** FH Undip, atas persahabatan dan pertemanan kita.
13. Teman-Teman **teater Themis**, atas segala bantuan dan perhatiannya.
14. **Semua pihak** yang telah membantu dalam semua kegiatan kuliah di kampus.

Kami juga mohon maaf yang sebesar-besarnya pada semua pihak bila dalam proses pengerjaan Tesis, banyak kesalahan dan kealpaan yang tidak kami sengaja. Kami juga menyadari bahwa semua yang tertuang dalam Tesis ini, masih jauh dari sempurna, sehingga masih perlu banyak masukan dari berbagai pihak untuk memperbaikinya. Semoga apa yang sudah kami lakukan selama kuliah sampai dengan saat ini, dapat menjadi bekal dan pelajaran berharga bagi kami.

Semarang, 10 Juni 2002

Raditya Permana, SH.

ABSTRAKSI

Pengalihan pengaturan desain industri dari Undang-Undang Hak Cipta ke Undang-Undang Desain Industri membawa dampak pada perlindungan hukumnya. Hak cipta tidak harus didaftarkan sedangkan hak desain industri baru muncul bila didaftarkan. Hal ini tentunya akan membawa akibat banyaknya desain industri tidak mendapat perlindungan hukum dari peniruan pihak lain. Realitas yang ada bahwa sebagian besar desain industri yang telah dipasarkan selama ini tidak dimintakan pendaftarannya.

Sosialisasi desain industri nampaknya harus segera dilaksanakan secara sungguh-sungguh oleh instansi yang terkait di Kabupaten Banyumas pada industri Batik Banyumasan. Karena selain menjadi produk unggulan daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah Banyumas (PAD), juga merupakan alternatif untuk mengurangi pengangguran dan menciptakan lapangan kerja. Industri Batik Banyumasan yang juga menjadi bagian promosi dari kegiatan pariwisata di Kabupaten Banyumas, sebagai cinderamata wisatawan yang berkunjung di Kabupaten Banyumas, sudah saatnya mendapatkan perhatian lebih dari instansi yang terkait di Kabupaten Banyumas, untuk lebih memaksimalkan potensi yang dimiliki dan memberikan perlindungan terhadap hasil karyanya.

ABSTRACT

The change of Industrial Design's regulation from copyrights law to Industrial Design laws has the impact to it's legal consequences. Copy right doesn't have to be registered but the right of Industrial Design will emerge when it is registered. These condition, of course, will effect to many Industrial Designs that not legally protected from conterfeit. The fact that most Industrial Designs which is in market place not registered.

The sosialization of Industrial Design seem has to be done intensely by the institution of Kabupaten Banyumas which is related to Batik Banyumasan industries. Because of became the specialized product to increase the domestic income for Banyumas District, and it is the alternative to decrease inemployment and creating labour force. Batik Banyumasan is also the part of Banyumasan District tourism promotion, as a souvenir for the tourist that visiting Banyumas. It is the time to get more concerns from the Authority of Banyumas to maximalize it's potention and give the protection for the work of Batik Banyumasan.

DAFTAR TABEL DAN BAGAN

A. Tabel

I.	Ragam desain kain Batik Banyumasan trem	113
II.	Ragam desain kain Batik Banyumasan sosrok.....	119
III.	Ragam desain kain Batik Banyumasan jonas	120
IV.	Ragam desain kain Batik Banyumasan modern.....	141
V.	Ragam desain kain Batik Banyumasan yang masih dikenal masyarakat	155
VI.	Data industri batik di Kabupaten Banyumas	167
VII.	Data pengusaha/perajin batik Per-Kecamatan	167
VIII.	Permohonan desain industri periode 13 Agustus-13 November 2001	192

B. Bagan

I.	Teknik pembuatan desain kain Batik Banyumasan trem	125
II.	Teknik pembuatan desain kain Batik Banyumasan sosrok	128
III.	Teknik pembuatan desain kain Batik Banyumasan Jonas	132
IV.	Teknik pembuatan kain batik printing/sablon	145

DAFTAR ISI

Halaman Judul	I
Halaman Pengesahan	II
Kata Pengantar	III
Abstraksi	V
Daftar Tabel	VII
Daftar Isi	VIII
 Bab I Pendahuluan	 1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	4
C. Kerangka Pemikiran	5
D. Tujuan Penelitian	15
E. Kegunaan Penelitian	16
F. Metodologi Penelitian	16
G. Sistematika Penelitian	19
 Bab II Tinjauan Pustaka	 21
A. Desain Industri Dalam Ruang Lingkup Hak Atas Kekayaan Intelektual	 21
A.1. Pengertian dan Ruang Lingkup Desain Industri	21

a. Konvensi Hak Milik Perindustrian yang Berhubungan dengan Desain Industri	25
b. Sejarah Hak Desain Industri	29
A.2. Pengertian Desain dan Profesi di Bidang Desain Industri	33
a. Pengertian Desain	33
b. Profesi di Bidang Desain	35
B. Penerapan Desain Industri pada Industri di Indonesia	41
B.1. Desain Industri Dalam Sistem Hukum Nasional	41
a. Sebelum Adanya Undang-Undang Desain Industri	41
b. Sesudah adanya Undang-Undang Desain Industri	45
B.2. Peran Desain Industri Pada Umumnya	54
a. Pengaruh Desain Pada Masyarakat Indonesia	56
b. Penghargaan Masyarakat Indonesia Pada Suatu Desain	58
C. Perlindungan Hukum Desain Industri Pada Desain Lokal	61
C.1. Perlindungan Hukum di Bidang Desain Industri	61
a. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum	63
1). Object Perlindungan Hukum di Bidang Desain Industri.....	63
2). Pemilik /Pemegang Hak Desain Industri	64
3). Jangka Waktu Perlindungan Desain Industri.....	67
b. Perlindungan Dengan Lembaga Pendaftaran	69
1). Prinsip Perlindungan Sama (<i>National Treatment</i>).....	69

2). Hak Prioritas	72
c. Pengelolaan Administrasi Hak Desain Industri	74
1). Sistem Pendaftaran Desain Industri	74
2). Prosedur Pendaftaran Desain Industri	76
3). Pemeriksaan Pendaftaran Desain Industri	80
4). Pembatalan Pendaftaran Hak Desain Industri	84
a). Karena Permintaan Pemegang Hak	84
b). Karena Gugatan Pihak Berkepentingan	86
c). Acara Gugatan Melalui Pengadilan Niaga	87
d). Acara Kasasi Melalui Mahkamah Agung	88
e). Akibat Pembatalan Pendaftaran	91
C.2. Penegakan Hukum Atas Pelanggaran Desain Industri	92
a. Penanganan Hukum Terhadap Pelanggaran Desain Industri	93
1). Penanganan Melalui Gugatan Perdata	93
2). Penanganan Melalui Tuntutan Pidana	96
b. Penyelesaian Sengketa Pada Desain Industri	100
1). Penyelesaian Sengketa di Dalam Badan Peradilan	100
2). Penyelesaian Sengketa Dengan Arbitrase	103
 Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan	108
A. Hasil penelitian	108

A.1. Perlindungan hukum desain industri Batik Banyumasan	108
a. Penggolongan desain batik oleh perajin Batik Banyumasan yang perlu dilindungi	109
b. Teknik pembuatan desain batik oleh perajin Batik Banyumasan yang perlu dilindungi	121
A.2. Prinsip kebaruan/ <i>novelty</i> desain industri Batik Banyumasan ...	137
a. Pandangan perajin Batik Banyumasan terhadap kebaruan (<i>novelty</i>) pada desain batik	139
b. Masalah penjiplakan/pembajakan desain batik yang dihadapi oleh para perajin Batik Banyumasan	142
c. Pelaksanaan dan sosialisasi desain industri pada perajin Batik Banyumasan	146
A.3. Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh pengusaha Batik Banyumasan untuk melindungi desain industrinya	149
a. Keterbelakangan perajin Batik Banyumasan dalam menjalankan usahnya	151
b. Pengelolaan usaha batik oleh perajin Banyumasan	159
c. Pengaruh kebijaksanaan pemerintah pada perajin Batik Banyumasan	162
B. Pembahasan	168
B.1. Perlindungan hukum desain industri Batik Banyumasan	168
a. Penggolongan desain batik oleh perajin Batik Banyumasan yang perlu dilindungi	169

b. Teknik pembuatan desain batik oleh perajin Batik Banyumasan yang perlu dilindungi	178
B.2. Prinsip kebaruan/ <i>novelty</i> desain industri Batik Banyumasan ..	181
a. Pandangan perajin Batik Banyumasan terhadap kebaruan (<i>novelty</i>) pada desain batik	182
b. Masalah penjiplakan/pembajakan desain Batik Banyumasan yang dihadapi oleh perajin Batik Banyumasan.....	188
c. Pelaksanaan dan sosialisasi desain industri pada Batik Banyumasan	194
B.3. Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh pengusaha Batik Banyumasan untuk melindungi desain industrinya	200
a. Keterbelakangan perajin Batik Banyumasan dalam menjalankan usahanya	202
b. Pengelolaan usaha batik oleh perajin Batik Banyumasan	208
c. Pengaruh kebijaksanaan pemerintah pada perajin Batik Banyumasan	220
BAB IV Penutup	228
A. Kesimpulan	228
B. Saran	230
Daftar Pustaka.....	232

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dengan ikut sertanya Indonesia dalam *Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights* (TRIPs) pada kerangka *World Trade Organization* (WTO), sebagaimana telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994, juga ikut sertanya Indonesia pada *Convention for the Protection of Industrial Property* (Konvensi Paris) dan *the Hague Agreement (London Act) Concerning The International Deposit of Industrial Designs*. Maka sudah menjadi keharusan bagi Indonesia untuk menaati dan mematuhi kesepakatan tersebut diatas. Indonesia sebagai negara berkembang perlu memajukan sektor industri dengan meningkatkan kemampuan daya saing. Salah satu daya saing tersebut adalah memanfaatkan peranan desain industri. Dari segi hukum desain industri memasuki babak baru dengan disusunnya undang-undang tentang desain industri yang diharapkan mampu mengakomodasi berbagai kebutuhan perlindungan atas desain industri yang selama ini tidak mempunyai aturan tersendiri.

Penciptaan suatu desain memerlukan tenaga, pikiran, waktu bahkan biaya yang tidak sedikit, sehingga perlu upaya perlindungan hukum agar desain itu tidak ditiru atau dijiplak oleh pihak lain. Desain sebagai bagian dari asset perusahaan, haruslah diupayakan mendapat perlindungan

hukum yang cukup, karena desain sangat menentukan keunggulan dalam bersaing suatu produk perusahaan dengan produk lain yang sejenis.

Pengalihan pengaturan desain industri dari Undang-Undang Hak Cipta ke Undang-Undang Desain Industri membawa dampak pada perlindungan hukumnya. Hak cipta tidak harus didaftarkan sedangkan hak desain industri baru muncul bila didaftarkan. Hal ini tentunya akan membawa akibat banyaknya desain industri tidak mendapat perlindungan hukum dari peniruan pihak lain. Realitas yang ada bahwa sebagian besar desain industri yang telah dipasarkan selama ini tidak dimintakan pendaftarannya. Kondisi ini akan terasa lebih mengenaskan apabila produk tersebut diekspor di berbagai negara.

Tradisi hukum asli Indonesia pada awalnya kurang begitu mengenal perangkat hukum yang mengatur perlindungan hak milik perindustrian. Hal demikian disebabkan karena akar hukum Indonesia yang bersifat komunal, kegotongroyongan, tidak begitu mengenal perlindungan hak milik perindustrian yang mengedepankan sifat individual, hal ini terlihat dari beberapa pandangan pendesain yang tidak begitu memperdulikan bila karyanya ditiru orang lain, mereka merasa tidak dirugikan bahkan merasa bangga bahwa karyanya mendapat perhatian. Mereka berpandangan bahwa karyanya merupakan karya batiniah yang universal dan dapat dinikmati siapapun, dimanapun dan kapanpun juga, hal inipun terjadi pada pengusaha Batik Banyumasan.

Sosialisasi desain industri nampaknya harus segera dilaksanakan secara sungguh-sungguh oleh instansi yang terkait di Kabupaten Banyumas pada industri Batik Banyumasan. Karena selain menjadi produk unggulan daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah Banyumas (PAD), juga merupakan alternatif untuk mengurangi pengangguran dan menciptakan lapangan kerja. Industri Batik Banyumasan yang juga menjadi bagian promosi dari kegiatan pariwisata di Kabupaten Banyumas, sebagai cinderamata wisatawan yang berkunjung di Kabupaten Banyumas, sudah saatnya mendapatkan perhatian lebih dari instansi yang terkait di Kabupaten Banyumas, untuk lebih memaksimalkan potensi yang dimiliki dan memberikan perlindungan terhadap hasil karyanya.

Persyaratan utama agar desain industri mendapat perlindungan hukum melalui pendaftaran adalah desain tersebut harus terdapat unsur kebaruan/*novelty*. Tentu saja bagi pengusaha industri Batik Banyumasan terasa sangat berat, tetapi juga merupakan suatu tantangan untuk dapat menciptakan desain batik baru atau kontemporer, bukan hanya batik tradisional. Hal ini membutuhkan kerjasama yang baik antara instansi terkait di Kabupaten Banyumas, dengan pengusaha industri Batik Banyumasan. Para pengusaha Batik Banyumasan harus mampu menciptakan desain batik baru atau kontemporer yang bermutu dan mampu bersaing, tanpa harus meninggalkan ciri khas Banyumasannya, sedangkan instansi yang terkait di Kabupaten Banyumas harus bekerja keras untuk terus melakukan sosialisasi untuk mendorong terciptanya

desain batik baru dan membantu dalam pendaftaran desain batik tersebut, sehingga pengusaha industri Batik Banyumasan dapat terlindungi karyanya. Dan juga instansi yang terkait di Kabupaten Banyumas harus memahami dan mendalami, serta mencari solusi apabila terdapat hambatan-hambatan yang dialami oleh pengusaha Batik Banyumasan dalam melindungi desain industrinya.

Dengan adanya Undang-Undang Desain Industri, maka desain batik tidak lagi berada dibawah Undang-Undang Hak Cipta, karena sudah ada undang-undang yang mengaturnya secara khusus. Oleh karena itu penelitian tentang desain industri pada industri Batik Banyumasan di Kabupaten Banyumas, menjadi sangat urgen untuk dilaksanakan untuk memberikan masukan terhadap perlindungan hukum atas desain Batik Banyumasan.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini adalah ;

1. Bagaimana perlindungan hukum desain industri Batik Banyumasan ?
2. Bagaimana prinsip kebaruan/*novelty* desain industri Batik Banyumasan ?
3. Hambatan-hambatan apa yang dihadapi oleh para pengusaha Batik Banyumasan untuk melindungi desain industrinya ?

C. Kerangka Pemikiran

Berkembangnya perdagangan internasional dan adanya gerakan perdagangan bebas mengakibatkan makin terasa kebutuhan perlindungan terhadap hak milik perindustrian yang sifatnya tidak lagi timbal balik tetapi sudah bersifat antar negara secara global. Pada akhir abad kesembilan belas, perkembangan pengaturan masalah hak milik perindustrian mulai melewati batas-batas negara. Tonggak sejarahnya dimulai dengan dibentuknya Uni Paris untuk Perlindungan Internasional Milik Perindustrian pada tahun 1883. Hak milik perindustrian meliputi tiga komponen, yaitu paten, merek dan desain industri. Pengaturan dalam bentuk konvensinya, yaitu *The Paris Convention for the Protection of Industrial Property* (Konvensi Paris). Konvensi ini mencakup pengaturan terhadap hak merek, hak paten dan hak desain industri.¹⁾

Pengaturan desain industri mulai dikenal pada abad ke-18, pada masa revolusi Inggris. Pada mulanya desain industri berkembang pada sektor tekstil dan kerajinan tangan yang dibuat secara massal. Undang-undang yang pertama dibuat untuk mengatur desain industri adalah *The Designing and Printing of Linens, Cotton, Calicoes and Muslins Act* pada tahun 1787. Undang-undang tersebut memberikan perlindungan hanya dua bulan dan dapat diperpanjang sampai tiga bulan. Pada saat itu desain industri baru dalam bentuk dua dimensi, perkembangan selanjutnya

1) Achmad Zen Umar Purba, *Menyambut Millenium III : TRIPs Dimensi Baru*, Newsletter No. 39, X / Desember / 1999, hal 3.

cakupan desain industri meliputi tiga dimensi. Desain Industri dalam bentuknya yang tiga dimensi mulai diatur dalam *Sculpture Copyright Act* 1798. Pengaturannya pun masih sederhana hanya meliputi model manusia dan binatang. Ketentuan undang-undang 1839 mengatur desain industri yang lebih luas, baik bentuk dua dimensi maupun tiga dimensi yang hasilnya dipakai dalam proses industri. Selain itu diatur juga perlu adanya pendaftaran, tetapi jangka waktu perlindungannya masih tetap singkat. Barulah melalui undang-undang yang keluar pada tahun 1842, pengaturan desain industri lebih komprehensif lagi. Lamanya perlindungan atas hak desain industri tahap demi tahap lebih diperpanjang, menurut *Registered Design Act* 1949 perlindungan diberikan 5 tahun dan dapat diperpanjang dua kali, sehingga totalnya menjadi 15 tahun.²⁾

Dalam peraturan perundang-undangan mengenai desain industri tidak akan terlepas dari hak cipta, karena pada permulaannya pengaturan desain industri tidak dipisahkan dengan hak cipta. Desain industri dianggap sebagai bagian dari pekerjaan artistik atau paling tidak adalah bagian dari seni pakai (*applied art*). Keadaan seperti ini di Inggris terus berlangsung sampai terbentuknya Undang-Undang Hak Cipta Desain dan Paten tahun 1988. Dalam Pasal 51 undang-undang tersebut memuat pemisahan antara perlindungan hak cipta dan hak desain. Sedangkan pengaturan dalam Undang-Undang Hak Cipta 1956, perlindungannya

2) Djubaedillah dan Muhamad Djumhana, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal 199.

terbatas sebagai ciptaan keahlian dalam bidang artistik, yang masih terasa sangat erat dengan perlindungan hak cipta, antara lain dalam hal desain yang dilindungi secara hak cipta, yaitu desain grafik, fotografi, seni pahat atau kolase (*sculpture* atau *collage*), rancang bangun arsitek, pekerjaan tangan. Sedangkan Undang-Undang *Registered Design Act* 1949, menentukan perlindungannya sebagai bagian dari seni terpakai (*applied art*). Sehingga di Inggris terdapat tiga bentuk perlindungan desain, yaitu *design registration*, *design copyright* dan *full copyright*. Adanya peraturan yang belum secara tegas memisahkan desain industri sebagai suatu hak tersendiri, karena latar belakang materi dan obyek desain industri itu sendiri.³⁾

Desain industri tidak bisa terlepas dari kerja cipta manusia yang pengaturannya secara tegas melalui ketentuan hak cipta, yaitu seni lukis, seni patung dan sebagainya. Hal ini terlihat dari wujud desain industri yang tidak terlepas dari langkah menggambar dan membentuk model. Selain bersinggungan dengan hak cipta, desain industri juga dapat bersinggungan dengan hak milik intelektual lainnya, misalnya hak paten dan hak merek. Hal itu karena melihat bentuknya serta penerapannya di bidang industri dan perdagangan, maka desain industri tidak akan terlepas dari aturan hak cipta, hak paten dan hak merek.

3) *Ibid*, hal 200.

Pengaturan desain industri di Indonesia, juga mengalami perkembangan tahap demi tahap. Tradisi hukum asli Indonesia pada awalnya kurang begitu mengenal perangkat hukum yang mengatur perlindungan hak milik perindustrian. Hal demikian disebabkan karena akar hukum Indonesia yang bersifat komunal, kegotongroyongan, tidak begitu mengenal perlindungan hak milik perindustrian yang mengedepankan sifat individual, hal ini terlihat dari beberapa pandangan pendesain yang tidak begitu memperdulikan bila karyanya ditiru orang lain, mereka merasa tidak dirugikan bahkan merasa bangga bahwa karyanya mendapat perhatian. Mereka berpandangan bahwa karyanya merupakan karya batiniah yang universal dan dapat dinikmati siapapun, dimanapun dan kapanpun juga.

Namun semenjak masuknya hukum barat semasa penjajahan Belanda, maka mulailah diperkenalkan hukum di bidang hak milik perindustrian. Pada masa penjajahan perundang-undangan di bidang hak milik perindustrian mulai diperkenalkan, antara lain *Reglement Industriele Eigendom Reglemen* (Reglemen Milik perindustrian) Stbl 1912 Nomor 545 jo. Stbl 1910 nomor 214. Setelah Indonesia merdeka, maka pada tanggal 5 Agustus 1948, Indonesia meratifikasi Konvensi Paris, namun ratifikasi tersebut tidak ditindak-lanjuti dengan dibuatnya perundang-undangan yang diperlukan mengenai hak milik perindustrian secara keseluruhan. Sebelum diatur dalam peraturan perundang-undangan sendiri, perlindungan hukum desain industri masih terbatas dan tersebar dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Seperti halnya tercantum dalam Pasal 17 Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian, dimana dinyatakan bahwa desain industri mendapatkan perlindungan hukum dari pemerintah.⁴⁾

Desain, tidak dapat terpisahkan dari bidang industri dan perdagangan, kedua bidang tersebut terlibat dalam suatu kehidupan manusia dengan segala permasalahannya yang saling berkaitan. Dalam kegiatan industri secara makro, desain merupakan kunci pengembangan industri khususnya dalam hal komponen, karenanya dapat dikatakan sebagai *supporting industries*.⁵⁾ Meskipun demikian tidak dapat mengesampingkan unsur-unsur lainnya, seperti halnya teknik produksi, material, suku cadang, proses produksi, pemasaran dan juga limbah yang dihasilkan, semuanya merupakan unsur terkait di dalam kedua bidang tersebut. Masalah lain yang penting dalam keterkaitan kedua bidang tersebut, yaitu perlindungan terhadap pendesain atau orang yang memiliki/memegang desain hak desain, juga dengan pembinaan usaha dengan kegiatan industri.

Adanya hubungan yang erat antara kedua bidang tersebut, maka tidak berlebihan perlunya suatu landasan penunjang dari sisi hukumnya. Di bidang praktek bisnis, industri dan perekonomian tidak pernah akan terlepas dari hukum, bahkan saat ini kunci pemacu dari keberhasilan ekonomi suatu negara yaitu adanya kepastian hukum atas setiap kegiatan

⁴⁾ J.W. Sitindaon, dkk, *Hak Atas kekayaan Intelektual*, Disperindagkop, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Balai Latihan Industri, Yogyakarta, 1999, hal 3.

⁵⁾ Muhamad Djumhana, *Aspek-Aspek Hukum Desain Industri di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hal 73.

ekonominya, sehingga untuk perlindungan bagi semua pihak maka hukum harus menjadi panglima dari semua aspek kehidupan. Hukum saat ini merupakan sesuatu yang tidak bisa diabaikan dan telah menjadi suatu kebutuhan dalam kegiatan di bidang desain. Salah satu contoh begitu diperlukannya hukum dalam kehidupan di bidang desain, yaitu dilindunginya hak dari suatu karya seorang pendesain merupakan penghargaan yang besar.

Dilindunginya suatu karya secara hukum bagi seorang pendesain dan produsen akan memberikan keuntungan yang besar bagi mereka dalam usahanya, terhindarkan dari usaha-usaha peniruan dan tindakan persaingan yang tidak jujur sehingga terjaga keamanan produk yang didesain/dirancanganya baik masih dalam bentuk model atau rancangan maupun setelah melalui tahapan proses produksi massal dalam tahap pemasarannya. Hal tersebut tentu saja menggambarkan pentingnya kebutuhan hukum untuk melandasi kegiatan perekonomian suatu negara termasuk di dalamnya yang menyangkut desain industri. Melihat keadaan yang demikian, maka dalam memahami atau mempelajari hukum yang mengatur masalah desain industri tidak bisa hanya terbatas hukum di dalam negeri saja, tetapi perlu memahami atau mempelajari hukum internasional, serta memahami atau mempelajari sistem hukum negara lain yang menjadi mitra dalam kegiatan ekonomi. Rendahnya atau kurangnya pemahaman dan pengetahuan hukum negara mitra kita sering digunakan oleh mereka untuk melakukan praktek-praktek usaha yang merugikan

(*restrictive business practices*), tindakan yang mengarah kepada penekanan kehendak mitra usaha kita.⁶⁾ Dari hal tersebut maka tergambar bahwa tanpa dukungan kemampuan memahami dan menguasai sistem hukum negara industri yang menjadi mitra kegiatan perekonomian kita, maka perdagangan kita akan terhambat bahkan cenderung merugi.

Dalam hubungannya dengan hukum desain industri di Indonesia, maka hukum desain industri lebih banyak ditentukan oleh pengaruh hukum yang berlaku secara internasional. Pengaruh hukum internasional di bidang pengaturan desain industri pada negara-negara berkembang seperti Indonesia tidak dapat juga dengan rasa keterpaksaan, artinya negara-negara berkembang terpaksa menerima ketentuan yang terbentuk dalam perjanjian-perjanjian internasional karena untuk mempertahankan ekonominya, yaitu terbukanya peluang pasar internasional yang lebih luas juga untuk memberikan perlindungan multilateral yang lebih baik bagi kepentingan nasional dalam perdagangan internasional. Dengan demikian memang terdapat hubungan yang erat antara hukum nasional dengan hukum internasional, artinya pengembangan hukum nasional tidak dapat terlepas dari pengembangan hukum internasional bahkan hukum nasional negara lain.

Saat ini telah ada perangkat hukum sendiri yang mengatur tentang desain industri, dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Desain industri (*Industrial Design*) adalah suatu

⁶⁾ *Ibid*, hal 74.

kreasi tentang bentuk, konfigurasi atau komposisi garis atau warna atau garis dan warna atau gabungan daripadanya yang berbentuk 3 (tiga) dimensi yang mengandung nilai estetik dan dapat diwujudkan dalam pola 3 (tiga) dimensi atau 2 (dua) dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang atau komoditi industri dan kerajinan tangan (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Desain Industri). ⁷⁾

Dengan adanya undang-undang tersebut maka pendesain dapat memperoleh haknya untuk mendapatkan perlindungan hukum akan hasil karyanya. Selain itu pengembangan kemampuan rancang bangun, penelitian dan perekayasa yang merupakan hal yang diperlukan dalam suatu produk teknologi yang dilahirkan oleh perusahaan, akan mendapat dukungan dari hukum dan sistemnya. Sebagai contoh bahwa ketentuan yang mengatur penerapan teknologi tidak boleh merugikan kepentingan umum, produk teknologi harus ramah lingkungan, penghargaan kepada pihak yang telah memberikan kemampuannya untuk ilmu pengetahuan dan teknologi dengan mengakui hasil intelektualnya sebagai kekayaan yang dilindungi secara hukum. Menyangkut pengaturan tertentu yang bersifat membatasi, semuanya didasarkan untuk kepentingan yang lebih besar yaitu masyarakat.

Pengaturan di bidang desain industri tidak hanya tertuju kepada perlindungan dan jaminan hukum atas desain atau hak desain semata.

Banyak aspek-aspek lain yang berkaitan dengan desain industri yang juga

⁷⁾ Supanto, *Penegakan Hukum Pidana di Bidang Desain Industri dan Merek, Seminar Nasional Implementasi Undang-Undang Desain Industri dan Merek*, Surakarta, 2002, hal 5.

harus diperhatikan, antara lain jaminan kesehatan, keamanan dan keselamatan produk desain industri, serta ramah lingkungan. Beberapa fungsi desain industri, yaitu : ⁸⁾

1. fungsi teknis yang menyangkut keamanan sehat bagi orang yang memakai, dapat diandalkan atau *reability* dari produk tersebut dan teknologi ;
2. fungsi fisik menyangkut siapa yang memakai produk tersebut, apakah anak-anak, orang dewasa, orang tua atau orang cacat ;
3. fungsi psikologis yang menyangkut gabungan antara orang yang memakai produk tersebut berdasarkan latar belakang sosial dan keadaan dari pemakai nilai simbolis pengaruh mode, pengaruh kegunaan dari produk tersebut, sifat produk dan sebagainya ;
4. fungsi estetis yang menyangkut proporsi dari bentuk produk, warna dan sebagainya berdasarkan apresiasi terhadap yang bagus atau cantik serta berhubungan dengan selera baik ;
5. fungsi ekonomis yang berhubungan dengan harga yang dapat dijangkau dengan kualitas atau mutu produk yang baik serta tahan lama ;
6. fungsi sosial yang berhubungan dengan efek dari dibuatnya produk tersebut terhadap masyarakat misalnya sumber bahan, sumber energi, pencemaran udara atau lingkungan dan sebagainya.

⁸⁾ Ita Gambiro, *RUU Desain Produk Industri*, Gramedia Offset, Jakarta, 1992, hal 16.

Dapat dikatakan bahwa seseorang mengambil keputusan untuk membeli produk atau barang didasarkan pada fungsi-fungsi tersebut diatas sebagian atau keseluruhan. Desain industri dapat dipandang dan dipromosikan sebagai suatu komponen dari inovasi teknologi, terutama sebagai suatu disiplin dari pengembangan produk yang berkaitan dengan;⁹⁾

1. dapatnya barang untuk dipakai (*useability*) ini ada hubungannya antara produk itu sendiri dengan pemakai yang berarti produk itu harus praktis, aman mudah dalam pemakaian, mudah dalam pemeliharaan dan perbaikan ;
2. produktivitas (*productivity*) ini terkait pada pemakaian sumber-sumber teknologi yang terdiri dari tersedianya mesin-mesin, bahan-bahan yang ada, keterampilan dan pengalaman kerja, proses manufaktur, *know how* dan *organizational methods* ;
3. pemasaran (*marketability*) ini terkait dengan permintaan yang potensial dari konsumen atau pembeli dari produk tersebut, mungkin perorangan, mungkin juga badan pemerintah atau badan swasta ;
4. keuntungan atau laba (*profitability*) ini terkait erat dengan cara manufaktur produk dengan nilai pakai yang cukup tinggi, dengan harga yang cukup rendah tergantung pada tersedianya tenaga kerja yang terampil ;

⁹⁾ *Ibid*, hal 17.

5. kualitas estetika dari produk tersebut ini berkaitan erat dengan penampilan dari produk tersebut secara visual, yang terdiri dari bagian-bagian yang secara keseluruhan memberikan bentuk dari suatu produk, texture, warna dan lain sebagainya.

Hal tersebut diatas semuanya berkaitan pula dengan latar belakang budaya, standar sosial dan kebiasaan pemakai suatu produk atau pembeli dari suatu produk. Dalam kaitannya antara produk dengan manusia, maka unsur-unsur tersebut diatas mendapat perhatian yang utama. Suatu produk akan disebut bermutu apabila bebas dari cacat teknis, memenuhi kebutuhan pelanggan, harga murah, aman pada saat diproduksi dan digunakan baik bagi pemakai produk maupun lingkungan. Hal tersebut merupakan salah satu syarat untuk dapat bersaing dalam globalisasi perdagangan, karena konsumen dunia yang begitu kritis akan suatu produk.

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisa perlindungan hukum desain industri Batik Banyumasan ;
2. Untuk mengetahui dan menganalisa prinsip kebaruan/*novelty* desain industri Batik Banyumasan ;
3. Untuk mengetahui dan menganalisa hambatan-hambatan yang dihadapi oleh para pengusaha Batik Banyumasan untuk melindungi desain industrinya.

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan baik dari aspek teoritis maupun dari aspek praktis. Dari aspek teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu hukum yang mengatur tentang perlindungan desain industri. Sedangkan dari aspek praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pembuat kebijaksanaan dalam membuat keputusan tentang perlindungan hukum desain industri. Di samping itu juga diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya dan pengusaha batik pada khususnya.

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif dan metode pendekatan yuridis sosiologis.

Penelitian hukum yang normatif menekankan pada langkah-langkah spekulatif teoritis dan analisis normatif kualitatif. Sedangkan penelitian sosiologis memberikan arti penting pada langkah-langkah observasi dan analisis yang bersifat empiris kuantitatif.¹⁰⁾

Spesifikasi penelitian dalam tesis ini adalah penelitian deskriptif analitis yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

¹⁰⁾ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta 1990, hal 35.

dikaitkan dengan teori-teori hukum positif yang menyangkut permasalahan yang diteliti.¹¹⁾

Dengan demikian penelitian deskriptif analitis ini dimaksud untuk menggambarkan secara cermat fenomena sosial tertentu.

Alasan digunakan penelitian deskriptif analitis, yaitu :

- a. Dengan penelitian deskriptif analitis akan diperoleh gambaran yang menyeluruh tentang permasalahan yang akan diteliti ;
- b. Penelitian deskriptif analitis akan menghasilkan data dasar yang dapat digunakan untuk berbagai macam tujuan, antara lain untuk menerangkan hubungan beberapa gejala, untuk memprediksi keadaan dimasa datang, dapat digunakan sebagai bahan penelitian dan pengambilan kebijaksanaan oleh pihak yang berwenang.

2. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian berada di Kabupaten Banyumas, dengan pertimbangan daerah ini merupakan tempat tinggal penulis, sehingga memudahkan dalam pengambilan data di lapangan, karena medan telah dikenal.

3. Populasi dan sampling

Populasi adalah keseluruhan object yang akan diteliti.¹²⁾ Dalam penelitian ini, keseluruhan object yang akan diteliti adalah para pengusaha batik di Kabupaten Banyumas yang terdaftar pada kantor Disperindagkop. Akan tetapi tidak semua object yang akan diteliti.

¹¹⁾ *Ibid*, hal 97.

¹²⁾ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendaftaran Praktek*, Rineka Cipta, 1993, hal 115.

Penelitian hanya akan dilakukan pada sebagian dari populasi, penelitian ini dikenal dengan penelitian sampel.¹³⁾ Penentuan sampel dilakukan dengan cara *purposive sampling* atau penarikan sampel, yang dilakukan dengan cara mengambil subject didasarkan pada tujuan tertentu. Teknik ini dipilih karena alasan keterbatasan waktu, tenaga dan biaya, sehingga tidak dapat mengambil sampel dalam jumlah besar dan jauh letaknya.¹⁴⁾ Sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Para pengusaha batik yang mempunyai bentuk badan usaha (5 responden) ;
- b. Para pengusaha batik yang tidak mempunyai bentuk badan usaha (10 responden).

4. Teknik pengumpulan data

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

- a. Data primer adalah data yang diperoleh di lapangan secara langsung. Data ini diperoleh dengan melakukan penelitian di lapangan (*field research*). Hal ini dilakukan dengan mengamati secara langsung terhadap fenomena atau gejala sosial yang diteliti. Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara

¹³⁾ *Ibid*, hal 125.

¹⁴⁾ Ronny Hanitijo Soemitro, *op.cit.*, 1990, hal 51.

dengan nara sumber dan dengan penyebaran kuisioner pada responden ;

- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui penelusuran pustaka (*library research*), antara lain berupa dokumen resmi, buku, hasil penelitian, makalah, karya ilmiah dan sebagainya. ¹⁵⁾

5. Alat pengumpulan data

Alat pengumpulan data meliputi, yaitu :

- a. Daftar pertanyaan ;
- b. Wawancara ;
- c. Catatan hasil penelitian di lapangan.

6. Analisis data

Analisis yang digunakan adalah analisis data kualitatif, yaitu suatu penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Analisis, yaitu yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilaku yang nyata, yang dipelajari sebagai suatu yang utuh. Selain itu dibantu dengan data kualitatif berupa tabel. ¹⁶⁾

H. Sistematika Penelitian

BAB I : menguraikan mengenai, latar belakang, perumusan masalah, kerangka pemikiran, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metodologi penelitian dan sistematika penelitian.

¹⁵⁾ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hal 51.

¹⁶⁾ *Ibid*, hal 250.

BAB II : menguraikan kajian pustaka yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Pada bab ini disajikan beberapa pokok bahasan (1) desain industri dalam ruang lingkup hak atas kekayaan intelektual (2) penerapan desain industri pada industri di Indonesia (3) perlindungan hukum desain industri pada desain lokal.

BAB III : berupa hasil penelitian dan pembahasan yang memaparkan hal-hal (1) perlindungan hukum desain industri Batik Banyumasan, (2) prinsip kebaruan/*novelty* desain industri Batik Banyumasan, (3) hambatan-hambatan yang dihadapi para pengusaha Batik Banyumasan untuk melindungi desain industrinya.

BAB IV : Penutup, terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Desain Industri Dalam Ruang Lingkup Hak Atas Kekayaan Intelektual

A.1. Pengertian dan Ruang Lingkup Desain Industri

Pengertian dan ruang lingkup desain industri, termuat dalam beberapa pandangan. Seperti halnya pandangan dari Misha Black, menyebutkan beberapa aspek dari perencanaan sebuah desain, yang terdiri dari ; ¹⁷⁾

- a. aspek kegunaan, yaitu mengacu kepada interaksi langsung antara manusia dan produk dengan dilandasi pertimbangan-pertimbangan seperti halnya kenyamanan, kepraktisan, keselamatan, kemudahan, perawatan, perbaikan, termasuk juga faktor-faktor ergonomi dan anthropometri ;
- b. aspek fungsi, mengacu pada prinsip fisik dan teknik dari desain dan dilandasi oleh pertimbangan permesinan, persediaan bahan baku, tata cara kerja, perakitan, tingkat keterampilan tenaga kerja, efisiensi, penghematan biaya, toleransi, kelayakan, standarisasi dan sebagainya;
- c. aspek pemasaran, berorientasi pada potensi kebutuhan konsumen yang dilandasi pertimbangan akan kebutuhan dan keinginan,

¹⁷⁾ Muhamad Djumhana, *op.cit.*, hal 9

kebijaksanaan produk, diversifikasi produk, skala prioritas, harga, jaringan, distribusi dan sebagainya ;

- d. aspek nilai estetis dan penampilan suatu produk mengacu pada nilai visual dan psikologis dari desain yang dilandasi oleh pertimbangan seperti halnya bentuk keseluruhan, unsur penampilan, pembuatan detail, proporsi, tekstur, warna, grafis dan penyelesaian akhir.

Pandangan lain dikemukakan oleh Agus Sachari, yaitu dengan melihat konsep suatu desain tersebut akan menjadi suatu realitas dengan jalan mentransformasi. Realitas dari transformasi tersebut meliputi realitas fungsional, realitas aman, realitas terampil, realitas ekonomis, realitas estetis dan realitas sikap atau dimensi etis.¹⁸⁾

Dengan melihat definisi mengenai desain industri yang dikemukakan oleh Misha Black dan pandangan Agus Sachari, suatu desain pada dasarnya untuk menghasilkan produk industri selain berorientasi pada unsur fungsi, juga tidak meninggalkan unsur estetika, ekonomi dan etis. Unsur estetika inilah yang merupakan salah satu nilai lebih dari sebuah produk industri, yang selanjutnya nilai lebih itu menjadikan produk industri tersebut memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif sehingga bernilai ekonomi yang melebihi pesaingnya.

¹⁸⁾ Agus Sachari, *Desain Gaya dan Realitas*, Rajawali, Jakarta, 1986, hal 47.

Kegiatan desain industri bersifat multi disiplin dan sangat luas cakupannya, sehingga desain industri memiliki sub bidang yang lebih khusus, seperti halnya ; ¹⁹⁾

- a. desain produk, yang meliputi furniture, perlengkapan rumah tangga, alat-alat elektronik, perlengkapan medis dan rumah sakit, perlengkapan kantor, komponen bangunan, perlengkapan olah raga dan hobi, kerajinan dan sebagainya ;
- b. desain fasilitas lingkungan, seperti halnya fasilitas olah raga dan rekreasi, sistem informasi kota, perkakas dan sarana umum kota, shelter, peralatan pertanian dan perkebunan ;
- c. desain alat transportasi, meliputi alat angkutan darat, laut dan udara.

Sebuah barang yang akan diproduksi akan selalu melalui tahapan berupa perancangan. Perancangan ini bisa berbentuk dua dimensi maupun tiga dimensi. Rancangan motif untuk tekstil berbentuk dua dimensi, sedangkan rancangan untuk barang seperti halnya kursi atau yang lainnya diperlukan dalam bentuk tiga dimensi. Penuangan rancangan bisa melalui media lukisan dalam bentuknya yang dua dimensi atau melalui seni patung untuk rancangan tiga dimensi, seperti prototif sebuah bentuk barang.

¹⁹⁾ Agus Sachari, *Paradigma Desain di Indonesia*, Rajawali, Jakarta, 1986, hal 136.

Whitford membagi desain industri ke dalam dua kategori, yaitu;²⁰⁾

- a. kategori A berupa desain yang hanya berbentuk permukaan rata seperti dua dimensi dan bentuk lain yang bersifat tiga dimensi, yang mana unsur estetikanya mendorong konsumen untuk membeli barang hasil desain tersebut. Hal yang dilindungi dari desain kelompok ini adalah unsur estetik penampilan barang tersebut, bukan pokok yang mendasarinya berupa ide dan prinsip yang umum seperti dalam hukum hak cipta. Juga tidak diperlukan pendaftaran maupun uang tanggungan ;
- b. kategori B berupa desain yang berbentuk tiga dimensi hanya bentuk desain tersebut tidak memberi dorongan konsumen membelinya. Pembelian barang oleh konsumen karena kegunaan dan peruntukan barang tersebut.

Menurut Pasal 213 Undang-Undang Hak Cipta, Desain dan Paten Inggris Tahun 1988, yang disebut *design right* adalah "*the design of any aspect of the shape or configuration (whether external or internal) of the whole or part of the article*" (rancangan seluruh aspek bentuk, atau konfigurasi apakah itu eksternal maupun internal dari seluruh maupun bagian dari suatu barang. Sedangkan dalam Undang-Undang Pendaftaran Desain 1949 (*The Registered Design Act 1949*), pada Pasal 1 Ayat 3 pengertian desain industri disebutkan sebagai "*features of shape, configuration, pattern or ornament applied to an*

²⁰⁾ Djubaedillah dan Muhamad Djumhana, *op.cit.*, hal 202.

article bay any industrial process or means, being feature which in the finished article appeal to an judged solely by the eye, but does not include a method or principle of construction or features of shape or configuration which are dictated solely by the function which the article to be made in that shape or configuration has to perform". Merancang sebuah produk yang akan dihasilkan industri tertentu, bisa meliputi keseluruhan aspek bentuk dan konfigurasi dari barang tersebut atau hanya bagian tertentu saja. Langkah hasil perancangan suatu barang yang akan diproduksi secara massal tersebut selanjutnya dapat disebut sebagai desain industri.²¹⁾ Hal ini karena penguasaan seni yang diwujudkan digunakan dalam proses industri, serta mempunyai kemanfaatan untuk menunjang kesuksesan pemasarannya, disebabkan barang tersebut memiliki estetika, aspek kemudahan atau kenyamanan dalam penggunaannya.

a. Konvensi Hak Milik Perindustrian yang Berhubungan dengan Desain Industri

Pemikiran pentingnya perlindungan desain tidak terbatas hanya di suatu negara saja melainkan juga butuh perlindungan yang bersifat lintas negara (internasional). Hal tersebut terjadi setelah perdagangan melewati batas-batas teritorial suatu negara semakin besar jumlahnya. Pemikiran pentingnya suatu perlindungan hukum di bidang hak milik perindustrian timbul dari sekelompok

²¹⁾ *Ibid*, hal 203.

professional, yaitu *Patent Lawyers*, yang telah mulai berkumpul dalam *Viena World Fair* pada tahun 1873. Adanya kebutuhan perlindungan hukum tersebut membuat mereka mengadakan suatu konvensi di Paris pada tanggal 23 Maret 1883 yang dikenal dengan *Paris Union* atau secara lengkapnya *The Paris Convention for the Protection of Industrial Property*.

Konvensi tersebut merupakan suatu perjanjian untuk melindungi milik perindustrian yang meliputi hak paten, hak merek dan hak desain industri (awalnya terdiri dari model-model dan gambar-gambar industri). Konvensi ini mengalami beberapa kali revisi, yang dilakukan melalui pertemuan-pertemuan di Brussel (14 Desember 1900), Washington (2 Juni 1911), Den Haag (6 November 1925), London (2 Juni 1934), Lisabon (31 Oktober 1958), Stockholm (14 Juli 1967) dan Jenewa (1979). Isi dari Konvensi Paris dapat dibagi menjadi 3 bagian penting, yaitu ; ²²⁾

- a) ketentuan-ketentuan pokok mengenai prosedur, antara lain prosedur menjadi anggota Uni, bahwa "setiap negara dapat menjadi anggota Uni dengan mengajukan permohonan secara resmi, negara yang diterima menjadi anggota terikat pada naskah konvensi yang paling akhir sebelum dia menjadi anggota" ;

²²⁾ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2001, hal 30.

- b) prinsip-prinsip yang dijadikan pedoman wajib negara-negara anggota Uni, antara lain perlakuan kesamaan hak nasional (*national treatment*), bahwa "negara anggota Uni wajib memperlakukan orang asing warga negara dari negara lain anggota Uni sama seperti negaranya sendiri" ;
- c) ketentuan-ketentuan mengenai materi hak milik perindustrian, yaitu hak paten, hak merek dan hak desain industri.

Konvensi menetapkan bahwa setiap negara dapat menjadi anggota Uni dengan mengajukan permohonan secara resmi. Setelah diterima sebagai anggota, maka ia terikat kepada naskah konvensi yang paling akhir sebelum ia menjadi anggota.

Konvensi Paris pada dasarnya masih terlalu umum, maka kemudian dibentuk pula konvensi atau perjanjian yang khusus hanya mengatur satu bidang hak milik perindustrian, yaitu paten dan merek. Sedangkan konvensi mengenai desain industri, bersatu dalam konvensi Paris, yaitu konvensi untuk perlindungan hak milik perindustrian 1883.²³⁾

Pengelolaan dari konvensi ini dilakukan oleh *United Biro for the Protection Intellectual Property* dalam bahasa Perancis disebut *Bivioeux International reunis pour la protection de propriere Intelectuelle* (BIRPI), yang sekarang ini lebih dikenal dengan WIPO (*World International Property Organization*), yang berkantor di

²³⁾ Ansori, *Sistem Perlindungan Paten*, Makalah Peningkatan Pemahaman HAKI, Yogyakarta, 2000, hal 1

Jenewa. WIPO memegang peranan penting dalam perlindungan hak milik intelektual secara internasional. Walaupun badan tersebut bukan merupakan badan peradilan khusus ditugaskan untuk memberikan interpretasi secara *uniform* dari konvensi-konvensi tersebut, dan juga tidak melakukan pengawasan atas anggota-anggotanya, tetapi badan tersebut mempunyai peranan yang sangat strategis dalam perlindungan hak milik intelektual secara internasional. Badan tersebut seringkali mengadakan persiapan untuk konvensi-konvensi dan membuatkan *drafts convention*.²⁴⁾

Selain itu juga berusaha membuat model hukum yang dapat ditiru oleh negara berkembang. Beberapa model hukum yang telah dihasilkan yaitu di antaranya paten 1964, merek dan persaingan tidak jujur 1966 dan juga desain industri 1968. Peranan lain yang penting dari BIPPI/WIPO dalam kerja sama internasional ini adalah BIPPI merupakan kantor di mana dapat dideponir merek-merek dan desain industri serta model-model untuk suatu registrasi secara internasional. Selain konvensi tersebut, juga terdapat sebuah perjanjian yang dikenal dengan Konvensi Den Haag 1925 atau "*The Hague Arrangement Concerning the International Deposit of industrial Pattern and Design*".²⁵⁾

²⁴⁾ Muhamad Djumhana, *op.cit.*, hal 19.

²⁵⁾ Djubaedillah dan Muhamad Djumhana, *op.cit.*, hal 16.

b. Sejarah Hak Desain Industri

Sejarah desain muncul terlebih dahulu dibandingkan sejarah perlindungan hukum terhadap desain. Sejarah desain dimulai dari kesadaran manusia membuat alat, bermula dari zaman pra sejarah pada saat manusia baru mencoba membuat sebuah kapak batu untuk memenuhi kebutuhan perkakas dalam melakukan kegiatannya, secara jelasnya 2800 SM diketahui telah ada jejak gambar-gambar desain dari suatu produk.

Sejarah hak desain industri mulai dikenal pada abad ke-18, terutama di negara yang mengembangkan revolusi industri yaitu Inggris. Pada permulaannya desain industri berkembang pada sektor pertekstilan dan kerajinan tangan yang dibuat secara massal. Jadi wajar bila undang-undang yang pertama mengatur desain industri adalah "*The Designing and Prienting of Linens, cotton, calicoes and Muslins Act*" sekitar tahun 1787. Undang-undang tersebut memberikan perlindungan hanya dua bulan dan dapat diperpanjang sampai tiga bulan. Pada saat itu desain industri baru dalam bentuknya yang dua dimensi, perkembangan selanjutnya cakupan desain industri meliputi bentuk tiga dimensi.

Desain industri dalam bentuknya yang tiga dimensi mulai diatur melalui "*Sculpture Copyright Act 1798*" dan binatang, barulah dengan undang-undang yang dibentuk pada tahun 1814, lingkup pengaturannya diperluas. Ketentuan Undang-Undang 1839

mengatur desain industri yang lebih luas lagi, baik bentuk yang dua dimensi maupun tiga dimensi yang hasilnya dipakai dalam proses produksi. Selain itu diatur juga perlunya ada pendaftaran, tetapi jangka waktu perlindungannya masih tetap singkat. Barulah melalui undang-undang yang keluar pada tahun 1842, pengaturan desain industri lebih komprehensif lagi. Lamanya perlindungan atas hak desain ini tahap demi tahap lebih diperpanjang, menurut *Registered Design Act* 1949 perlindungan diberikan 5 tahun dan dapat diperpanjang dua kali, jadi totalnya lama perlindungan adalah 15 tahun.²⁶⁾

Dalam peraturan perundang-undangan mengenai desain industri tidak akan terlepas dari hak cipta. Pada permulaannya pengaturan desain industri tidak dipisahkan dengan bidang hak cipta. Desain industri dianggap sebagai bagian dari pekerjaan artistik atau paling tidak adalah bagian dari seni pakai (*applied art*). Keadaan seperti ini di Inggris terus berlangsung sampai terbentuknya Undang-Undang Hak cipta Desain dan Paten tahun 1988. Pasal 51 undang-undang tersebut memuat pemisahan antara perlindungan hak cipta dan hak desain secara jelas sedangkan pengaturan dalam Undang-Undang Hak Cipta 1956, perlindungannya terbatas sebagai ciptaan keahlian dalam bidang artistik, yang masih terasa sangat erat dengan perlindungan hak cipta. Misalnya contoh dalam hal desain yang dilindungi secara hak

²⁶⁾ *Ibid*, hal 199.

cipta, yaitu desain grafik, fotografi, seni pahat atau kolase (*sculpture* atau *collage*), rancang bangun arsitek, pekerjaan tangan. Sedangkan Undang-Undang *Registered Design Act* 1949, menentukan perlindungannya sebagai bagian dari seni terpakai (*applied art*). Sehingga di Inggris dikenali 3 bentuk perlindungan desain, yaitu desain *registration*, *design copyright* dan *full copy right*.²⁷⁾

Adanya peraturan yang belum secara tegas memisahkan desain industri sebagai suatu hak tersendiri, karena latar belakang materi dan obyek desain industri itu sendiri. Desain industri tidak bisa terlepas dari kerja cipta manusia yang pengaturannya secara tegas melalui ketentuan hak cipta, yaitu seni lukis, seni patung dan yang lainnya. Hal ini dilihat dari wujud desain industri yang tidak terlepas dari langkah menggambar dan membentuk model. Selain bersinggungan dengan hak cipta, desain industri juga dapat bersinggungan dengan hak milik intelektual lainnya misalnya paten, maupun merek. Hal ini karena melihat bentuknya serta penerapannya di bidang industri dan perdagangan, maka desain Industri tidak akan terlepas dari perhatian aturan hak cipta, hak paten dan hak merek.

Dalam sejarah perkembangan desain tidak akan terlepas dari perkembangan industrialisasi dan mekanisasi, serta pengaruh dari pertumbuhan perdagangan dunia. Hal-hal demikian menumbuhkan

²⁷⁾ *Ibid*, hal 200.

tekanan kompetitif yang pada gilirannya mengarah kepada tuntutan untuk mengadakan pembaruan, dari sini pula bermula gerakan-gerakan yang berkaitan dengan desain, antara lain, yaitu ; ²⁸⁾

- a) tahun (1845) di Swedia timbul semacam gerakan yang berusaha untuk menggabungkan industri yang bersifat masinal dengan seni, dengan harapan produk-produk teknologi tidak sekedar perwujudan dari kerja mesin belaka, tetapi lebih mengarah kepada nilai-nilai kemanusiaan ;
- b) Sir Henry Cole pada tahun 1847 menjadi salah satu penggerak baru di bidang desain, yaitu gerakan untuk memperbaiki suatu keadaan bidang desain sehubungan dengan adanya produk industri yang bersifat masinal sehingga terasa kurang humanis. Dasar pemikiran gerakan adalah kemampuan mekanis haruslah dikawinkan dengan kemampuan artistik yang tinggi ;
- c) tahun 1907 di Jerman muncul gerakan, yang dikenal dengan nama *Werkbund*, gerakan ini mencetuskan pemikiran bahwa suatu produk haruslah menggunakan teknik dan material yang baik, praktis, serta harus harmonis dalam penampilan visualnya. Di Jerman pada tahun 1919 muncul gerakan *Bauhaus*, gerakan ini dianggap sebagai titik penting perkembangan desain modern selanjutnya. Hal ini karena gerakan tersebut mampu memadukan antara seni rupa dengan industri secara harmonis.

²⁸⁾ Muhamad Djumhana, *op.cit.*, hal 17.

Dari gerakan *Bauhaus* inilah mulai dikenal profesi "*industrial design*" yang dianggap cukup berperan dalam era pertumbuhan industri dunia. Perkembangan di bidang desain selanjutnya mengalami pasang surut artinya pada saat tertentu desain industri hanya tertuju pada satu bidang saja, yaitu untuk memenuhi pemenuhan kebutuhan militer. Perkembangan ini terjadi saat Perang Dunia II ;

- d) Setelah Perang Dunia II, maka desain mengalami perkembangan yang cukup pesat, hal ini terjadi saat ditemukan Sirkuit Terpadu (IC) pada tahun 60-an. Perkembangan yang pesat juga terjadi pada tahun 70-an, yaitu bersamaan dengan perkembangan teknologi elektronika yang sangat pesat, dekade tersebut dilanjutkan dengan dekade peradaban informatika.

A.2. Pengertian Desain dan Profesi di Bidang Desain Industri

a. Pengertian Desain

Kata *design*, menurut John M. Echols adalah potongan, model, pola, konstruksi, mode, tujuan dan rencana. Sedangkan menurut Webster pengertian *design* adalah gagasan awal, rancangan, perencanaan, pola, susunan, rencana, proyek, hasil yang tepat, pikiran, maksud, kejelasan dan seterusnya. Menurut Imam Buchori Zainuddin di Indonesia pengertian desain sangat bermacam-macam, ada yang berpendapat bahwa desain sama

dengan “anggitan” yang menurut kamus Purwadarminta memiliki arti sebagai menyusun, mengubah dan mengarang. Menurut Alexander seorang insinyur (1963) menekankan pada pencarian komponen fisik yang paling tepat. Sedangkan Bruce Archer merumuskan sebagai aktivitas pemecahan masalah yang terarah. Gregory berpendapat mempertautkan situasi atau kenyataan kebenaran. Matchett memberikan definisi penyelesaian yang paling optimal dari kebutuhan-kebutuhan nyata. Sedangkan pandangan yang lebih melihat ke depan dikemukakan oleh J.K. Page, yang menyatakan lompatan yang penuh imajinasi dari kenyataan kini ke kemungkinan-kemungkinan masa datang. Sedangkan Reswick dan Guy Bonsiepe menekankan unsur inovatif dan kreatifnya, yaitu suatu kegiatan menjadikan dari sesuatu keadaan tidak ada ke ada yang mempunyai daya guna.²⁹⁾

Salah satu definisi desain yang sederhana namun cukup memberikan gambaran ruang lingkup yang jelas, yaitu definisi desain yang diberikan Agus Sachari. Menurutny desain sebagai suatu kegiatan manusia untuk menciptakan lingkungan dan khasanah perbedaan buatan yang diolah dari alam. Khazanah ini kemudian sejalan dengan waktu yang selalu berubah-ubah dan penuh diwarnai inovasi-inovasi untuk menciptakan kehidupan budayanya. Definisi lain yang lebih luas dan terlihat lebih menyeluruh menggambarkan desain, yaitu definisi yang dikutip

²⁹⁾ *Ibid*, hal 4.

Agus Sachari dan Yustiono dari Bruce Archer, antara lain berbunyi *"Design is the area of human experience, skill and knowledge that reflects man's concern with the appreciation and adaptation of his surroundings in the light of his material and spiritual needs. In particular, it realtes with configuration, composition, meaning, value and purpose in man made phenomena"* (bahwa desain adalah bidang keterampilan, pengetahuan dan pengalaman manusia yang mencerminkan keterikatannya dengan aspresiasi dan adaptasi lingkungannya ditinjau dari kebutuhan-kebutuhan kerohanian, komposisi, arti, nilai dan tujuan dari fenomena buatan manusia).³⁰⁾

Desain mencakup pembuatan peralatan sehari-hari dari yang paling kecil seperti sendok garpu, hingga pada corak dan model tekstil serta pakaian, perumahan hingga tata kota beserta alat-alat transportasi beserta jaringannya. Oleh karena itu bidang desain yang luas mencakup desain produk, tekstil, interior, grafis, arsitektur, desain rekayasa, serta desain kota. Semuanya itu dibuat dalam rangka pemenuhan kebutuhan spiritual dan material manusia.

b. Profesi di Bidang Desain

Pada mulanya sejarah manusia tidak mengenal orang yang dianggap sebagai desainer, hal demikian terus berlangsung walaupun begitu banyak aspek keindahan dan fungsi hasil

³⁰⁾ Agus Sachari, *Desain Gaya dan Realitas*, *op.cit.*, 1986, hal 23.

peradaban tercipta tanpa seorang pun menyadarinya. Dengan berjalannya peradaban kemudian tumbuh suatu kesadaran membuat gambar-gambar desain dari suatu produk. Sekitar tahun 2800 SM, pada saat itu mulai ada yang dianggap sebagai desainer. Profesi atau orang yang berkecimpung di bidang desain dikenal dengan sebutan desainer.

Desainer, sebagai orang yang berprofesi di bidang desain industri memberikan pelayanan yang luas, antara lain ; ³¹⁾

- 1) mewujudkan secara kongkret konsep desain produk ;
- 2) memberikan gagasan dan ide baru pada industri manufakturing;
- 3) mengembangkan inovasi dari produk yang sudah ada serta mengadakan penelitian, konsultasi dan klinik desain ;
- 4) merancang dan merumuskan ciri-ciri atau identitas suatu produk;
- 5) mengadakan riset semiotik untuk mendeteksi kecenderungan pasar, selera konsumen ;
- 6) merumuskan arah suatu desain, strategi pemasaran bersama para pakar disiplin lainnya.

Semua yang dapat dilakukan dalam kegiatan desain tersebut, pada dasarnya desainer menjalankan upaya untuk mendapatkan dan menerapkan pemahaman atas alam semesta guna memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia.

³¹⁾ Agus Sachari, *Paradigma Desain Indonesia, op.cit.*, 1986, hal 15.

Agus Sachari berpendapat, bahwa desainer harus ditopang oleh dimensi keilmuan, yaitu ; ³²⁾

- 1) wawasan teknologi, terutama teknologi mekanik, teknologi produksi, bahan dan wawasan ilmu-ilmu *engineering*, sehingga dengan demikian seorang desainer diharapkan mempunyai pemahaman ke arah sistem industri, bahan dan proses, manajemen dan keterampilan teknis yang memadai ;
- 2) wawasan fisika, metodologi riset, logika matematis, sehingga dengan demikian seorang pendesain diharapkan mempunyai pertanggungjawaban ilmiah yang tinggi serta mampu merumuskan persoalan yang dihadapi secara sistematis ;
- 3) wawasan seni, terutama seni rupa dengan harapan seorang pendesain akan mempunyai pemahaman estetik dan kreativitas yang tinggi ;
- 4) wawasan sosial budaya, terutama hukum, sosiologi, ekonomi, psikologi, komunikasi, anthropologi, dengan harapan membuka seorang pendesain ke arah wawasan budaya, sejarah, persoalan sosial dan permasalahan manusia lainnya ;
- 5) wawasan filsafat dan etika, terutama filsafat seni dan desain dengan harapan membangun pola berpikir mendalam yang dilandasi oleh sikap etis yang tinggi.

Dengan wawasan yang menyeluruh demikian pun, dalam menjalankan aktivitasnya desainer tetap dituntut mempunyai

³²⁾ *Ibid*, hal 16.

tanggung jawab sosial yang tinggi, mereka tidak boleh semata-mata mengejar keuntungan sesaat dengan mengorbankan masyarakat dan lingkungan hidup.

Dari cakupan desain industri yang sangat luas tersebut serta keterkaitannya dengan disiplin ilmu yang lainnya, maka ada beberapa pihak yang terkait dalam konsep desain industri, yaitu,³³⁾

- 1) desainer sebagai orang yang merancang ;
- 2) manufaktur yang membuat produk ;
- 3) pemakaian produk oleh konsumen ;
- 4) Lembaga Swadaya Masyarakat, terutama di bidang konsumen dan lingkungan hidup ;
- 5) pemerintah.

Keterkaitan di antara mereka merupakan suatu ketergantungan satu sama lain, mereka tidak bisa terpisahkan.

Desainer sebagai profesi mempunyai etika khusus yang berlaku pada kalangan sendiri. Salah satu etika yang harus dipegang oleh seorang desainer atau teamnya, yaitu bahwa team harus menghentikan proyek mereka bilamana dalam penyelidikan terdapat akibat-akibat sampingan yang tidak dikehendaki. Oleh karenanya bagi desainer dituntut harus menciptakan suatu desain yang bertanggung jawab, yaitu desain yang harmonis dengan lingkungan alam, artinya desain tersebut memenuhi kriteria berupa desain yang tidak bergantung pada sumber daya yang tidak dapat

³³⁾ *Ibid*, hal 17

diperbarui, bebas polusi dan secara ekologi tepat, juga memenuhi kriteria desain yang berlaku bagi semua orang dan pada setiap waktu.

Sebagai suatu profesi maka bidang desain memiliki norma-norma tertentu yang harus diikuti oleh orang-orang yang berkecimpung di bidang tersebut. Dunia desain tidak bebas dari hal-hal yang semestinya tidak dilakukan karena melawan etika desain yang bermoral, oleh karena itu proses desain harus mau dan ikhlas tunduk pada norma-norma moral dan etika. Seorang desainer harus mengikuti norma-norma proses mendesain yang baik, diantaranya norma berwawasan lingkungan, tidak mementingkan sifat dagang baik dari dirinya maupun pemberi tugas daripada tanggung jawab profesi.³⁴⁾

Pengakuan masyarakat terhadap desainer ada bila mereka dalam menjalankan profesinya selalu bertindak sesuai dengan norma-norma dan nilai moral yang hidup di masyarakatnya. Hal-hal yang dapat dijadikan untuk pedoman bagi mereka dalam menjalankan profesinya, yaitu bahwa kegiatan di bidang desain ;³⁵⁾

- a) menyangkut hubungan antar manusia maksudnya bahwa semua kegiatan di bidang desain tidak akan terlepas dari hubungan antar manusia baik sebagai yang membutuhkan hasil desain tersebut maupun yang memberikan pemuasan kebutuhan ;

³⁴⁾ Muhamad Djumhana, *op.cit.*, hal 22.

³⁵⁾ *Ibid*, hal 24.

- b) harus dapat mengikuti kemauan masyarakat (klien) maksudnya bahwa kebutuhan dan selera selalu maju melebihi alat pemenuhan kebutuhan, oleh karena itu di bidang desain harus pula dapat menjawab kebutuhan dan harapan masyarakat ;
- c) harus disertai kewajiban moral, maksudnya semua yang terlibat dalam kegiatan di bidang desain memiliki hak dan kewajiban masing-masing serta mempunyai tanggung jawab moral terhadap masyarakat ;
- d) harus mengingat keterbatasan sumber daya dan tetap menjaga lingkungan, maksudnya setiap individu yang berkecimpung dalam kegiatan desain harus bertanggung jawab untuk tidak sekedar mengeksploitasi sumber daya untuk kepentingan jangka pendek tetapi harus memeliharanya dalam jangka panjang demi kelangsungan hidup dan kelestarian lingkungan ;
- e) harus mampu menggali sumber daya yang ada untuk kesejahteraan masyarakat, maksudnya individu yang berkecimpung di dalam kegiatan desain harus dapat memberikan sumbangan yang berharga untuk masyarakat melalui karyanya.

Sehingga dengan demikian penghargaan masyarakat kepada sebuah profesi semuanya bermula dari gambaran moral dan akhlak dari para pelaku di bidang profesi tersebut, oleh karena itu mereka yang berkecimpung di bidang desain wajib memiliki komitmen untuk

menegakkan citra profesi mereka sebagai profesi yang baik dan luhur. Tanpa itu semua, maka citra profesi akan buruk di mata masyarakat atau klien, maka dengan demikian diharapkan semua pihak yang terkait dalam bidang desain dapat menjalankan profesinya sebagai profesi yang penuh dengan kehormatan.

Sedangkan kaidah-kaidah lain yang perlu disadari oleh mereka yang bergerak di bidang desain, yaitu hukum dan peraturan-peraturan yang terkait dengan hak atas kekayaan intelektual, pelayanan jasa desain dan hasil atau produk dari desain, tanggung jawab profesional, tradisi keilmuan dan profesi, mutu dan standar profesi, batas-batas kebebasan berekspresi, perkembangan ilmu-ilmu yang mendukung desain, penerapan teknologi dalam bidang desain, keterikatan pada organisasi profesi, serta pendidikan dan pelatihan keprofesian yang berkelanjutan.

B. Penerapan Desain Industri Pada Industri di Indonesia

B.1. Desain Industri Dalam Sistem Hukum Nasional

a. Sebelum Adanya Undang-Undang Desain Industri

Tradisi hukum asli Indonesia, kurang begitu mengenal perangkat hukum yang mengatur perlindungan hak atas kekayaan intelektual. Hal itu disebabkan karena akar hukum Indonesia yang bersifat *communal*, kegotongroyongan, sehingga tidak mengenal perlindungan karya intelektual yang mengedepankan sifat individual.

Semua terlihat dari beberapa pandangan pencipta/desainer yang tidak begitu memperdulikan bila karyanya ditiru/dijiplak orang lain, mereka justru merasa bangga dan tidak merasa dirugikan. Para pencipta/desainer tersebut berpandangan bahwa karya cipta merupakan karya batiniah yang universal dan dapat dinikmati siapapun, di manapun dan kapanpun juga.

Semenjak hukum barat diperkenalkan pada masa penjajahan Belanda, maka barulah bangsa Indonesia mengenal pada hukum di bidang hak atas kekayaan intelektual. Pada masa penjajahan perundang-undangan di bidang hak atas kekayaan intelektual diperkenalkan pada awal abad ke-20, yaitu dengan diundangkannya beberapa perundang-undangan di bidang hak atas kekayaan intelektual, yaitu *Octrooiwet Stbl* 1910, *Reglement Industriele Eigendom* (Reglemen Milik Perindustrian) *Stbl* 1912 Nomor 545 jo. *Stbl* 1910 Nomor 214 dan *Auteurswet Stbl* 1912 Nomor 600. Setelah Indonesia merdeka, maka pada tanggal 5 Agustus 1948 diratifikasi Konvensi Paris versi London, namun ratifikasi tersebut tidak ditindaklanjuti dengan dibuatnya perundang-undangan yang diperlukan mengenai hak atas kekayaan intelektual secara keseluruhan. Perundang-undangan tersebut dibutuhkan selain untuk memenuhi tuntutan telah diratifikasinya Konvensi Paris, tetapi juga untuk mengakomodasi perubahan yang terjadi baik yang bersifat positif dengan merdekanya negara Indonesia, juga

kebutuhan untuk memenuhi perkembangan di bidang perindustrian perdagangan serta ilmu pengetahuan dan teknologi yang mulai tumbuh.³⁶⁾

Semenjak kemerdekaan sampai tahun 1960, hanya satu undang-undang yang mampu dibuat, yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan, bahkan pada tahun 1958 Indonesia ke luar dari keikutsertaannya dalam Konvensi Berne. Namun dengan berjalannya waktu ditandai dengan begitu besarnya ketergantungan suatu negara terhadap karya intelektual bangsanya, serta tumbuhnya pandangan bahwa karya cipta merupakan anugerah Tuhan yang dapat dijadikan sebagai sumber penghidupan dan mempunyai nilai ekonomi, maka penghargaan terhadap perlunya perlindungan hukum atas suatu karya intelektual semakin mulai tumbuh .

Sebelum sistem hukum di Indonesia yang mengatur tentang desain industri terbentuk secara menyeluruh, maka desain industri hanya diatur dalam perundang-undangan yang tersebar. Salah satu di antaranya diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian. Dalam undang-undang tersebut desain industri hanya diatur dalam satu bab yang berisi beberapa pasal yang belum memadai, selain itu pengaturannya baru menyentuh permukaannya saja sehingga sistem hukum perlindungan desain industri masih belum memadai.

³⁶⁾ *Ibid*, hal 113.

Perlindungan desain industri untuk beberapa waktu diatur melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang Hak Cipta, hal ini disebabkan karena ruang lingkup desain industri yang sangat erat dengan hak cipta, sehingga desain industri sebagai karya cipta artistik. Desain industri tersirat dalam Pasal 11 Undang-Undang Hak Cipta, yaitu mengatur perlindungan untuk alat peraga yang dibuat untuk kepentingan ilmu pengetahuan, seni rupa (seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, seni terapan yang berupa seni kerajinan tangan), arsitektur, peta dan seni batik. Pasal tersebut secara garis besar memuat ;³⁷⁾

- a) kolase, yaitu komponen artistik yang dibuat dari berbagai bahan (misalnya kain, kertas, kayu) yang ditempelkan pada permukaan gambar ;
- b) seni terapan yang berupa kerajinan tangan, yaitu karya seni kerajinan tangan yang dapat dibuat dalam jumlah banyak, misalnya perhiasan atau asesoris, mebel, kertas hias atau ornamen untuk dinding dan desain pakaian ;
- c) seni batik, yaitu berupa batik bangunan dan miniatur atau maket bangunan.

³⁷⁾ Dina Widyaputri Kariodimejo, *Analisis Terhadap Potensi Kekayaan Intelektual Pada Lembaga Pendidikan Tinggi Dalam Menghadapi Otonomi Perguruan Tinggi*, Mimbar Hukum, 2001, hal 51.

b. Sesudah Adanya Undang-Undang Desain Industri

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian, istilah yang dipakai adalah desain produk industri, sedangkan istilah *industrial designs* atau *design* banyak digunakan oleh Uni Eropa, Korea, Jepang dan termuat dalam Pasal 25 dan Pasal 26 TRIP's. Alasan tersebut yang mendasari penyebutan nama Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 sebagai Undang-Undang Desain Industri (UUDI), karena dirasakan nama tersebut lebih tepat sebagai padanan kata *industrial design*, daripada menyebutkan dengan nama Undang-Undang tentang Produk Desain Industri. Dengan penamaan tersebut di harapkan akan memudahkan dalam melakukan sosialisasi kepada kalangan pengusaha dan pendesain, karena istilah desain industri dianggap tepat dan lebih dekat dengan kata asingnya, serta banyak digunakan dalam berbagi literatur.³⁸⁾

Definisi desain industri berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri Pasal 1 Angka 1, yaitu "desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk 3 (tiga) dimensi atau 2 (dua) dimensi yang memberikan kesan estetis dan diwujudkan dalam pola 3 (tiga) dimensi atau 2 (dua dimensi) serta dapat dipakai untuk

³⁸⁾ Insan Budi Maulana, *Kumpulan Perundang-Undangan di Bidang HAKI*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hal xvii.

menghasilkan produk, barang, komoditi industri atau kerajinan tangan".³⁹⁾ Dengan memperhatikan definisi tersebut, dapat disimpulkan adanya dua unsur utama dalam desain industri, yaitu bentuk dan kesan estetis, yang berarti dapat dilihat secara kasat mata.

Sebagai perbandingan, tercantum dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Desain Korea, memberikan definisi tentang desain, yaitu "*design means the shape, pattern or color or a combination of these in an article which produces an aesthetic impressions in the sense of sight*". Definisi ini diadaptasi dari definisi Undang-Undang Desain Jepang yang lebih dahulu diterapkan, sehingga memiliki persamaan. Dalam undang-Undang Desain Industri Indonesia, bentuk yang menghasilkan kesan estetis lebih ditonjolkan terhadap suatu desain industri. Sedangkan *Part III Design right, Chapter I Design right in original designs*, Pasal 213 ayat (2), *Copyright, Designs and Patents Act 1988* Inggris menyatakan bahwa, "*in this Part design means the design of any aspect of the shape or configuration (whether internal or external) of the whole or part of an Article*". Di Inggris menggarisbawahi suatu desain industri pada setiap aspek bentuk atau konfigurasi suatu barang. Untuk Australia, termuat dalam Pasal 4 *Design Act 1906* "*.....features of shape, configuration, pattern or ornamentation applicable to an article,*

³⁹⁾ Herdwiyatmi, *Perlindungan Hak Cipta dan Desain Industri di Indonesia*, Makalah Sentra HAKI Lemlit UGM, Yogyakarta, 2000, hal 16.

being features that, in the finished article, can be judged by the eye, but does not include a method or principle of construction".⁴⁰⁾

Indonesia dengan kekayaan alam dan keanekaragaman seni budaya, merupakan sumber kekayaan nasional dan asset bangsa yang sangat potensial untuk diolah dan dikembangkan, serta dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat Indonesia. Indonesia juga mempunyai pengusaha nasional kecil dan menengah yang tersebar di berbagai pulau jauh, dengan jumlah yang lebih banyak dibandingkan dengan jumlah pengusaha besar yang cenderung berbasis di pulau dan kota besar tertentu saja. Pemahaman hukum para pengusaha nasional terhadap hak atas kekayaan intelektual, khususnya desain industri masih relatif rendah. Penyusunan sistem hukum desain industri harus melihat dan mendasarkan pada realita yang hidup dalam masyarakat Indonesia dan tidak mendasarkan pada sistem hukum pada masyarakat industri maju.

Penerapan sistem hukum desain industri Indonesia tetap mendasarkan pada standar (minimal) yang tercantum dalam *TRIP's Agreement* dan tidak melanggar ketentuan-ketentuan konvensi internasional di bidang hak atas kekayaan intelektual yang telah diratifikasi, tetapi juga harus tetap menyandarkan pada nilai-nilai seni budaya dan realita hidup masyarakat Indonesia. Para pengusaha nasional kecil dan menengah, diharapkan mendasarkan

⁴⁰⁾ Insan Budi Maulana, *op.cit.*, hal xix.

pengembangan desain industrinya pada kekayaan alam dan keanekaragaman seni budaya, serta mampu memahami sistem hukum desain industri dengan sebaik-baiknya, maka *simbiosis-mutualisma* antara hukum (yang akan memberikan perlindungan terhadap pemilik/pemegang hak desain industri) dan pengembangan industri (adanya kreativitas dan inovasi yang mendalam dari para pengusaha nasional di bidang desain industri atas hasil-hasil produknya) akan dapat memberikan sumbangan bagi pertumbuhan ekonomi bangsa. ⁴¹⁾

Ketika masih dalam pembahasan rancangan Undang-Undang Desain Industri, masih dimusyawarahkan sistem perlindungan yang akan dimasukkan dalam Undang-Undang Desain Industri. Apakah sistem perlindungan tersebut didasarkan pada sistem *first to file* ataukah *first to use*, bisa juga kombinasi antara kedua sistem tersebut. Jika sistem *first to file* yang dipilih berarti hak desain industri diberikan kepada pendaftar pertama, artinya siapa saja yang mendaftar lebih dahulu maka ia yang berhak atas desain industri tersebut. Sedangkan jika sistem *first to use* yang dipilih, maka hak desain industri diberikan kepada pemakaian pertama dan sistem ini akan didasarkan pada siapakah pemakai pertama desain industri tersebut. Dengan memperhatikan Undang-Undang Desain Industri, maka Indonesia mengkombinasikan kedua sistem tersebut, artinya meskipun hak desain industri tersebut timbul karena

⁴¹⁾ *Ibid*, hal xx.

pendaftaran, tetapi hak tersebut dapat dibatalkan apabila terdapat pihak lain yang dapat membuktikan bahwa hak desain industri tersebut adalah miliknya.⁴²⁾ Kemudian asas yang diterapkan dalam Undang-Undang Desain Industri adalah asas itikad baik, artinya tidak ada hak bagi siapapun yang mendaftarkan desain industri apabila dilakukan dengan itikad buruk.

Definisi hak desain industri, termuat dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Desain Industri, adalah "hak eksklusif yang diberikan oleh Negara Republik Indonesia kepada pendesain atas hasil kreasinya, untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri kreasi tersebut, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya".⁴³⁾ Dari definisi tersebut ada beberapa elemen penting, yaitu hak diberikan oleh negara untuk jangka waktu tertentu dan hak tersebut dimiliki apabila diajukan pendaftaran, artinya hak tersebut tidak diberikan tanpa batas, melainkan terbatas dan setelah jangka waktu tersebut tidak ada lagi hak dan menjadi *public domain* (milik umum), sehingga setiap orang boleh menggunakan desain industri tersebut tanpa membayar royalti dan hak desain industri tersebut diberikan setelah didaftar. Jadi berbeda dengan hak cipta yang timbul seketika setelah ciptaannya itu

⁴²⁾ Indarto, *Implementasi Undang-Undang Tentang HAKI Berkaitan Dengan Keterbukaan Informasi Pasar Modal*, Newsletter No. 44/III/Maret/2001, hal 11.

⁴³⁾ Noegroho Amien Soetarto, *Penelitian Yang Berorientasi Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sentra HAKI, Lemlit UGM, Yogyakarta, 2000, hal 18.

diwujudkan dan hak itu tanpa harus didaftarkan pada Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual (Ditjen HAKI).

Dalam menentukan jangka waktu perlindungan desain industri, juga telah dipertimbangkan tentang siapakah yang akan banyak mendaftarkan desain industri tersebut. Karena jangka waktu perlindungan yang terlalu lama akan membawa konsekuensi hukum dan ekonomi, misalnya royalti dan biaya produksi serta laba yang diperoleh dari penggunaan desain tersebut. Jika desain tersebut akan banyak digunakan oleh para pengusaha lokal, sementara yang mendaftarkan banyak dilakukan oleh pihak asing, maka kewajiban membayar royalti akan semakin banyak, yang berarti pengurusan devisa. Jangka waktu perlindungan desain industri, diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Desain Industri, yaitu perlindungan terhadap hak desain industri untuk jangka waktu 10 tahun terhitung sejak tanggal penerimaan pendaftaran.⁴⁴⁾

Sebagai perbandingan dengan negara lain adalah Jepang dan Korea yang memberikan perlindungan selama 15 tahun sejak tanggal penerimaan pendaftaran, kemudian Australia memberikan perlindungan maksimal 16 tahun dengan membagi tahapan 6 tahun kemudian dapat diperpanjang 2 kali dengan masa perlindungan masing-masing 5 tahun. Sedangkan *TRIP's Agreement*

⁴⁴⁾ Herdwiyatmi, *op.cit.*, 2000, hal 18.

mensyaratkan bahwa jangka waktu perlindungan desain industri minimal 10 tahun.⁴⁵⁾

Desain industri yang memenuhi kriteria untuk dilindungi adalah hanya desain industri yang memiliki kebaruan saja yang dapat didaftarkan. Hal tersebut termuat dalam Pasal 2 Undang-Undang Desain Industri yang menyatakan bahwa, "hak desain industri diberikan untuk desain industri yang baru dan desain industri dianggap baru apabila pada tanggal penerimaan desain industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya". Jadi yang dimaksud dengan pengertian kebaruan adalah apabila desain industri tersebut belum pernah diumumkan, baik melalui pengumuman secara nyata atau telah pernah digunakan melalui cara apa pun sebelum tanggal permintaan atau sebelum tanggal prioritas apabila permintaan tersebut, diajukan dengan hak prioritas.⁴⁶⁾

TRIP'S Agreement mensyaratkan akan memberikan pilihan atau alternatif sistem desain industri yang dapat dipilih oleh negara-negara anggota, yaitu *new or original*. Bagi desain industri yang akan dilindungi. Pilihan tersebut diatur dalam Pasal 25 ayat 1 *TRIP's Ageerement* yang menyatakan "*members shall provide for*

⁴⁵⁾ Insan Budi Maulana, *op.cit*, 2001, hal xxii.

⁴⁶⁾ Maringan Lumbanradja, *Pemahaman Regulasi Desain Industri*, Makalah Pelatihan Konsultan HAKI, Klinik HAKI Undip, Semarang, 2002, hal 3.

the protection of independently created industrial designs that are new or original ".⁴⁷⁾

Perlindungan terhadap desain industri juga dapat dilakukan dengan melakukan pendekatan hak cipta (*copyright approach*) dan pendekatan paten (*patent aproch*). Dengan memilih persyaratan *new* atau *original* diharapkan akan dapat bermanfaat bagi kepentingan ekonomi Indonesia yang memiliki kekayaan alam dan keanekaragaman seni budaya yang pada dasarnya telah mendapat perlindungan hak cipta.⁴⁸⁾ Adanya alternatif persyaratan desain industri tersebut, maka dapat dikembangkan oleh para pengusaha nasional menjadi desain. Ada beberapa alasan mengapa Undang-Undang Desain Industri menerapkan sistem pemeriksaan tidak murni. Seperti halnya krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia sejak pertengahan tahun 1997 hingga saat ini belum berakhir. Hal ini jelas mengakibatkan Indonesia sangat bergantung pada bantuan luar negeri dan terjadi keterbatasan dana pemerintah dalam melaksanakan pertumbuhan ekonomi secara makro termasuk pula keterbatasan dana yang dialami oleh Ditjen HAKI.

Masalah lain adalah keterbatasan sumber daya manusia yang akan melakukan pengadministrasian desain industri apabila sistem desain industri menerapkan sistem pemeriksaan. Jika sistem

⁴⁷⁾ Paingot Rambe Manalu, *Hukum Dagang Internasional : Pengaruh Globalisasi Ekonomi Terhadap Hukum Nasional, Khususnya Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal 197.

⁴⁸⁾ Insan Budi Maulana, *op.cit.*, 2001, hal xxiii.

pemeriksaan yang dipilih, maka pemerintah harus menyiapkan prasarana dan sarana pembanding atau mengumpulkan bahan-bahan desain industri untuk digunakan sebagai pembanding dalam melakukan pemeriksaan substantif terhadap setiap permohonan pendaftaran. Selain itu juga harus mempersiapkan sumber daya manusia yang handal untuk menerapkan sistem pemeriksaan substantif yang akan memerlukan waktu yang tidak singkat. Alasan lain yang dapat diambil manfaatnya adalah pengalaman negara lain yang mengalami kesulitan ketika menerapkan sistem pemeriksaan substantif, misalnya Vietnam dan Korea Selatan.⁴⁹⁾

Bagi Indonesia yang penting adalah memberikan perlindungan desain industri yang memadai dan sesuai dengan *TRIP's Agreement* kepada siapapun yang mendaftarkannya pada Dirjen HAKI. Dalam UUDI, dinyatakan bahwa sistem desain industri tidak menerapkan pemeriksaan murni karena masih dimungkinkan pemeriksaan administratif atau formalitas yang memungkinkan permohonan tersebut ditolak, yaitu apabila permohonan desain industri bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama atau kesusilaan (Pasal 4 UUDI) dan juga pemeriksaan substantif atas permohonan desain industri apabila terjadi oposisi atau keberatan yang dilakukan oleh pihak

⁴⁹⁾ *Ibid*, hal xxiv.

ketiga.⁵⁰⁾ Faktor lain yang menjadi alasan memilih sistem pemeriksaan tidak murni adalah agar dapat mempercepat pendaftaran desain industri tersebut.

UUDI telah mencantumkan tahapan-tahapan yang dapat dilalui untuk setiap permohonan sehingga diterapkan dalam jangka waktu 6 bulan akan dapat diketahui dan diberikan Sertifikat Desain Industri bagi setiap permohonan apabila permohonan telah memenuhi persyaratan permohonan dan tidak mengalami keberatan atau oposisi dari pihak ketiga. Jika permohonan pendaftaran mengalami oposisi, maka jangka waktu untuk memproses permohonan itu akan lebih 6 bulan, namun diharapkan akan dapat diputus dalam jangka waktu sekitar 16 bulan. Jangka waktu tersebut harus disadari dan dilaksanakan efektif oleh aparat Ditjen HAKI yang bertanggung jawab memproses pendaftaran desain industri, karena jangka perlindungan desain industri yang terbatas.

B.2. Peran Desain Industri Pada Umumnya

Peran desain industri di Indonesia, merupakan bahasan yang menyoroti bagaimana kondisi atau keadaan desain industri pada umumnya di Indonesia dan desain industri batik pada khususnya. Di sini dapat dilihat bagaimana pengaruh desain dan bagaimana

⁵⁰⁾ Ori Timbul Hartonegoro, *Praktek Pembinaan dan Pengembangan Desain Industri Bagi Pengusaha Kecil dan menengah di Propinsi Jawa Tengah*, Makalah Seminar Nasional Perlindungan Desain Industri Sebagai Salah Satu Aset Perusahaan, Semarang, 2001, hal 3.

pandangan serta penghargaan masyarakat terhadap desain di Indonesia. Kehidupan masyarakat Indonesia banyak dipengaruhi oleh desain, baik dalam bentuk pengaruh yang baik maupun pengaruh yang buruk. Pengaruh yang baik membawa peningkatan kehidupan manusia menuju kesejahteraan, sebaliknya pengaruh yang tidak baik mengakibatkan pengikisan tata kehidupan manusia menuju kehancuran, pengaruh demikian terentang pula oleh waktu dan peradaban.

Sebaliknya desain dipengaruhi pula oleh kehidupan dan perkembangan arah kehidupan masyarakat. Hasil karya suatu desain seharusnya mengandung nilai-nilai ideal, antara lain menciptakan lingkungan hidup manusia yang lebih baik, berperan dalam menciptakan satu kondisi sosial suatu masyarakat yang harmonis. Nilai-nilai ideal tersebut tidaklah pasti atau absolut melainkan berubah-ubah dan tergantung pada situasi dan kondisi negara tersebut. Sehingga kemudian muncul pengaruh buruk seperti halnya pencemaran lingkungan oleh limbah dan produk industri. Alangkah baiknya apabila hasil karya desain industri diisi dengan unsur-unsur nilai kemanusiaan dan memberikan manfaat besar bagi manusia, serta bersahabat dengan lingkungan, juga tidak berakibat buruk bagi kesehatan pemakai produk tersebut.

a. Pengaruh Desain pada Masyarakat Indonesia

Masyarakat Indonesia terutama masyarakat golongan menengah ke atas, sangat banyak terpengaruh oleh gencarnya perkembangan desain industri. Desain industri seolah telah dijadikan simbolisasi status sosial dengan mengkonsumsi produk dari hasil desainer luar negeri. Ironisnya banyak figur masyarakat atau pun tokoh yang menjadi panutan, justru giat pula berlomba-lomba meningkatkan simbol status sosial mereka, dengan mengkonsumsi secara berlebihan produk asing. Padahal dalam era perdagangan bebas nanti, akan diberikan kebebasan seluas-luasnya produk asing untuk masuk ke Indonesia. Hal ini jelas membuat produk dalam negeri akan kehilangan pasar di negaranya sendiri, apalagi ketika produk asing yang sejenis dijual dengan harga jauh lebih murah dan berkualitas daripada produk dalam negeri. Tentu saja apa yang dicanangkan pemerintah tentang pengembangan usaha kecil dan menengah, perlindungan terhadap HAKI pada umumnya dan desain industri pada khususnya untuk melindungi pengusaha nasional, akan segera menjadi slogan kosong.

Kondisi demikian harus segera diantisipasi dengan segala daya upaya untuk menumbuhkembangkan tradisi dan budaya berkreasi dan mencipta, sehingga tumbuh menjadi kreator dan produsen yang kreatif serta handal. Sebaliknya masyarakat dari

segala lapisan perlu diberikan pengertian jangan sampai bangsa Indonesia hanya sebagai konsumen dan pengusaha nasional hanya sebagai penonton saja. Dengan ditumbuh-kembangkannya tradisi demikian juga disertai dengan gerakan untuk menghargai produk bangsa sendiri, dan diberikan contoh secara nyata pada gaya hidup figur masyarakat, tokoh yang menjadi panutan masyarakat dan tentu saja pemerintah.

Dalam rangka menumbuh-kembangkan budaya mencipta dan produktif tersebut maka penemuan-penemuan baru perlu didorong dan dilindungi hukum, agar dapat timbul rentetan penemuan yang berkelanjutan sebagai pendorong dalam pembangunan. Hal itu semua dilakukan untuk mendorong pada terciptanya iklim berusaha dan berkarya yang dapat menghasilkan produk dengan mutu yang baik dan harga yang terjangkau. Langkah di atas perlu didukung dengan standarisasi produk dan pengawasan mutu, hal ini cukup penting karena keduanya kegiatan yang tidak boleh diabaikan sesuai dengan tuntutan konsumen. Selain itu juga perlu diperhatikan pola kebutuhan, jenis produk, pola produksi, perkembangan internasional, dinamika pasar, kondisi moneter, perubahan budaya dan penemuan-penemuan baru dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.

b. Penghargaan Masyarakat Indonesia pada Suatu Desain

Penghargaan masyarakat Indonesia terhadap desain industri, terdiri dari penghargaan terhadap hasil dari desain industri itu sendiri dan penghargaan terhadap perangkat hukum yang mengatur ketentuan desain industri. Kehidupan desain industri di Indonesia masih menghadapi permasalahan yang kompleks, masyarakat Indonesia juga masih kurang menghargai terhadap desain industri lokal, hal ini bisa terlihat antara lain dari belum banyaknya lembaga pendidikan formal di bidang desain industri.

Penghargaan masyarakat Indonesia terhadap desainer lokal juga masih rendah, sehingga perkembangan desain industri lokal tidak begitu pesat, sebagai contoh banyak hasil penelitian dari perguruan tinggi dan lembaga-lembaga penelitian, maupun penemuan atau hasil kreasi desainer lokal yang tidak dikembangkan lebih jauh karena tidak adanya dukungan dari kalangan industri.

Sebaliknya bila ada semangat dari kalangan pengusaha nasional tertentu untuk mengembangkan desain industri hasil karya desainer lokal, tetapi yang diharapkan justru tidak ada, sehingga mereka kembali bergantung pada hasil karya bangsa asing. Kondisi yang sangat bertolak belakang menyebabkan terjadi kepincangan dalam gerak industrialisasi, sebab perkembangan industri dan teknologi tidak didukung sepenuhnya dengan karya desain industri yang baik dan handal dari hasil desainer lokal. Hal ini

mengakibatkan produk industri maupun hasil kerajinan lokal Indonesia kalah dalam persaingan dagang di pasar internasional, bahkan sekarang untuk terus bertahan di dalam negeri juga sudah sangat sulit.

Gambaran diatas menunjukkan bahwa desain industri mempunyai peran untuk keberhasilan dalam persaingan merebut pasar, namun Indonesia belum terlalu serius untuk menghargainya. Dalam perdagangan bebas nanti akan sangat dibutuhkan para desainer lokal yang handal dan kreatif, serta penghargaan yang memadai dari masyarakat kepada bidang desain sendiri, sehingga mereka mampu memberikan dukungan kepada perkembangan industri agar lebih pesat kemajuannya. Salah satu pendukung perkembangan industri adalah majunya desain industrinya, hal ini berdasarkan pengalaman dari Jepang, Korea, Taiwan dan negara industri lainnya, mereka maju karena tidak hanya mengandalkan sumber daya alamnya melainkan dengan mengandalkan kepada sumber daya manusia, serta mempunyai apresiasi yang tinggi kepada desain.

Penghargaan terhadap desain di Indonesia masih sangat memprihatinkan, apalagi dalam hal pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat dalam bidang desain. Masyarakat Indonesia kurang memahami dan mengetahui dengan baik bidang ketentuan dan peraturan perundang-undangan di bidang desain, hal dapat

terlihat dari kesadaran hukum masyarakat yang secara umum masyarakat memang tidak memahami dan mengetahui dengan baik mengenai hak atas kekayaan intelektual di bidang desain industri. Kondisi demikian tidak hanya menimpa masyarakat awam yang tidak berkecimpung di bidang desain, tetapi juga menimpa kalangan masyarakat desainer itu sendiri, bahkan aparat pemerintah yang bertugas untuk menegakkan hukum pun masih banyak yang tidak memahami.

Para desainer banyak yang kurang memahami atau mengetahui secara tepat, bahwa mereka memiliki hak atas karyanya yang disebut hak atas kekayaan intelektual di bidang desain industri. Ketidaktahuan dan ketidakpahaman mereka begitu besar sehingga mereka tidak tahu dan tidak paham mengenai kapan serta bagaimana harus menegakkan dan mempertahankan haknya. Keadaan demikian sangat potensial menyebabkan kerugian bagi Indonesia, sebagai contoh ada kabar bahwa saat ini sejumlah desain batik Indonesia telah didaftarkan pihak asing, antara lain para desainer dari Jerman, Inggris dan Jepang, sehingga menyebabkan setiap batik Indonesia yang mempunyai desain seperti yang didaftarkan tidak bisa lagi diekspor ke negara-negara tersebut karena dianggap sebagai barang ilegal.

Dan terdapat pula kisah yang cukup ironis, dimana untuk terus menjaga kelangsungan usaha batiknya, para pengerajin batik

tradisional di Jogjakarta memberikan kursus kilat kepada para wisatawan dengan hanya bertukar dengan beberapa lembar rupiah, padahal desain mereka tidak terlindungi. Hal ini tentu saja tidak dapat terus dibiarkan, tetapi pemerintah harus memberikan perhatian secara khusus dan nyata, sehingga bangsa negara ini tidak terus menerus dirugikan oleh pihak asing dan bangsa negara ini tidak kehilangan identitas seni budaya nasional.

C. Perlindungan Hukum Desain Industri Pada Desain Lokal

C.1. Perlindungan Hukum di Bidang Desain Industri

Hak desain dan desain yang didaftarkan pada dasarnya merupakan perlindungan hukum bagi desainer atas ciptaannya atau desainnya, yang diberikan untuk jangka waktu tertentu. Sesuai dengan prinsip-prinsip hak atas kekayaan intelektual yang bersifat eksklusif, maka perlindungan hukum di bidang desain pun demikian, yaitu melarang pihak lain untuk melaksanakan atau melakukan tindakan lainnya yang bersifat mengambil manfaat desain tersebut.⁵¹⁾ Adapun bagian dari bidang desain yang telah mendapat kerangka hukum sendiri, yaitu desain industri.

Di dalam ketentuan Konvensi Paris, desain industri merupakan bagian dari hak milik perindustrian sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Ayat 2 revisi Stockholm 1967 dan perubahannya tanggal 28 September 1979, bahwa " *The protection of industrial property has as its object*

⁵¹⁾ Indarto, *loc.cit.*

*patents, utility models, industrial design, trademarks, services marks, trade names, indication of source or appellation of origin and the repression of unfair competition ".*⁵²⁾

Dari pengertian ruang lingkup perlindungan hukum perindustrian diatas, selanjutnya diterangkan bahwa milik perindustrian itu juga mempunyai ruang lingkup yang tidak terbatas pada bidang perindustrian dan perdagangan saja, melainkan juga menyangkut bidang industri pertanian, pertambangan dan barang hasil pabrik seperti halnya anggur, beras, daun tembakau, buah-buahan, ternak, mineral, minuman bir, bunga, tepung dan sebagainya (Pasal 1 Ayat 3 Konvensi Paris revisi Stockholm 1967) dan perubahannya tanggal 28 September 1979.

Cakupan perlindungan hak milik perindustrian yang luas tersebut sangat mendukung perlindungan bidang desain yang juga begitu luas ruang lingkupnya. Desain mempunyai pengertian sebagai suatu gagasan awal, rancangan, perencanaan, pola, susunan, rencana, proyek, hasil pemikiran yang tepat dengan maksud tertentu dan jelas. Oleh karena itu, desain mencakup bidang yang luas, meliputi desain industri, tekstil, interior, grafis, arsitektur, desain rekayasa, serta desain kota, semuanya dibuat dalam rangka pemenuhan kebutuhan manusia. Luasnya cakupan desain industri, menyebabkan sering bersinggungan

⁵²⁾ Sudargo Gautama, *Hak Atas Kekayaan Intelektual Peraturan Baru Desain Industri*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal 265.

dengan perlindungan dalam kerangka hak cipta ataupun perlindungan hak atas kekayaan intelektual lainnya.⁵³⁾

a. Bentuk-Bentuk Perlindungan Desain Industri

1). Object Perlindungan Hukum Desain Industri

Perundang-undangan yang dimaksudkan untuk melindungi desain, pada dasarnya meliputi perlindungan terhadap desain yang didaftarkan (*registered designs*) dan hak desain (*design right*) yang tidak perlu didaftarkan. Desain yang didaftarkan mengandung ciri-ciri khusus dari benda tersebut secara jelas terlihat mata, sedangkan hak desain untuk melindungi satu segi dari bentuk dan konfigurasi dari barang-barang tanpa syarat penampakan visual. Dengan tipisnya perbedaan apabila dilihat dari object perlindungan, sehingga cukup sulit ditarik perbedaan diantara dua object perlindungan tersebut, bahkan terkadang terjadi adanya tumpang tindih dengan hak cipta.

Object pengaturan perlindungan hukum di bidang desain, yaitu karya-karya berupa produk yang dasarnya merupakan *pattern*, yang digunakan untuk membuat atau memproduksi barang secara berulang.⁵⁴⁾ Elemen terakhir ini yang sebenarnya merupakan ciri dan menjadi kunci. Apabila ciri ini hilang, maka

⁵³⁾ Muhamad Djumhana, *op.cit.*, hal 38.

⁵⁴⁾ Supanto, *op.cit.*, hal 6.

konsepsi mengenai perlindungan hukumnya akan lebih tepat dikualifikasikan sebagai hak cipta.

2). Pemilik atau Pemegang Hak Desain Industri

Desainer merupakan subject hukum, baik secara perorangan atau dalam ikatan kelompok yang menghasilkan atau melahirkan suatu karya desain yang bersifat khas dan dijadikan suatu *pattern* dalam kegiatan produksi pada industri.⁵⁵⁾ Adapun pemegang desain adalah desainer sebagai pemilik desain atau orang yang menerima hak atas desain tersebut dari desainer, atau orang lain yang menerima lebih lanjut hak termaksud dari orang-orang yang terlebih dahulu.

Dalam kondisi yang umum desainer melakukan kegiatannya secara mandiri tidak terikat dalam hubungan hukum dengan pihak lain, misalnya dalam ikatan kerja atau perburuhan. Apabila demikian maka secara mudah ditentukan pihak yang menjadi pemegang hak dan sekaligus pemilik hak atas desain tersebut, yaitu desainer itu sendiri. Namun demikian dalam hal desainer menjalankan kegiatannya terikat dalam hubungan hukum dengan pihak lain, maka ada beberapa ketentuan tertentu mengenai siapakah yang menjadi subject hukum untuk memiliki hak atas desain tersebut, yaitu;⁵⁶⁾

⁵⁵⁾ Patrick Keyzer, *Design*, Yuridika, No. 3 & 4 Tahun XIII, Mei – Agustus, 1998, hal 14.

⁵⁶⁾ Muhammad Djumhana, *op.cit.*, hal 44.

- a) jika suatu desain dibuat dalam hubungan dinas atau hubungan kerja, maka pihak yang berhak memperoleh hak desain atau desain adalah pihak yang memberikan pekerjaan tersebut, kecuali ada perjanjian lain antara desainer dengan pihak tempatnya bekerja. Meskipun secara prinsip yang memiliki desain atau hak desain itu pihak yang memberikan pekerjaan, namun demikian desainnya berhak memperoleh imbalan yang layak dengan memperhatikan manfaat ekonomi yang dapat diperoleh dari hasil desain tersebut ;
- b) jika suatu desain dibuat berdasarkan pesanan, maka pihak yang membuat desain itu sebagai desainernya dan sebaliknya pemilik desain tersebut adalah pemesannya, kecuali apabila diperjanjikan lain antara kedua pihak tersebut;
- c) desain yang dihasilkan baik oleh karyawan maupun pekerja yang menggunakan data dan sarana yang tersedia dalam pekerjaannya, maka pemilik desain tersebut adalah pihak tempatnya karyawan atau pekerja tersebut bekerja, sekalipun perjanjian kerja itu tidak mengharuskan menghasilkan desain.

Dengan kondisi seperti diatas desainer meskipun tidak mempunyai hak atas desain tersebut, tetapi desainer tersebut tetap berhak mendapat imbalan/kompensasi karena adanya nilai dan manfaat ekonomi yang diperoleh dari desain tersebut,

sehingga wajar apabila desainer tersebut juga memperoleh kesempatan untuk ikut menikmati manfaat ekonomi tersebut. Selain itu pula desainer berhak atas pencantuman namanya pada segala sesuatu yang berkaitan dengan pemanfaatan desain maupun administrasi pendaftaran desain tersebut. Hak pencantuman nama desainer merupakan konsekuensi dari hak moral (*moral right*).

Pemegang atau pemilik hak atas desain memiliki hak khusus untuk melaksanakan miliknya, seperti tercantum dalam Pasal 26 Ayat 1 TRIPs, yaitu “ *The owner of protected industrial design shall have the right to prevent third parties not having the owner's consent from making, selling or importing articles bearing or embodying a design which is a copy, or substantially a copy, of the protected design, when such acts are undertaken for commercial purposes* “. Pada dasarnya ketentuan tersebut adalah melarang orang lain yang tanpa persetujuannya, untuk membuat, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, memakai, menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan hasil produksi dari desain yang dilindungi (didaftarkan atau hak desain).⁵⁷⁾

Hal-hal yang dilindungi dari seorang desainer atau pemilik atau pemegang hak desain di atas merupakan suatu pendorong

⁵⁷⁾ Biro Hukum dan Organisasi Disperindagkop, Terjemahan Resmi *Persetujuan Akhir Putaran Uruguay*, Disperindagkop, Jakarta, 1996, hal 419.

untuk terjadinya penciptaan desain-desain baru, dimaksudkan agar kemudian timbul rentetan yang memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat.

3). Jangka Waktu Perlindungan Desain Industri

Dalam konsepsi mengenai hak atas kekayaan intelektual, perlindungan terhadap hak tersebut ditentukan jangka waktu perlindungannya. Adapun tanggal mulai dan berakhirnya jangka waktu perlindungan termaksud dalam konsepsi pendaftaran hak atas kekayaan intelektual biasanya akan dicatat dalam Daftar Umum Desain Industri dan diumumkan dalam Berita Resmi Desain Industri. Adanya kepentingan untuk pendaftaran desain merupakan kepentingan hukum pemilik hak desain tersebut untuk memudahkan pembuktian dan perlindungannya, meskipun pada prinsipnya perlindungan tersebut akan diberikan semenjak timbulnya hak desain tersebut, di mana kelahiran hak tersebut, dimana kelahiran hak tersebut ada sekaligus bersamaan pada saat suatu desain tersebut terwujud secara nyata dari seorang desainer. Namun demikian perlindungan terhadap desain baru secara kongkret apabila telah terdaftar pada Ditjen HAKI.⁵⁸⁾

Perlindungan atas hak desain atau desain memiliki jangka waktu terbatas yang ditentukan oleh undang-undang, menurut

⁵⁸⁾ W. Simanjuntak, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Dalam RUU Desain Industri*, Newsletter No. 43/XI?Desember/2000, hal 17.

Pasal 26 Ayat 3 Perjanjian TRIP's, disebutkan "*The duration of protection available shall amount to least 10 years*", artinya jangka minimal perlindungan 10 tahun. Jangka waktu perlindungan diberikan secara limitatif dengan waktu tertentu yang dihitung, misalnya dari sejak tanggal *filling date*, namun demikian kadang-kadang jangka waktu tersebut dapat diperpanjang dengan pengajuan (*renawal of registration*).⁵⁹⁾

Pemberian kesempatan untuk perpanjangan demikian dengan pertimbangan bila desain tersebut saat diaplikasikan dalam kegiatan produk belum memberikan pengembalian biaya yang sudah dikeluarkan sewaktu penelitian sampai lahirnya desain baru tersebut. Alasan demikian harus dapat dibuktikan oleh pemohon, perpanjangan demikian dapat dipahami karena kegiatan penelitian tersebut biasanya memerlukan pengorbanan tenaga, waktu dan biaya yang cukup besar.

Konsepsi perlindungan hukum atas desain yang demikian menggambarkan bahwa perlindungan hukum tidak secara otomatis berjalan, tidak bersifat diam-diam karena harus adanya pengajuan permohonan perpanjangan secara tegas. Dengan demikian apabila tidak diajukan permohonan perpanjangan, dengan sendirinya menurut hukum, perlindungan hukumnya

⁵⁹⁾ The Legal Texts, *The Results of The Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations*, GATT Secretariat, 1994, hal 379.

gugur, maka hilang pula hak eksklusif yang melekat pada desain yang bersangkutan.

Permohonan perpanjangan dapat dilakukan bila desain tersebut masih digunakan, juga masih diproduksi dan diperdagangkan. Dalam jangka waktu perlindungan tersebut, pemegang atau pemilik desain biasanya diwajibkan memenuhi antara lain, melaksanakan desainnya yang telah terdaftar, membayar biaya pada Ditjen HAKI dan harus menghindari penyalahgunaan hak yang dimilikinya. Kewajiban demikian apabila tidak dipenuhi oleh desainer atau pemilik atau pemegang hak desain tersebut mempunyai konsekuensi tertentu berupa pengenaan sanksi. Sanksi yang sering dikenakan, antara lain apabila selama beberapa tahun tidak ditaatinya kewajiban pembayaran biaya tahunan, yaitu berupa pendaftaran desain tersebut dinyatakan batal demi hukum sejak tidak dipenuhinya kewajiban tersebut.

b. Perlindungan Dengan Lembaga Pendaftaran

1). Prinsip Perlindungan Sama (*National Treatment*)

Prinsip *national treatment* atau prinsip asimilasi merupakan salah satu ketentuan pokok dalam Konvensi Paris, yang berarti adanya perlakuan yang sama untuk setiap orang dari negara peserta Konvensi Paris, sebagaimana mereka

memperlakukan warga negaranya sendiri.⁶⁰⁾ Prinsip ini disebut pula prinsip timbal balik (*resiprositas*), prinsip tersebut bukan hanya berlaku untuk warga negara perorangan, melainkan juga berlaku untuk badan hukum.

Ketentuan ini diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Konvensi Paris versi Stockholm 1967 dan perubahannya tanggal 29 September 1979 " *National of any country of the Union shall, as regards the protection of industrial property, enjoy in all the other countries of the Union the advantage that their respective laws now grant, or may hereafter grant, to nationals, all without prejudice to the rights specially provided for any this Convention. Consequently, the shall have the same protection as the latter, an the same legal remedy against any infringement of their right, provided that the conditions and formalities imposed upon nationals are complied with* ". Dikatakan bahwa perlakuan yang sama juga harus diberikan kepada warga negara dari negara bukan anggota Konvensi Paris, jika mereka bertempat tinggal di negara anggota Konvensi Paris atau jika mereka memiliki industri dan perdagangan yang nyata dan efektif di negara tersebut.⁶¹⁾

Ketentuan asimilasi ini menunjukkan adanya perlindungan hak bagi orang asing dan mereka tidak boleh dibedakan dalam

⁶⁰⁾ Ida Bagus Wyasa Putra, *Aspek-Aspek Hukum Perdata Internasional Dalam Transaksi Bisnis Internasional*, Refika Aditama, Denpasar, 1997, hal 50.

⁶¹⁾ Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata, *op.cit.*, hal 266.

segala hal yang menyangkut perlindungan hak atas kekayaan intelektual. Dengan demikian ketentuan tersebut dimaksudkan untuk mencegah kemungkinan adanya diskriminasi bagi warga negara asing dari suatu negara yang ikut dalam Konvensi Paris. Namun demikian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (3) Konvensi Paris versi Stockholm 1967 ada perkecualiannya, yaitu yang berkaitan dengan prosedur yang berhubungan dengan pengadilan administratif, yurisdiksi dan mengenai penguasaan diatur secara tersendiri, “ *The provisions of the laws of each of the countries of the Union relating to judicial and administrative procedure and to jurisdiction, and to the designation of an address for service or the appointment of an agent, which may be required by laws on industrial property are expressly reserve* “. Sebagai contoh pelaksanaan dari ketentuan tersebut antara lain keharusan bagi warga negara asing untuk menunjuk agen sebagai kuasa hukumnya untuk melaksanakan pendaftaran.⁶²⁾

Adapun prinsip asimilasi ini mempengaruhi jangkauan perlindungan hukum atas sesuatu hak atas kekayaan intelektual. Di bidang desain jangkauan yang diharapkan meliputi ;

a) semua hasil desain warga negara, penduduk dan badan hukum Indonesia, juga yang bukan warga negara, bukan

⁶²⁾ Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata, *loc.cit.*

penduduk dan bukan badan hukum Indonesia tetapi didaftarkan di Indonesia ;

- b) semua hasil desain warga negara, penduduk dan badan hukum yang negaranya mempunyai perjanjian bilateral mengenai perlindungan hak atas kekayaan intelektual dengan Indonesia atau pula negaranya dan negara Indonesia merupakan peserta dalam suatu perjanjian multilateral yang sama mengenai perlindungan hak atas kekayaan intelektual umumnya dan perlindungan hukum di bidang desain industri pada khususnya.

Kategori di atas diharapkan mendapatkan perlindungan hukum yang sama.

2). Hak Prioritas

Hak Prioritas (*droit de priorite*) merupakan salah satu prinsip dalam Konvensi Paris. Dalam mekanisme sistem pendaftaran desain, Hak Prioritas bahwa setiap orang yang telah mengajukan aplikasi pendaftaran di salah satu negara peserta Konvensi Paris akan memperoleh prioritas untuk mengajukan pendaftaran di negara peserta lainnya dalam jangka waktu tertentu dan dapat mengklaim agar permohonannya di negara-negara lain tersebut seolah-olah dilakukan pada tanggal pengajuan yang pertama kali sebagaimana diatur dalam

ketentuan Pasal 4 section A ayat (1) Konvensi Paris versi Stockholm 1967 dan perubahannya tanggal 28 September 1979, " *Any person who has duly filed an application for a patent, or for the registration of a utility model, or of an industrial design, or of a trademark, in one of the countries of the Union, or his successor in title shall enjoy, for the purpose of filing in other countries, a right of priority during the periods hereinafter fixed*".⁶³⁾

Adapun mengenai jangka waktu berlakunya Hak Prioritas tersebut, yaitu selama 6 bulan dihitung sejak tanggal aplikasi pendaftaran (*filing date*) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 4 section C ayat (1), (2) dan (3) Konvensi Paris versi Stockholm tahun 1967 ;⁶⁴⁾

- a) " *The periods of priority referred to above shall be twelve months for patent and utility models, and six months for industrial design and trademarks* " ;
- b) " *These periods shall start from date of filing of the first application, the day of filing shall not be included in the period* " ;
- c) " *If the last day of period is on official holiday, or a day when the office is not open for the filing of applications*

⁶³⁾ Sudargo Gautama dan Rizamanto Winata, *loc.cit.*

⁶⁴⁾ *Ibid*, hal 267.

in the country where protection is claimed, the period shall be extended until the first following working day".

Dengan ketentuan tersebut, maka permohonan pendaftaran desain atau hak desain dengan hak prioritas adalah permohonan yang diajukan ke salah satu negara peserta Konvensi Paris, misalnya Indonesia, dapat mengklaim bahwa pengajuan permohonan desain atau hak desain yang bersangkutan seolah-olah telah diajukan pada saat yang sama dengan permohonan desain atau hak desain yang sama di negara lain yang tergabung dalam keanggotaan Konvensi Paris.

c. Pengelolaan Administrasi Hak Desain Industri

1). Sistem Pendaftaran Desain Industri

Hak desain industri mendapat perlindungan, karena permintaan pendaftaran seseorang pemilik hak atau pemegang hak desain yang bersangkutan. Negara memberikan perlindungan hak desain atas suatu hasil karya perancangan produk tertentu setelah menguji bentuk nyata dari rancangan tersebut, apakah patut untuk diberikan pengakuan atas desain tersebut, apakah rancangan tersebut mempunyai nilai kemanfaatan dalam industri, apakah hakekat dari rancangan tersebut bersifat baru. Selain itu pula apakah desain tersebut telah memenuhi syarat-syarat baik formal maupun materiil.

Ian Morris Barry Quest, menguraikan secara singkat mengenai sistem pendaftaran di beberapa negara Eropa.⁶⁵⁾ Seperti halnya sistem pendaftaran di Jerman, dimana pendaftaran desain mempunyai beberapa kesamaan dalam perlindungannya dengan hak cipta untuk bidang artistik, terlepas dari penggunaan barang tersebut. Pendaftaran ini pun tidak memberikan hak monopoli, jadi perlindungan tersebut hanya efektif untuk menangkal peniruan atau penggadaan. Kemudian sistem pendaftaran di Inggris, menentukan bahwa satu permintaan untuk satu desain, perlindungan yang diberikan di Inggris hanya pada *aesthetic designs* tetapi tidak untuk *functional design*. Di negara Benelux (Belgia, Nederland dan Luxemburg) yang mempunyai satu kesatuan sistem pendaftaran yang terpadu, maka satu pendaftaran bisa mencakup perlindungan di tiga negara tersebut dan satu aplikasi pendaftaran bisa untuk beberapa desain, hal ini juga berlaku pada sejumlah kecil negara yang melibatkan pada perjanjian Den Haag mengenai *International Deposit Designs*. Sedangkan di Australia dan negara Scandinavia, perlindungan diberikan pada *aesthetic designs* dan *functional designs*. Di Amerika Serikat, perlindungan desain melalui apa yang disebut *design patent*.

⁶⁵⁾ Djubaedillah dan Muhamad Djumhana, *op.cit.*, hal 212.

2). Prosedur Pendaftaran Desain Industri

Agar hak desain industri dapat diperoleh, maka pemegang hak wajib mengajukan permohonan pendaftaran secara tertulis dalam bahasa Indonesia Kepada Ditjen HAKI dengan membayar biaya. Permohonan tersebut ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya, yang harus memuat ; ⁶⁶⁾

- a) tanggal, bulan dan tahun surat permohonan ;
- b) nama dan kewarganegaraan pendesain ;
- c) nama dan alamat lengkap kuasa apabila permohonan diajukan melalui kuasa ;
- d) nama negara dan tanggal penerimaan permohonan yang pertama kali, dalam hal permohonan diajukan dengan hak prioritas (Pasal 11 ayat (1), ayat (2), ayat (3) UUDI).

Permohonan pendaftaran desain industri harus dilampiri dengan;

- a) contoh fisik atau gambar atau foto dan uraian dari desain industri yang dimohonkan pendaftarannya ;
- b) surat kuasa khusus dalam hal permohonan diajukan melalui kuasa ;
- c) surat pernyataan bahwa desain industri yang dimohonkan pendaftarannya adalah miliknya.

Apabila permohonan diajukan secara bersama-sama oleh lebih dari satu pemohon, permohonan tersebut ditandatangani

⁶⁶⁾ Abdulkadir Muhammad, *op.cit.*, hal 273

oleh satu pemohon dengan melampirkan persetujuan tertulis dari pemohon lainnya. Apabila permohonan diajukan oleh bukan pendesain, permohonan harus disertai pernyataan yang dilengkapi dengan bukti yang cukup bahwa pemohon berhak atas desain industri yang bersangkutan (Pasal 11 ayat (4), ayat (5), ayat (6) UUD). Setiap permohonan hanya dapat diajukan untuk satu desain industri atau beberapa desain industri yang merupakan satu kesatuan desain industri atau memiliki kelas yang sama (Pasal 13 UUD). Yang dimaksud dengan satu desain industri adalah satu desain industri.

Pemohon yang bertempat tinggal di luar wilayah Indonesia harus mengajukan permohonan melalui kuasa. Pemohon tersebut adalah konsultan terdaftar di Ditjen HAKI. Pemohon tersebut harus memilih domisi hukumnya di Indonesia (Pasal 14 UUD). Domisi hukum yang dipilih itu biasanya adalah domisi konsultan sebagai kuasanya yang ditunjuk untuk mengurus pendaftaran desain industri miliknya.⁶⁷⁾ Secara umum berdasarkan kesepakatan internasional pendaftaran desain industri, secara umum memuat;⁶⁸⁾

a) surat permintaan untuk mendapatkan pengakuan desain ;

⁶⁷⁾ *Ibid*, hal 274.

⁶⁸⁾ Djubaedillah dan Muhammad Djumhana, *op.cit*, hal 213.

b) deskripsi tentang rancangan tersebut sehingga dapat dimengerti oleh seseorang yang ahli di bidangnya ;

c) satu atau lebih klaim yang terkandung dalam rancangan, yaitu uraian tertulis mengenai inti rancangan atau bagian-bagian suatu rancangan yang dimintakan hak desainya ;

d) satu atau lebih gambar yang diperlukan untuk memperjelas, yaitu gambar teknik dari rancangan yang memuat tanda-tanda simbol, huruf, angka, bagan atau diagram yang menjelaskan bagian-bagian dari rancangannya ;

e) abstraksi tentang rancangan tersebut.

Permintaan pendaftaran tersebut dengan dilengkapi persyaratan tertentu, baik menyangkut persyaratan formalnya, maupun persyaratan materilnya.

Syarat formal adalah syarat yang menyangkut prosedur tata cara pendaftaran, sedangkan syarat materil adalah syarat yang menyangkut desain itu sendiri. Syarat formal yang biasa dikenakan kepada pemohon pendaftaran desain, yaitu antara lain ; ⁶⁹⁾

a) pemohon diwajibkan membuat pernyataan secara tertulis guna permintaan pendaftaran tersebut. Surat permintaan, dengan mencantumkan nama jelas domisil, alamat perusahaan, identitas barang yang didesain dan

⁶⁹⁾ Djubaedillah dan Muhamad Djuhana, *loc.cit.*

penggunaannya. Selain itu juga perlu menyatakan bahwa desain yang didaftarkan adalah benar miliknya. Bukti-bukti kepemilikan disertakan dalam surat permohonan ;

b) melampirkan akta pendirian badan hukum, serta replika desain barang yang didaftarkan dan contohnya ;

c) permohonan yang mengasaskan kepada orang lain harus dengan surat kuasa yang secukupnya ;

d) membayar seluruh biaya yang diperlukan dalam rangka pendaftaran tersebut.

Mengenai syarat materil, yaitu mengenai desain bahwa desain yang dapat dimintakan pendaftarannya harus memenuhi syarat materil, yaitu antara lain ; ⁷⁰⁾

a) novelty (*new or original*) Orisinal, sifatnya hampir sama dengan hak paten, yaitu bukan salinan dan bukan perluasan dari yang sudah ada. Desain mungkin baru dalam pengertian yang mutlak dalam bentuk atau polanya yang belum terlihat sebelumnya, tetapi juga mungkin baru dalam pengertian yang terbatas, yaitu dalam hal bentuk atau pola yang sudah dikenal hanya saja berbeda penggunaan dan pemantaatannya dari maksud yang telah diketahui sebelumnya. Desain juga baru bisa disebut baru karena adanya perbedaan-perbedaan, tetapi secara pengertian yang

terbatas hal itu menunjukkan hal yang tidak atau kurang baru;

b) mempunyai nilai praktis dan dapat diterapkan (diproduksi) dalam industri (*industrial applicability*) ;

c) tidak termasuk dalam daftar pengecualian untuk mendapatkan hak desain. Di antara beberapa syarat yang melarang pendaftaran desain adalah bila desain yang akan didaftarkan itu mempunyai persamaan pada pokoknya, atau keseluruhan dengan desain milik orang lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang sejenis. Desain tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, keterlibatan umum serta kesusilaan ;

d) apakah desainer atau orang yang menerima lebih lanjut hak desain tersebut berhak atas karyanya tersebut.

3). Pemeriksaan Pendaftaran Desain Industri

Sejak tanggal dimulainya pengumuman terhadap permohonan pemohon, pihak yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan yang mencakup hal-hal yang bersifat substantif secara tertulis kepada Ditjen HAKI dengan membayar biaya. Pengajuan tersebut harus diterima oleh Ditjen HAKI paling lambat tiga bulan terhitung sejak tanggal dimulainya

pengumuman. Keberatan tersebut diberitahukan Oleh Ditjen HAKI kepada pemohon.

Pemohon dapat menyampaikan sanggahan atas keberatan tersebut paling lambat tiga bulan terhitung sejak tanggal pengiriman pemberitahuan oleh Ditjen HAKI (Pasal 26 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) UUDI). Berdasarkan keberatan terhadap permohonan, maka dilakukan pemeriksaan substantif oleh pemeriksa. Ditjen HAKI menggunakan keberatan dan sanggahan yang diajukan sebagai bahan pertimbangan dalam hal pemeriksaan untuk memutuskan diterima atau ditolaknya permohonan. Ditjen HAKI menggunakan keberatan untuk menyetujui atau menolak keberatan dalam waktu paling lama enam bulan terhitung sejak berakhirnya jangka waktu pengumuman. Keputusan Ditjen HAKI diberitahukan secara tertulis kepada pemohon atau kuasanya paling lambat 30 hari terhitung sejak tanggal dikeluarkannya keputusan tersebut (Pasal 26 ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8) UUDI).

Bila tidak terdapat keberatan terhadap permohonan hingga berakhir jangka waktu pengumuman tiga bulan. Ditjen

HAKI melakukan pemeriksaan substantif terhadap permohonan yang telah diterima tersebut. Bila hasil pemeriksaan substantif menyatakan bahwa permohonan yang bersangkutan telah memenuhi dan sesuai dengan ketentuan undang-undangan, maka (Pasal 29 UUD) Dijen HAKI menerbitkan dan memberikan Sertifikat Desain Industri dalam tenggang waktu paling lama 30 hari terhitung sejak tanggal penerimaan (*filling date*). Sertifikat Desain Industri dicatat dalam Daftar Umum Desain Industri dan diumumkan secara resmi melalui Berita Resmi Desain Industri. Pihak yang memerlukan salinan Sertifikat Desain Industri dapat memintanya kepada Dijen Haki dengan membayar biaya.

Pemohon yang permohonannya ditolak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga dalam waktu paling lama tiga bulan terhitung sejak tanggal pemberitahuan. Terhadap permohonan yang ditolak berdasarkan desain industri yang tidak baru atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketentuan umum, kesesuaian, pemohon dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Dijen HAKI disertai alasan-alasannya. Apabila Dijen HAKI berpendapat bahwa permohonan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kesesuaian umum, ketentuan umum, kesesuaian, pemohon dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Dijen HAKI disertai alasan-alasannya. Apabila Dijen HAKI berpendapat bahwa permohonan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kesesuaian umum, kesesuaian, maka pemohon dapat mengajukan

gugatan terhadap keputusan penolakan Ditjen HAKI kepada Pengadilan Niaga (Pasal 28 UUD).⁷¹⁾

Pemeriksaan desain industri adalah tahapan yang menentukan keputusan dapat, atau tidaknya diberikan hak desain industri oleh Ditjen HAKI. Pemeriksaan mengenai syarat formal bertujuan untuk menentukan apakah permintaan desain industri itu memuat semua data yang disyaratkan, apakah permintaan itu mengenai satu desain saja, apakah biaya-biaya yang ditentukan telah dibayar dan apabila diajukan dengan hak prioritas apakah syarat-syarat untuk diberi hak prioritas itu dipenuhi. Pemeriksaan substantif adalah suatu pemeriksaan untuk menentukan apakah desain memenuhi syarat untuk diberi perlindungan. Penentuan bahwa suatu desain yang dimintakan perlindungannya dapat diberi atau tidak dapat dilakukan antara lain dengan mempertimbangkan syarat materiil. Proses yang dilakukan oleh Ditjen HAKI dalam melaksanakan pemeriksaan substantif dapat meliputi ;⁷²⁾

a) meneliti desain yang dimintakan pengakuan desain dengan desain yang lainnya yang telah ada berdasarkan antara lain dokumen permintaan desain, dokumen desain, serta dokumen-dokumen lain yang telah ada sebelumnya ;

⁷¹⁾ Abdulkadir Muhammad, *op.cit.*, hal 278.

⁷²⁾ Djubaedillah dan Muhammad Djumhana, *op.cit.*, hal 215.

b) mempertimbangkan pandangan atau keberatan yang diajukan masyarakat bila ada, serta sanggahan atau penjelasan terhadap pandangan masyarakat atau keberatan tersebut ;

c) mempertimbangkan dokumen-dokumen yang diajukan sebagai pemenuhan syarat diminta kantor pengelola dan mengundang orang yang mengajukan permintaan desain untuk memberikan tambahan penjelasan yang diperlukan.

Pemeriksaan substantif diminta oleh pihak yang mengajukan permintaan desain, bila permintaan pemeriksaan tidak dilakukan atau tidak dibayarnya biaya pemeriksaan, maka dianggap permintaan desain ditarik kembali. Dirjen HAKI dalam melakukan pemeriksaan substantif dapat bekerja sama dengan instansi pemerintah lainnya atau meminta bantuan ahli. Meskipun demikian tanggung jawab dan kewenangan, masih tetap ada pada Dirjen HAKI.

4). Pembatalan Pendaftaran Hak Desain Industri

a). Karena Permintaan Pemegang Hak

Desain terdaftar dapat dibatalkan oleh Dirjen HAKI atas permintaan pemegang hak desain industri yang diajukan secara tertulis. Pembatalan tersebut tidak dapat dilakukan apabila penerima hak desain industri yang tercatat dalam

Daftar Umum Desain Industri tidak memberikan persetujuan secara tertulis, yang dilampirkan pada permohonan pembatalan pendaftaran tersebut. Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi kepentingan penerima lisensi yang telah menerima pembayaran royalti kepada pemberi lisensi (Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) UUDI).

Keputusan pembatalan hak desain industri diberitahukan secara tertulis oleh Ditjen HAKI kepada :⁷³⁾

(1) pemegang hak desain industri ;
(2) penerima lisensi jika telah dilisensiskan sesuai dengan catatan dalam Daftar Umum desain industri ;

(3) pihak yang mengajukan pembatalan dengan menyebutkan bahwa hak desain industri yang telah diberikan dinyatakan tidak berlaku lagi terhitung sejak tanggal keputusan pembatalan.

Keputusan pembatalan desain industri terdaftar dicatat dalam Daftar Umum Desain Industri dan diumumkan dalam Berita Resmi Desain Industri (Pasal 37 ayat (3) dan ayat (4) UUDI).

Pendaftaran desain hanya dapat dimintakan pembatalan oleh pihak yang berkepentingan, yaitu pemilik desain yang telah terdaftar berdasarkan alasan tertentu.

⁷³⁾ Abdulkadir Muhammad, *op.cit*, hal 280.

Permintaan pembatalan diajukan melalui gugatan kepada pengadilan, antara lain karena alasan : ⁷⁴⁾

(1) adanya persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dari desain miliknya yang telah terlebih dahulu terdaftar;

(2) penggunaan secara tidak sah atas desain milik orang yang mengugat ;

(3) peniruan atau menyerupai desain dengan secara tidak sah (tanpa ijin tertulis).

b). Karena Gugatan Pihak Berkepentingan

Gugatan pembatalan pendaftaran desain industri dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan melalui Pengadilan Niaga (Pasal 38 UUD), dengan alasan : ⁷⁵⁾

(1) desain industri tersebut sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya ;

(2) desain industri tersebut bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku, keterlibatan umum atau kesusilaan.

Putusan Pengadilan Niaga tentang pembatalan pendaftaran Hak Desain Industri hanya dapat dimintakan kasasi kepada Mahkamah Agung. Putusan Pengadilan Niaga atau putusan kasasi segera disampaikan kepada Ditjen HAKI

⁷⁴⁾ Djubaedillah dan Muhammad Djumhana, *op.cit.*, hal 218.
⁷⁵⁾ Insan Budi Maulana, *op.cit.*, hal 30.

mencatat putusan pembatalan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dalam Daftar Umum Desain Industri dan diumumkan dalam Berita Resmi Desain Industri.

c). Karena Acara Gugatan melalui Pengadilan Niaga

Gugatan pembatalan pendaftaran desain industri diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga dalam wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat. Dalam hal tergugat bertempat tinggal di luar wilayah Indonesia, gugatan tersebut diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

Panitera mendaftarkan gugatan pembatalan pada tanggal gugatan yang bersangkutan diajukan dan kepada pengugat diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani Panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran gugatan (Pasal 39 ayat (1), ayat (2), ayat (3) UUD). Panitera menyampaikan gugatan pembatalan kepada Ketua Pengadilan Niaga dalam jangka waktu paling lama dua hari terhitung sejak gugatan didaftarkan. Dalam jangka waktu paling lama tiga hari terhitung sejak tanggal gugatan pembatalan didaftarkan.

Pengadilan Niaga mempelajari gugatan dan menetapkan hari sidang. Pemanggilan para pihak dilakukan

oleh Juru Sita paling lama tujuh hari setelah gugatan pembatalan yang didaftarkan. Sidang pemeriksaan atas gugatan pembatalan diselenggarakan dalam jangka waktu tertentu paling lama 60 hari setelah gugatan didaftarkan (Pasal 39 ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7) UUD). Putusan atas gugatan pembatalan harus diucapkan paling lama 90 hari setelah gugatan didaftarkan dan dapat diperpanjang paling lama 30 hari atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung. Putusan pembatalan tersebut memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut dan harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dapat dijalankan lebih dahulu, meskipun terhadap putusan tersebut diajukan suatu upaya hukum. Salinan putusan Pengadilan Niaga wajib disampaikan oleh Juru Sita kepada pihak paling lama 14 hari setelah putusan atas gugatan pembatalan diucapkan (Pasal 39 ayat (8), ayat (9), ayat (10) UUD).⁷⁶⁾

d). Karena Acara Kasasi Melalui Mahkamah Agung

Terhadap putusan Pengadilan Niaga hanya dapat dimohonkan kasasi ke Mahkamah Agung. Permohonan kasasi diajukan paling lama 14 hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan kasasi diucapkan atau diberitahukan

⁷⁶⁾ Abdulkadir Muhammad, *op.cit.*, hal 282.

kepada para pihak dengan mendaftarkan kepada Panitia Pengadilian Niaga yang telah memutuskan gugatan tersebut, Panitia mendaftar permohonan kasasi pada tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan dan kepada Pemohon diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh Panitia dengan tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan pendaftaran.

Pemohon kasasi wajib menyampaikan memori kasasi kepada Panitia dalam waktu 14 hari sejak tanggal permohonan kasasi didaftarkan (Pasal 41 ayat (1), ayat (2), ayat (3) UUD). Panitia wajib mengirimkan permohonan kasasi dan memori kasasi kepada pihak permohonan kasasi setelah permohonan kasasi didaftarkan. Pemohon kasasi dapat mengajukan kontra memori kasasi kepada Panitia paling lama 7 hari setelah tanggal permohonan kasasi menerima memori kasasi dan Panitia wajib menyampaikan kontra memori kasasi pemohon kasasi paling lama 2 hari setelah kontra memori kasasi diterimanya (Pasal 41 ayat (4) dan ayat (5) UUD). Panitia wajib menyampaikan permohonan kasasi, memori kasai dan/atau kontra memori kasasi beserta berkas perkara yang bersangkutan kepada Mahkamah Agung paling lama 7 hari

setelah lewatnya jangka waktu sebagaimana dimaksud

dalam ayat (5).

Mahkamah Agung wajib mempelajari berkas

permohonan kasasi dan menetapkan hari sidang paling lama 2 hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung. Sidang pemeriksaan atas permohonan kasasi dilakukan paling lama 60 hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung (Pasal 41 ayat (6), ayat (7), ayat (8) UUD). Putusan atas permohonan kasasi harus diucapkan paling lama 90 hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah

Agung.

Putusan atas permohonan kasasi tersebut memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut dan harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Panitera Mahkamah Agung wajib menyampaikan salinan putusan kasasi kepada Panitera paling lama tiga hari setelah tanggal putusan atas permohonan kasasi diucapkan. Juru Sita wajib menyampaikan salinan putusan kasasi kepada pemohon kasasi dan termohon kasasi paling lama dua hari setelah

putusan kasasi diterima (Pasal 41 ayat (9), ayat (10), ayat (11), ayat (12) UUD).⁷⁷⁾

e). Akibat Pembatalan Pendaftaran

Pembatalan pendaftaran desain industri menghapuskan segala akibat hukum yang berkaitan dengan hak desain industri dan hak-hak lain yang berasal dari desain industri tersebut (Pasal 43 UUD). Dalam hal pembatalan karena permintaan pemegang hak desain industri, penerima lisensi tetap berhak melaksanakan lisensinya sampai dengan berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian lisensi.

Pemegang lisensi tersebut tidak lagi wajib meneruskan pembayaran royalti yang seharusnya masih wajib dilakukannya kepada pemegang hak desain industri yang haknya dibatalkan, tetapi wajib mengalihkan pembayaran royalti untuk sisa waktu lisensi yang dimilikinya kepada pemegang hak desain industri yang sebenarnya (Pasal 44 UUD).⁷⁸⁾

⁷⁷⁾ *Ibid*, hal 283.

⁷⁸⁾ Insan Budi Maulana, *op.cit.*, hal 33.

C.2. Penegakkan Hukum Atas Pelanggaran Desain Industri

Pelanggaran terhadap hak milik intelektual pada umumnya dan desain industri pada khususnya, tidaklah mudah mengatasinya. Hal ini disebabkan karena hak milik intelektual, termasuk di dalamnya desain industri mempunyai ruang lingkup yang sangat luas dan kompleks, serta ditambah dengan perkembangan ekonomi dan perdagangan nasional maupun internasional yang sangat cepat.

Pelanggaran terhadap hak milik pada dasarnya dilakukan sebagai tindakan manusia yang ditimbulkan oleh adanya hubungan antara kebutuhan untuk mendapatkan keuntungan dengan jalan pintas secara mudah. Bentuk-bentuk pelanggaran terhadap hak milik intelektual, yaitu berupa pemalsuan, pembajakan penyadapan dan pembocoran informasi rahasia, persaingan tidak jujur, turut menawarkan serta memperdagangkan hasil pemalsuan dan sebagainya. Terjadinya pelanggaran tersebut, tidak hanya merugikan pemilik hak saja, tetapi juga dapat merugikan kepentingan umum, misalnya merugikan di bidang perpajakan, perindustrian, serta tata nana sosial, hukum dan ekonomi secara luas. Untuk menanggulangi pelanggaran terhadap hak milik intelektual tersebut melalui sarana hukum, maka hukum perdata, hukum pidana dan hukum administrasi negara dapat digunakan secara saling mengisi, di samping tindakan-tindakan pencegahan lain yang bersifat non yuridis.

Selanjutnya bila hukum pidana hendak digunakan, haruslah sangat selektif penggunaannya untuk beberapa kasus tertentu, hal ini mengingat sifat hukum pidana yang keras dan mempunyai fungsi subside. Sehingga ada baiknya tidak menggunakan hukum pidana, apabila masih ada sarana-sarana lain yang memadai.

a. Penanganan Hukum Terhadap Pelanggaran Desain Industri

1). Penanganan Melalui Gugatan Perdata

Di bidang desain industri posisi pengugat atau tergugat dapat berada pada posisi sebagai pemilik hak atas desain, pihak yang mengalihkan hak atas desain, pihak yang mendapatkan pengalihan hak atas desain, penerima lisensi, pengguna hasil desain dan pihak lainnya seperti pembantah atau pemohon pencoretan pendaftaran desain.

Upaya yang dilakukan bisa berdasar pada Pasal 1365 KUH Perdata, yaitu "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut." ⁷⁹⁾ Adapun lingkup tuntutan perdata yang dapat diajukan meliputi :

a) tuntutan ganti rugi, yaitu besarnya ganti rugi yang harus ditanggung pelaku atas kerugian yang dialami oleh pemilik/

⁷⁹⁾ Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradya Paramita, 1992, hal 288.

pemegang desain/hak desain ditambah biaya pengacara yang dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan ;

b) menghukum pemalsu untuk menghentikan pemakaian desain, melarang memproduksi barang dan melarang memperdagangkan barang ;

c) menyita dan menarik barang dari peredaran untuk dimusnahkan.

Pemegang hak desain industri atau penerima lisensi dapat mengugat siapa pun yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan membuat, memakal, menjual atau mengimpor produk yang diberi hak desain industri berupa gugatan ganti kerugian dan penghentian semua perbuatan. Gugatan tersebut diajukan ke Pengadilan Niaga (Pasal 46 UUD). Menurut ketentuan Pasal 49 UUD, berdasarkan bukti yang cukup, pihak yang haknya dirugikan dapat meminta hakim Pengadilan Niaga untuk menerbitkan surat penetapan sementara tentang ;⁸⁰⁾

a) pencegahan masuknya produk yang berkaitan dengan pelanggaran hak desain industri. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah kemungkinan kerugian yang lebih besar pada pihak yang haknya dilanggar, sehingga hakim Pengadilan Niaga diberikan kewenangan untuk menerbitkan penetapan sementara guna mencegah berlanjutnya

⁸⁰⁾ Insan Budi Maulana, *op.cit.*, hal 35.

pelanggan dan masuknya barang yang diduga melanggar hak desain industri ke jalur perdagangan termasuk tindakan impor ;

b) penyimpanan bukti yang berkaitan dengan pelanggaran hak desain industri, hal ini dimaksudkan untuk mencegah pihak pelanggar menghilangkan barang bukti.

Dalam hal surat penetapan sementara tersebut telah dilaksanakan, Pengadilan Niaga segera memberi tahu pihak yang dikenakan tindakan dan memberi kesempatan kepada pihak tersebut untuk didengar keterangannya (Pasal 50 UUD). Dalam hal hakim Pengadilan Niaga telah menerbitkan surat penetapan sementara, hakim Pengadilan Niaga yang memeriksa sengketa tersebut harus memutuskan apakah mengubah, membatalkan atau menguatkan penetapan tersebut dalam waktu paling lama 30 hari sejak dikeluarkannya surat penetapan sementara Pengadilan tersebut (Pasal 51 UUD). Dalam hal penetapan Pengadilan dibatalkan, pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut ganti rugi kepada pihak meminta penetapan sementara Pengadilan, atas segala kerugian yang ditimbulkan dari penetapan Pengadilan tersebut (Pasal 52 UUD).⁸¹⁾

⁸¹⁾ Insan Budi Maulana, *loc.cit.*

2). Penanganan Melalui Tuntutan Pidana

Gugatan perdata terhadap orang yang melakukan pelanggaran tidak menghapuskan tuntutan pidana bila ada alasan untuk itu. Apabila terdapat dugaan kuat telah terjadi tindak pidana pelanggaran hak desain industri, maka Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil (Penyidik PPNs) yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik melakukan penyidikan tindak pidana di bidang desain industri.⁸²⁾ Menurut ketentuan Pasal 53 ayat (2) UUD, Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) berwenang :

- a) melakukan pemeriksaan atas kebenaran pengaduan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang desain industri ;
- b) melakukan pemeriksaan terhadap pihak yang diduga telah melakukan tindak pidana di bidang desain industri ;
- c) meminta keterangan peristiwa tindak pidana di bidang desain industri ;
- d) melakukan pemeriksaan atas pembukuan, pencatatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang desain industri ;
- e) melakukan pemeriksaan di tempat yang diduga terdapat barang bukti pembukuan, pencatatan dokumen lain ;

⁸²⁾ W. Simanjuntak, *op.cit.*, hal 18.

f) melakukan penyitaan terhadap bahan dan/atau barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang desain industri dan/atau

g) meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang desain industri.

PPNS dalam melakukan tugasnya memberitahukan

dimulainya penyidikan dan melaporkan hasil penyidikannya kepada Penyidik Pejabat Polri. Apabila penyidikan sudah selesai, PPNS menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polri (Pasal 53 ayat 3 dan 4 UUD) dengan mengingat ketentuan Pasal 107 KUHP.

Pasal 107 KUHP menyatakan, bahwa ;

a) (ayat 1) untuk kepentingan penyidikan, penyidik (pejabat Polri) memberikan petunjuk kepada penyidik (pejabat PNS tertentu yang diberi wewenang khusus oleh UU) dan pemberian bantuan penyidikan yang diperlukan ;

b) (ayat 2) dalam hal peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana sedang penyidikan oleh penyidik (pejabat PNS) tersebut diatas dan kemudian ditemukan bukti yang kuat untuk diajukan kepada penuntut umum, penyidik (pejabat PNS) tersebut melaporkan hal itu kepada penyidik (pejabat Polri) ;

c) (ayat 3) dalam tindak pidana telah selesai disidik oleh penyidik (pejabat PNS), ia segera menyerahkan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik (pejabat Polri).

Apabila ternyata telah tindak pidana pelanggaran hak desain industri, maka pelaku tindak pidana diancam dengan pidana yang diatur dalam Pasal 54 UUDL. Menurut ketentuan Pasal 54 UUDL, memuat⁸³⁾

a) atau mengimpor ayat (1), barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan membuat, memakal, menjual produk yang diberi hak desain industri, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 ;

b) ayat (2), barangsiapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 (yaitu melakukan perbuatan menghapuskan hak pendesain untuk tetap dicantumkan namanya dalam Daftar Umum Desain Industri dan Berita Resmi Desain Industri), Pasal 23 (yaitu kewajiban menjaga kerahasiaan permohonan), atau Pasal 32 (yaitu hak untuk tetap dicantumkan nama dan identitas lainnya dalam Sertifikat Desain Industri), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 45.000.000,00 ;

⁸³⁾ Insan Budi Maulana, *op.cit*, hal 37.

c) Ayat (3) tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

dan ayat (2) merupakan delik aduan.

Penanganan melalui tuntutan pidana, juga dapat dilakukan berdasarkan Pasal 382 bis KUHP (persaingan curang),⁸⁴⁾ yaitu "barangsiapa untuk mendapatkan, melangsungkan atau memperluas debit perdagangan atau perusahaan kepunyaan sendiri atau orang lain, melakukan perbuatan curang untuk menyesatkan khlayak umum atau seorang tertentu, diancam, jika karena dapat timbul kerugian bagi konkiren-konkirennya atau konkiren-konkirennya orang lain itu, karena persaingan curang, dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan atau denda paling banyak 900 rupiah." Kemudian dapat juga berdasarkan Pasal 383 KUHP (penipuan), yaitu "diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan, seorang penjual yang berbuat curang terhadap pembeli (ayat 1) karena sengaja, menyerahkan barang lain daripada yang ditunjuk untuk dibeli, (ayat 2) mengenai jenis keadaan atau banyaknya barang yang diserahkan, dengan menggunakan tipu muslihat".⁸⁵⁾ Juga dapat berdasarkan Pasal 390 dan 392 KUHP (menyerahkan barang atau produk yang diketahuinya palsu).⁸⁶⁾ Pasal 390, berbunyi "barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan

84) Moelyatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta 1994, 163.

85) Moelyatno, *loc.cit*

86) *Ibid*, 166-167.

Penyelesaian sengketa desain industri melalui badan peradilan, berdasarkan UDI dilakukan di Pengadilan Niaga. Pengadilan Niaga, diatur dalam Bab III Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan. Lembaga ini berupa Pengadilan Niaga, dengan hakim-hakim yang dengan demikian juga akan bertugas khusus. Pembentukan Pengadilan Niaga ini merupakan langkah deferensial atas Peradilan Umum, yang memungkinkan pembentukannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman. Keberadaan lembaga ini akan diwujudkan secara bertahap. Begitu pula dengan lingkup tugas dan kewenangannya di luar

1). Penyelesaian Sengketa di Dalam Badan Peradilan

b. Penyelesaian Sengketa Pada Desain Industri

hukum, dengan menyebarkan kabar bohong yang menyebabkan harga barang-barang dagangan, dana-dana atau surat-surat berharga menjadi turun atau naik, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan. " Sedangkan Pasal 392, berbunyi "seorang pengusaha, seorang pengurus atau komisaris perseoran terbatas, maskapai andil Indonesia atau koperasi, yang sengaja mengumumkan keadaan atau neraca yang tidak benar, diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan".

masalah kepailitan, akan ditambahkan atau diperluas dari waktu ke waktu, semuanya akan dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat kebutuhan dan yang penting lagi, tingkat kemampuan serta ketersediaan sumber daya yang akan mendukungnya.

Dalam Pasal 280 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan ditekaskan bahwa Pengadilan Niaga merupakan bagian dari Peradilan Umum. Berdasarkan Pasal 280 ayat (2) UU Kepailitan, Pengadilan Niaga, sampai tingkat tertentu yang akan ditentukan kemudian, juga diberikan kewenangan untuk memeriksa dan memutuskan perkara lain di bidang perniagaan. Untuk pertama kalinya Pengadilan Niaga dibentuk pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pembentukan Pengadilan Niaga selanjutnya akan dilakukan secara bertahap dengan Keputusan Presiden, dengan memperhatikan kebutuhan dan kesiapan sumber daya yang diperlukan. Oleh karena itu, sampai dengan terbentuknya Pengadilan Niaga selanjutnya, maka semua perkara yang menjadi lingkup kewenangan Pengadilan Niaga diperiksa dan diputuskan oleh Pengadilan Niaga yang ada di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Undang-Undang Kepailitan menentukan bahwa dalam menjalankan tugasnya, selama sidang berlangsung Hakim Pengadilan Niaga, baik yang berbentuk Majelis maupun hakim tunggal akan dibantu oleh seorang Panitera atau seorang Panitera Pengganti dan Juru Sita.

Hakim Pengadilan Niaga hanya dapat diangkat oleh dan berdasarkan surat Keputusan Mahkamah Agung selama memenuhi persyaratan sebagai berikut :⁸⁷⁾

- a) telah berpengalaman sebagai hakim dalam lingkungan Pengadilan Umum ;
- b) mempunyai dedikasi dan menguasai pengetahuan di bidang masalah-masalah yang menjadi lingkup kewenangan Pengadilan Niaga ;
- c) berwibawa, jujur dan berkelakuan tidak tercela
- d) telah berhasil menyelesaikan program pelatihan khusus sebagai hakim pada Pengadilan Niaga.

Dalam Undang-Undang Kepailitan dimungkinkan adanya pengangkatan hakim *ad-hoc*, yang bukan merupakan hakim karier yang didasarkan di kalangan Peradilan Umum. Pengangkatan hakim *ad-hoc* tersebut harus dilakukan dengan suatu Keputusan Presiden dan bukan berdasarkan suatu Keputusan Ketua Mahkamah Agung. Seluruh pembinaan, bimbingan dan pengawasan terhadap jalannya peradilan Pengadilan Niaga berada di bawah kewenangan Mahkamah Agung, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Kepailitan. Ketua Mahkamah Agung wajib dan diberi

⁸⁷⁾ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Kepailitan*, Rajagrafindo Persada, Jakarta 1999, hal 137.

kewenangan untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menjamin ;⁸⁸⁾

- a) penyelenggaraan persidangan Pengadilan Niaga secara berkesinambungan ;
- b) prosedur persidangan yang cepat, efektif dan terekam dengan baik ;
- c) tersedianya putusan tertulis pada saat ditetapkan dan memuat pertimbangan yang mendasari putusan ;
- d) terselenggaranya pengarsipan putusan yang baik dan agar putusan Pengadilan Niaga diterbitkan secara berkala.

Walaupun demikian hal-hal yang menyangkut perkara lainnya di bidang perniagaan, Ketua Mahkamah Agung dapat menetapkan jenis dan nilai perkara yang pada tingkat pertama diperiksa dan diputus oleh hakim tunggal.

2). Penyelesaian Sengketa Dengan Arbitrase

Berdasarkan Pasal 47 UUD, dikatakan bahwa para pihak dapat menyelesaikan perselisihan melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa. Sehingga penyelesaian sengketa desain industri di luar badan peradilan, dilakukan berdasar pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Dalam undang-undang tersebut sekurangnya ada enam macam cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan, yaitu konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, pemberian pendapat hukum dan arbitrase. Jika negosiasi melibatkan para pihak yang bersengketa secara langsung, konsultasi dan pendapat hukum dapat dilakukan secara bersama-sama antara para pihak yang bersengketa dengan pihak yang memberikan konsultasi atau pendapat hukum, maupun secara sendiri-sendiri oleh masing-masing pihak yang bersengketa dengan konsultan atau ahli hukumnya sendiri. Selanjutnya mediasi dan konsiliasi melibatkan pihak ketiga yang berfungsi menghubungkan kedua belah pihak yang bersengketa, di mana dalam mediasi fungsi pihak ketiga dibatasi hanya sebagai penyalang lidah, sedangkan dalam konsiliasi, pihak ketiga terlibat aktif dalam memberikan usulan solusi atas sengketa yang terjadi. Sedangkan arbitrase merupakan suatu bentuk pengadilan swata, dengan arbitrer sebagai hakim swasta, yang memutus untuk kepentingan kedua belah pihak yang bersengketa.⁸⁹⁾

Dalam Undang-Undang No 30 Tahun 1999, dikatakan bahwa arbitrase adalah "cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa". Arbitrase merupakan sistem *Alternative Dispute*

⁸⁹⁾ Gunawan Widjaja, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Rajagrafindo Perkasa, 2001, hal 85.

Resolution (ADR) yang paling formal sifatnya. Dalam proses arbitrase para pihak yang bersengketa menyerahkan penyelesaian sengketa kepada pihak ketiga yang netral dan berwenang untuk memberikan putusan yang mengikat para pihak. Terdapat dua jenis arbitrase, yaitu : ⁹⁰⁾

(1) arbitrase *ad hoc* yang dibentuk khusus untuk menyelesaikan perkara tertentu. Kehadirannya bersifat sementara dan kasus per kasus. Selesai suatu sengketa diputus, eksistensi dan fungsinya secara otomatis berhenti;

(2) arbitrase kelembagaan (institusional), yaitu lembaga/badan arbitrase permanen yang sengaja dibentuk untuk menyelesaikan berbagai macam transaksi bisnis di dunia perdagangan dan industri.

Para pihak terikat dengan sistem penyelesaian sengketa arbitrase ini, melalui dua cara yaitu : ⁹¹⁾

(1) klausula arbitrase (*pactum de compromittendo*) adalah telah dirumuskan di dalam kontrak sebelumnya oleh para pihak bahwa apabila terjadi sengketa akan diselesaikan melalui arbitrase ;

(2) persetujuan arbitrase (akta kompromis), yaitu karena adanya kesepakatan setelah perselisihan terjadi untuk menyelesaikannya melalui arbitrase.

⁹⁰⁾ *Ibid*, hal 106.
⁹¹⁾ Sanusi Bintang dan Dahlan, *Pokok-Pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal 119.

Terdapat beberapa pertimbangan yang mendorong

kalangan bisnis memilih cara arbitrase sebagai berikut : ⁹²⁾

- (1) untuk menghindari publisitas ;
- (2) untuk menekan biaya penyelesaian sengketa ;
- (3) untuk menyelesaikan sengketa secara cepat ;
- (4) untuk menyelesaikan sengketa melalui penggunaan para ahli di bidangnya ;
- (5) untuk menghindari menyelesaikan sengketa yang tidak adil.

Pada tahun 1977 KADIN mendirikan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) yang dapat menyelesaikan sengketa perdagangan nasional dan internasional. Berikutnya, MUI mendirikan Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI), keduanya dilengkapi dengan ketentuan prosedurnya.

Di tingkat internasional terdapat pula lembaga-lembaga arbitrase, antara lain arbitrase dari "*The International Chamber of Commerce*" (ICC) yang berpusat di Paris (menangani sengketa perdagangan pada umumnya) dan "*The International Center for the Settlement of Investment Dispute*" (ICSID) yang berkedudukan di Washington (menangani khusus sengketa penanaman modal saja). Di samping itu, masih banyak lembaga arbitrase lainnya di berbagai negara, seperti Inggris, Singapura, Jepang dan Malaysia. Dengan berlakunya Keppres Nomor 34 Tahun 1981 tentang Ratifikasi Konvensi New York 1958,

⁹²⁾ Sanusi Bintang dan Dahlan, *loc.cit.*

putusan arbitrase asing (international) tersebut juga dapat dieksekusi di Indonesia, apabila memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999.⁹³⁾

Eksekusi putusan arbitrase dapat dibedakan ke dalam putusan arbitrase nasional dan putusan arbitrase asing. Putusan arbitrase nasional adalah putusan arbitrase, baik ad-hoc maupun institusional, yang diputuskan di dalam wilayah Indonesia, sedangkan putusan arbitrase internasional pengertiannya di atur dalam Pasal 1 ayat (1) Konvensi New York 1958, yaitu "*Arbitral award made in the territory of a state other than the state where the recognition and enforcement of such awards are sought*", putusan arbitrase internasional itu dibuat di luar negeri. Dalam hukum eksekusi putusan arbitrase nasional dapat ditemukan di dalam Pasal 59 sampai dengan 64 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Sedangkan dasar hukum putusan arbitrase internasional di atur dalam Konvensi New York 1958 yang oleh Indonesia telah diratifikasi dengan Keppres Nomor 34 Tahun 1981 dan Konvensi ICSID 1968 yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1968.⁹⁴⁾ Sedangkan tentang pelaksanaan arbitrase asing ini pengaturannya terdapat di dalam PERMA Nomor 1 Tahun 1990.

⁹³⁾ *Ibid*, hal 120.
⁹⁴⁾ *Ibid*, hal 144.

HASIL DAN PEMBAHASAN

BAB III

A. Hasil Penelitian

Setelah dilakukan penelitian tentang perlindungan hukum desain industri pada industri Batik Banyumasan, prinsip *kebaruan/novelty* pada industri Batik Banyumasan dan hambatan-hambatan yang dihadapi oleh para pengusaha Batik Banyumasan untuk melindungi desain industrinya, maka dapat disajikan hasil penelitian sebagai berikut :

A.1. Perlindungan hukum desain industri pada industri Batik Banyumasan

Berdasarkan penelitian di lapangan, terdapat begitu banyak desain Batik Banyumasan, baik tradisional maupun modern. Dan dari 115 desain Batik Banyumasan, belum ada yang mendapatkan perlindungan hukum desain industri, bahkan para perajin Batik Banyumasan rata-rata tidak tahu tentang adanya perlindungan hukum desain industri.

Perlindungan hukum desain industri pada perajin Batik Banyumasan, baru pada tahap sosialisasi dan perencanaan pelatihan oleh Disperindagkop Kabupaten Banyumas yang bekerja sama dengan Ditjen HAKI dan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas. Hal ini dilakukan mengingat bahwa desain industri adalah bentuk perlindungan HAKI yang masih baru, sehingga

Desain kain Batik Banyumasan trem adalah hasil cap dan bukan batik tulis. Desain ini mempunyai ciri warna dasar kuning dengan gambar-gambar dari kelir cokelat dan hitam. Kain trem 1) Desain kain Batik Banyumasan trem ;

⁹⁵⁾ sosrok dan desain kain Batik Banyumasan jonas. kain Batik Banyumasan trem, desain kain Batik Banyumasan Banyumasan tradisional menjadi tiga golongan besar, yaitu desain Perajin Batik Banyumasan membagi desain Batik

a. Penggolongan desain batik oleh perajin Batik Banyumasan yang perlu dilindungi

Pada masa sosialisasi desain industri ini, perajin Batik Banyumasan berinisiatif untuk menggolongan desain Batik Banyumasan yang perlu dilindungi dan teknik pembuatan desain Batik Banyumasan yang juga perlu mendapatkan perlindungan hukum desain industri, secara swadaya. Penggolongan desain batik dan teknik pembuatan batik oleh perajin Batik Banyumasan, dirasakan perlu dilakukan sebagai perlindungan sementara dan untuk memudahkan bila nanti desain batik tersebut akan didaftarkan desain industri.

untuk mendaftarkan desain batiknya.

perajin Batik Banyumasan, untuk dapat memahami dan bersedia membutuhkan persiapan dan pengenalan yang cukup lama pada

diproduksi dengan mori primissima, prima dan biru dengan harga yang terjangkau untuk konsumen kelas menengah ke bawah, baik di perkotaan maupun pedesaan. Kain trem ini mempunyai desain yang beraneka macam warna. Desain batik trem tersebut dapat digolongkan menjadi :

a) desain corak garis :

Kain trem yang digolongkan ke dalam jenis garis mempunyai corak lurus, sehingga seolah-olah dalam membuat corak tersebut menggunakan penggaris. Yang termasuk dalam corak garis adalah corak banji, corak parang curiga kecil, corak parang parung, corak parang curiga seling barang, corak plonto bintulu, corak banji polos, corak banji polos, corak banji kembang, corak plonto baris kondur, corak plonto parang rusak, corak tirtotejo, corak baris kondur, corak kawung seling parang rusak, corak curiga seling parang rusak double, corak parang curiga, corak curiga putih, corak parang serimpi, corak parikesit, corak parang kilik, corak rujak sente, corak kembang gedang, corak parang curiga jalu besar, corak baris kondur sentegan, corak juwada sairis seling parang curiga, corak parang curiga kesit, corak barang besar, corak curiga putih seling baris kondur, corak parang gono, corak plonto galaran, corak parang sentul kecil, corak parang teja, corak jahean putih

seling curiga hitam, corak parang serimpi besar, corak gandasuli, corak curiga putih besar, corak curiga seling madubroto, corak truntum latar hitam seling serimpi, corak banji tunjung, corak golang galing kecil, corak baris kondur seling serimpi, corak jahean seling serimpi, corak curiga seling kembang gedang, corak parang serutu besar, corak curiga jalu, corak parang solder, corak kopi susu, corak juanda, corak juanda, corak udan liris, corak parang kembang dan corak parang keris.

b) desain corak blaburan :

Kain trem yang digolongkan ke dalam jenis blaburan adalah sebagian besar mempunyai warna kuning atau putih. Yang termasuk dalam corak blaburan adalah corak cempaka mulia ukel, corak bulu rambu, corak cempaka mulia, corak puger, corak blauran maduroto, corak jahean puger latar putih, corak semen jladri, corak sidaluhur putih, corak blaburan iwak, corak puger bledak, corak blaburan kedondongan, corak semen utuk, corak truntum putih, corak manukan putih, corak wijayakusuma putih, corak pringsedapur putih, corak blaburan walangkekek, corak blaburan manuk sepaasang, corak blaburan semen kienteng, corak kantilan mukti, corak blaburan daun keladi, corak babon angrem putih, corak kantilan ukel, corak blaburan angsa putih, corak melati

secondong, corak daun semanggi, corak kembang serunian, corak jangkrik genggong putih, corak sidamukti ukel dan corak buah anguran.

c) desain corak latar hitam ;

Kain trem yang digolongkan ke dalam jenis latar hitam sebagian besar mempunyai warna hitam. Yang termasuk dalam corak latar hitam adalah corak tirtateja, corak ceplok sakura, corak bayu ngili, corak parang kerna, corang ceplok gambiran, corak bulu rambu sogan, corak kawung cakara, corak jahean latar hitam, corak ceplok warna hitam, corak truntum latar hitam, corak truntum latar hitam seling serimpi, corak jahean putih seling curiga hitam, corak pari sewuli, corak banyak angrem, corak peksi kerna, corak sidamukti buketan tutul, corak daun keladi latar hitam, corak wijayakusuma warna hitam, corak waljinahan, corak manukan latar hitam, corak sidaluhur latar hitam, corak kantilan latar hitam, corak pringsedapur latar hitam dan corak babon angrem latar hitam.

d) desain corak ceplok ;

Kain trem yang digolongkan ke dalam jenis ceplok mempunyai warna yang berkelompok-kelompok, kelompok yang satu berbeda dengan kelompok yang lain. Yang termasuk dalam corak ceplok adalah corak sriwedari, corak

No	Corak garisan	Corak blaburan	Corak latar	Corak ceplok	Corak kawung
1	Banjil	Cempaka mulia	Titateja	Sriwedari	Kawung picis
2	Parang curiga kecil	Bulu rambut	Ceplok sakura	Ceplok sakura	Kawung besar
3	Parangparung	Cempaka mulia	Banyu ngili	Bulu rambut	Kawung beton
4	Parang curiga seling barong	Puger	Parang kerna	Banyu ngili	Kawung cakra

Tabel 1. Ragam desain kain Batik Banyumasan trem

sebagai berikut;

Banyumasan trem, maka akan ditampilkan dalam bentuk tabel Untuk mempermudah melihat ragam desain kain Batik secondong dan corak truntum putih.

corak kawung beton, corak kawung cakra, corak melati kawung adalah corak kawung picis, corang kawung besar, mempunyai corak tersendiri. Yang termasuk dalam corak Kain trem yang digolongkan ke dalam jenis kawung

e) desain corak kawung :

hitam, corak tambal miring dan corak sekar jagat. blaburan madurata, corak banyak angrem, corak ceplok latar corak bulu rambut sogan, corak cempaka mulia ukel, corak parangkerna, corak cempaka mulia, corak ceplok gambiran, ceplok sakura, corak bulu rambut, corak banyu ngili, corak

5	Plonto bintulu	Blaburan	Ceplok	Parang kerna	Melati	secondong
6	Banji polos	Jahean puger	Bulu rambut	Cempaka	Truntum putih	
7	Banjikembang	Semen jladi	Kawung cakra	Ceplok	gambiran	
8	Plonto baris	Sidaluhur putih	Jahean latar	Bulu rambut	sogan	
9	Plonto parang	Blaburan iwak	Ceplok latar	Cempaka	mulia ukel	
10	Tirtotejo	Puger bledak	Truntum latar	Blaburan	madurata	
11	Baris kondur	Blaburan	Truntum latar	Banyak	angrem	
12	Kawungseling	Semen utuk	Jahean putih	Ceplok latar	hitam	
13	Curiga seling	Truntum putih	Pari sewuli	Tambal	miring	
14	Parang curiga	Manukan putih	Banyak angrem	Sekar jagat		
15	Curiga putih	Wijaya kusuma	Peksi kerna			
16	Parang serimpi	Pring sedapur	Sidamukti			
17	Parikesit	Blaburan walang	Dau keladi			

		kekek	latah hitam			
18	Parang kilik	Blaburan manuk	Wijayakusuma	latah hitam		
19	Rujak sente	Blaburan semen	Walijnahan			
20	Kembang	Kantilan mukti	Manukan latah	hitam		
21	Parang curiga	Blaburan daun	Sidaluhur latah	hitam		
22	Baris kondur	Babon angrem	Kantilan latah	hitam		
23	Juwada sairis	Kantilan ukel	Pringsedapur	latah belakang		
	seling parang			curiga		
24	Parang curiga	Blaburan angsa	Babon angrem	latah hitam		
25	Barong besar	Melati contong				
26	Curiga putih	Daun				
	Seling baris	semangian				
	Kondur					
27	Parang gono	Kembangsrnian				
28	Plonto galaran	Jangkrik				
		genggong putih				
29	Parang sentul	Sidamukti ukel				
	kecil					
30	Parang teja	Buah anguran				
31	Jahean putih					

	selling	curiga	hitam					
32	Parang	serimpi	besar					
33	Gandasuli							
34	Curiga	putih	besar					
35	Curiga	saling	madubroto					
36	Truntum	latar	hitam	saling	serimpi			
37	Banci	tunjung						
38	Golang	galing	kecil					
39	Baris	kondur	saling	serimpi				
40	Jahean	saling	sering	serimpi				
41	Curiga	saling	kembanggedang					
42	Parang	serutu	besar					
43	Curiga	jalu						
44	Parang	solder						
45	Kopi	susu						
46	Juanda							

Desain kain Batik Banyumasan sosrok garis mempunyai warna kuning kecokelatan, cokelat dan hitam, sedangkan motif atau coraknya berupa gambar-gambar yang pada waktu menggambar harus menggunakan penggaris sebagai bahan dasar serta gambar pohon-pohon, bunga serta burung atau kupu-kupu sebagai buket/plangkah. Yang termasuk dalam golongan kain batik sosrok garis adalah

a) Desain kain Batik Banyumasan sosrok garis :

Desain kain Batik Banyumasan sosrok garis ukel/latar putih. desain kain Batik Banyumasan sosrok garis dan desain kain Batik Banyumasan sosrok garis ukel/latar putih. Desain kain batik sosrok dibagi menjadi dua golongan, yaitu konsumen kelas menengah perkotaan atau pun pedesaan. dengan motif prima dan biru dengan harga yang terjangkau oleh namun harus tetap mengalami kerokan. Kain sosrok diproduksi cokelat pada kain. Kain sosrok dapat juga dibuat dengan cap, kerokan untuk menghilangkan lilin yang akan diberi warna tulisan tangan yang dalam proses produksinya mengalami Desain kain Batik Banyumasan sosrok adalah desain kain batik

2) Desain kain Batik Banyumasan sosrok :

47	Udan liris				
48	Parang				
	kembang				
49	Parang keris				

corak udan liris, corak galaran/pugar, corak rujak sente, corak blarak sinered, corak parang kembang, corak usus keli, corak parang kelitik, corak gringsing, corak parang kesuma, corak kawung, corak dombuntel, corak anam kelas dan corak kopi pecah.

b) Desain kain Batik Banyumasan ukel/latar putih ;

Desain kain Batik Banyumasan sosrok ukel/latar putih mempunyai warna kuning kecokelatan, cokelat dan hitam, sedangkan motif atau coraknya adalah berupa gambar setengah lingkaran atau ukel sebagai gambar dasar serta pohon-pohon, bunga, burung dan kupu-kupu atau semen sebagai buket/plangkah. Yang termasuk dalam golongan kain batik sosrok ukel atau latar putih adalah corak latar putih/ukel buketan, corak latar putih/ukel semen dan corak latar putih/ukel udar. Khusus mengenai corak ukel, galaran, blarak sinered, anam klas, giring dan dom bundel dapat berbentuk biasa dan mempunyai buh. Ada pun yang dimaksud dengan buh adalah pinggiran kain berwarna hitam selebar 5 sentimeter.

Untuk mempermudah melihat ragam desain kain Batik Banyumasan sosrok, maka akan ditampilkan dalam bentuk tabel sebagai berikut;

Desain kain Batik Banyumasan jonas mempunyai warna dasar putih atau keputih-putihan serta gambar-gambar yang berwarna cokelat dan hitam sebagai buket/plangkah. Kain batik jonas ada yang ditulis dengan tangan dan ada juga yang menggunakan cap. Kain Batik Banyumasan jonas mempunyai kekhususan, yaitu berpinggiran merah atau hitam. Penggunaan warna merah atau hitam disebabkan karena selera masyarakat/konsumen, yang biasanya tergantung pada usia dan daerah asal konsumen.

3) Desain kain Batik Banyumasan jonas :

No	Corak sosrok garisan	Corak sosrok ukel/latar putih
1	Udan liris	Latar putih/ukel buketan
2	Galaran/puger	Latar putih/ukel semenan
3	Rujak sente	Latar putih/ukel udar
4	Blarak sinered	
5	Parang kembang	
6	Usus keli	
7	Parang kelitik	
8	Grinsing	
9	Parang kesuma	
10	Kawung	
11	Dombudel	
12	Anam kelasa	
13	Kopi pecah	

Tabel II. Ragam desain kain Batik Banyumasan sosrok

Kebanyakan konsumen yang berusia muda akan memilih buh warna merah, sedangkan konsumen yang berusia lanjut akan memilih buh warna hitam. Sedangkan konsumen yang tinggal di daerah pantai utara Jawa Tengah dan daerah Jawa Barat lebih menyukai warna buh merah. Desain/motif/corak batik banyumasan jonas adalah corak latar putih/ukel buh merah, corak latar putih/ukel buh hitam, corak kawung buh merah, corak tabagan buh hitam, corak galaran/puger buh merah, corak galaran/puger buh hitam, corak blarak sinered buh merah, corak blarak sinered buh hitam, corak kawung beton buh merah, corak kawung beton buh hitam, corak anam kelasa buh merah, corak anam kelasa buh hitam, grinsing buh merah, corak grinsing buh hitam, corak kawung jenggot buh merah dan corak kawung jenggot buh hitam.

Untuk mempermudah melihat ragam desain kain Batik Banyumasan jonas, maka akan ditampilkan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

No	Ragam corak kain Batik Banyumasan jonas
1	Latar putih/ukel buh merah
2	Latar putih/ukel buh hitam
3	Dom bundelbuh merah
4	Dom bundelbuh hitam

Tabel III. Ragam desain kain Batik Banyumasan jonas

Perajin Batik Banyumasan berusaha melindungi desain batiknya, dengan cara mengelompokkan teknik atau cara pembuatan desain Batik Banyumasan, tujuannya adalah sebagai perlindungan sementara, sampai nanti desain batik tersebut didaftarkan desain industri. Teknik pembuatan Batik yang perlu dilindungi!

b. Teknik pembuatan desain batik oleh perajin Batik Banyumasan

5	Kawung buh merah
6	Kawung buh hitam
7	Tabagan buh merah
8	Tabagan buh hitam
9	Galaran/puger buh merah
10	Galaran/puger buh hitam
11	Blarak sinered buh merah
12	Blarak sinered buh hitam
13	Kawung beton buh hitam
14	Kawung beton buh merah
15	Anam kelasa buh merah
16	Anam kelasa buh hitam
17	Grinsing buh merah
18	Grinsing buh hitam
19	Kawung jenggot buh merah
20	Kawung jenggot buh hitam

Banyumasan yang perlu dilindungi adalah teknik pembuatan desain kain Batik Banyumasan trem ;⁹⁶⁾

1) mori dipotong menurut ukuran yang ditentukan. Potongan tersebut ada yang dua setengah kacu dan ada yang dua seperempat kacu, menurut standar perusahaan ;

2) setelah dipotong, lalu dijilid dengan menggunakan mesin jahit pada ujung sebelah kiri dan kanan ;

3) dicuci dengan air bersih tujuannya untuk menghilangkan kotoran-kotoran dan sisa-sisa minyak yang masih melekat pada mori ;

4) dikaji dengan pati ubi kayu/tapioka ;

5) dikeringkan, baik dijemur menggunakan sinar matahari maupun diangin-anginkan ;

6) dikemplong, yaitu memukul kain putih yang telah dikaji dengan cara memukul kain putih kanjen dengan palu yang terbuat dari kayu dan dilakukan di atas papan kayu yang lebar dan beresat halus. Tujuan dari mengemplong adalah menghaluskan kain puti/mori agar malam dapat bercorak rata ;

7) memberikan cap, pada awalnya disebut tembokan, yaitu dengan memberi kain putih/mori dengan malam yang sifatnya mudah lepas, bagian ini nantinya akan berwarna putih atau kuning. Mengecap ini menggunakan cap tembokan rengrenan untuk bagian mori sebelah muka dan dengan cap tembokan terusan

untuk bagian kain putih/mori sebelah dalam atau sebaliknya. Biasanya dalam sehari bisa dihasilkan cap 10-15 lembar ;

8) dipingiri, artinya untuk ujung sebelah kiri dan kanan dari mori selebar satu setengah sampai dua centimeter ditutup dengan malam, hal ini bertujuan supaya bagian tersebut berwarna kuning polos dan tidak ada desain corak ;

9) disoga, artinya mori yang sudah diberi cap dimasukkan ke dalam campuran obat-obatan sogu. Kain-kain tersebut dimasukkan ke dalam telawah, yaitu tempat penampungan sogu dengan cara dilipat atau diwiru. Untuk mendapatkan sogu yang baik, kain tersebut harus dicekup sebanyak 16 atau 18 kali. Kain-kain yang sudah disoga kemudian ditaruh pada gawangan di atas telawah agar air sogu dapat menetes kembali. Sebelum kain berikutnya disoga, maka dalam telawah harus ditambahkan larutan sogu sebanyak 300 cc. Biasanya untuk menyoga 60 lembar kain, dikerjakan selama satu hari ;

10) dikani dengan pati ubi/tapioka ;

11) dikeringkan, dengan cari diangin-anginkan, tetapi tidak boleh dijemur dengan sinar matahari, karena sogu tersebut dapat rusak;

12) diberikan cap lagi dengan cap rengrengan atau cap klowong untuk mori bagian muka dan cap klowong terusan untuk mori

bagian dalam atau sebaliknya. Tujuannya adalah untuk menutup bagian yang sudah kena soda ;

13) dicekup/diwedel, kain yang akan diwedel dimasukkan ke dalam bak, yang biasanya berukuran dua meter untuk dalamnya dan panjangnya dua meter empat puluh sentimeter serta lebarnya satu seperempat meter. Bak ini diisi larutan yang telah dicampur dengan obat-obatan celupan ;

14) dilorod, biasanya nglorod disebut juga mbabar, yaitu membuka corak malam atau menghilangkan malam seluruhnya. Oleh karena malam sifatnya keras, maka untuk menghilangkannya dimasukkan ke dalam air panas ;

15) dikelir, yaitu kain yang sudah dilorod akan hilang malamnya, bagian yang kehilangan malamnya akan berwarna putih. Untuk menghilangkan atau mengubah warna putih ini maka digunakan obat direct kuning mas, sehingga berubah warna menjadi kuning;

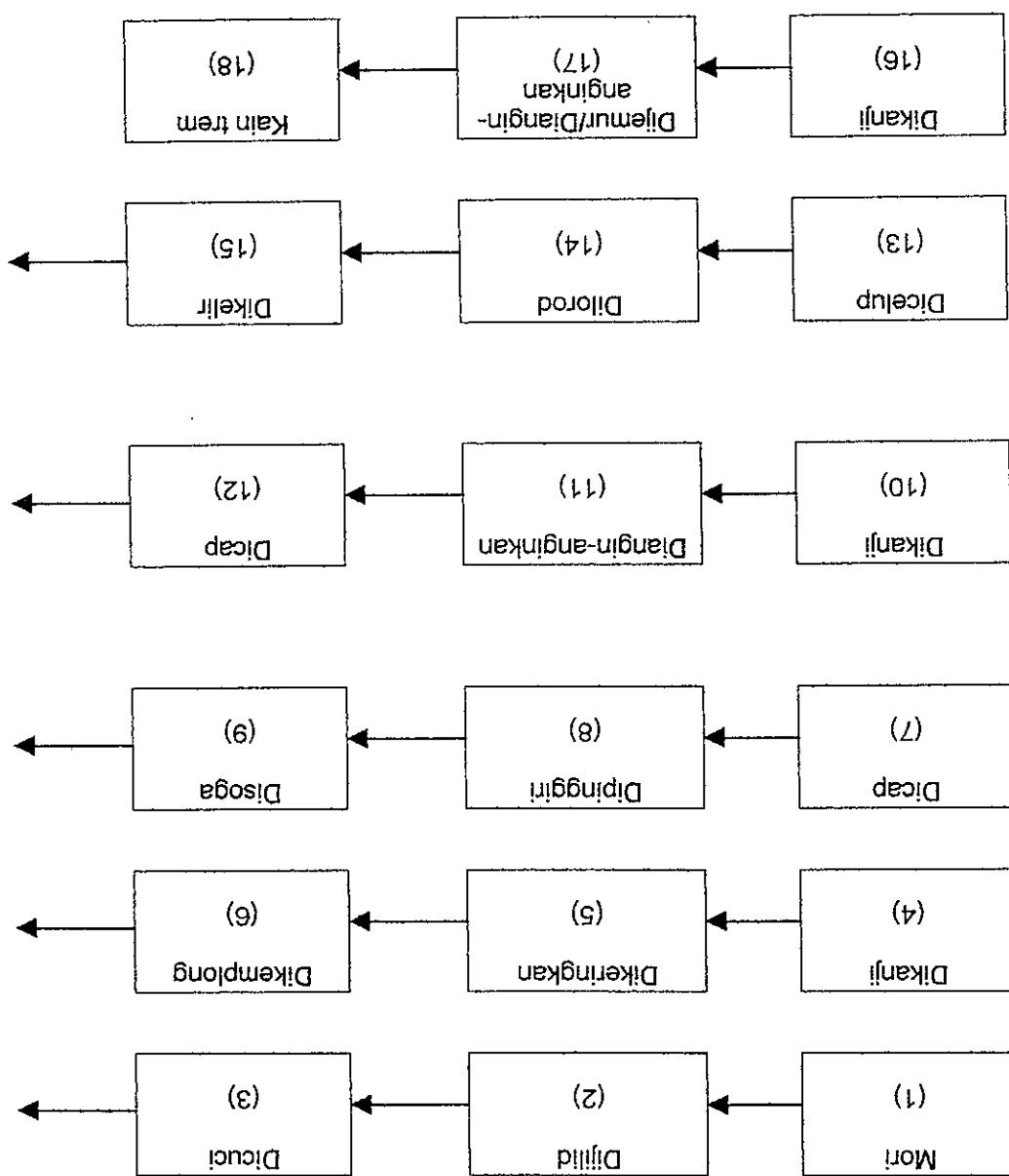
16) diberi kanji lagi ;

17) dikeringkan dengan cara dijemur sinar matahari ;

18) bila sudah kering, maka sudah menjadi kain trem.

Untuk lebih jelasnya, maka teknik pembuatan kain Batik Banyumasan trem, dibuat dalam bagan sebagai berikut ;

Kemudian teknik pembuatan desain kain Batik Banyumasan srosok;
 1) mori dipotong menurut ukuran yang ditentukan. Potongan tersebut ada yang dua setengah kaku dan ada yang dua seperempat kaku, menurut standar perusahaan ;



Bagan 1. Teknik pembuatan desain kain Batik Banyumasan trem

2) setelah dipotong, lalu dilid dengan menggunakan mesin jahit pada ujung sebelah kiri dan kanan ;

3) dicuci dengan air bersih tujuannya untuk menghilangkan kotoran-kotoran dan sisa-sisa minyak yang masih melekat pada mori ;

4) dikaji dengan pati ubi kayu/tapioka ;

5) dikeringkan, baik dijemur menggunakan sinar matahari maupun diangin-anginkan ;

6) digambar, mori yang akan dibatik harus digambar terlebih dahulu dengan pensil. Bagian yang digambar cukup plangkahnya saja, yaitu yang berupa pohon, burung, bunga atau kupu-kupu, sedangkan desainya tidak perlu digambar ;

7) dibatik, yaitu pada gambaran dari pensil dibatik dengan malam, dengan menggunakan canting. Setelah selesai, maka dibatik desain coraknya, misalnya akan puger, ukel, dombundel, grinsing dan sebagainya. Membatik ini biasanya dilakukan oleh pembatik dirumahnya. Membatik biasanya dilakukan selama 1-3 bulan, hal ini disebabkan karena membuat adalah pekerjaan sampingan atau sekedar hobby, jadi dilakukan bila ada waktu senggang saja. Tetapi apabila dikerjakan terus, maka membuat ini membutuhkan waktu 3 hari ;

8) dipinggiri, artinya untuk ujung sebelah kiri dan kanan dari mori lebar satu setengah sampai dua centimeter ditutup dengan

malam, hal ini bertujuan supaya bagian tersebut berwarna kuning polos dan tidak ada desain ;

9) dikerek dan direnyek, yaitu alat yang digunakan adalah cawuk,

dibuat dari pelat besi selebar satu setengah meter. Kain wedelan yang hendak dihilangkan malam rengrenannya hendaknya dibasahi dulu dengan air dingin. Bagian yang pertama dikerok adalah bagian rengrenan, hal ini disebabkan karena bagian rengrenan lebih tipis jika dibandingkan dengan lillin/malam bagian terusan. Apabila bagian rengrenan selesai dikerok seluruhnya lalu dikeringkan. Setelah kering lalu bagian terusan dapat mudah dihilangkan dengan cara diuyek/diremas. Ngreyek maksudnya adalah membuat pecah lillin/malam dengan teratur dan rata agar supaya sog dapat masuk dalam lillin/malam ;

10) dikaji dengan pati ubi/tapioka ;

11) dikeringkan, dengan cari diangin-anginkan, tetapi tidak boleh dijemur dengan sinar matahari, karena sog tersebut dapat rusak ;

12) dibatik, biasanya disebut nerusi dan mbironi artinya memperbaiki malam yang rusak dan menutup dengan malam agar supaya bagian tersebut tetap biru/tidak kena sog ;

13) dicelup/diwedel, kain yang akan diwedel dimasukkan ke dalam bak, yang biasanya berukuran dua meter untuk dalamnya dan panjangnya dua meter empat puluh sentimeter serta lebarnya

satu seperempat meter. Bak ini diisi larutan yang telah dicampur dengan obat-obatan celupan ;

(14) dilorod, biasanya nglorod disebut juga mbabar, yaitu membuka corak malam atau menghilangkan malam seluruhnya. Oleh karena malam sifatnya keras, maka untuk menghilangkannya dimasukkan ke dalam air panas ;

(15) disareni, yaitu menyareni dengan air kapur, tujuannya adalah agar sogat tidak luntur. Kain sebelum disareni dengan air kapur harus benar-benar kering ;

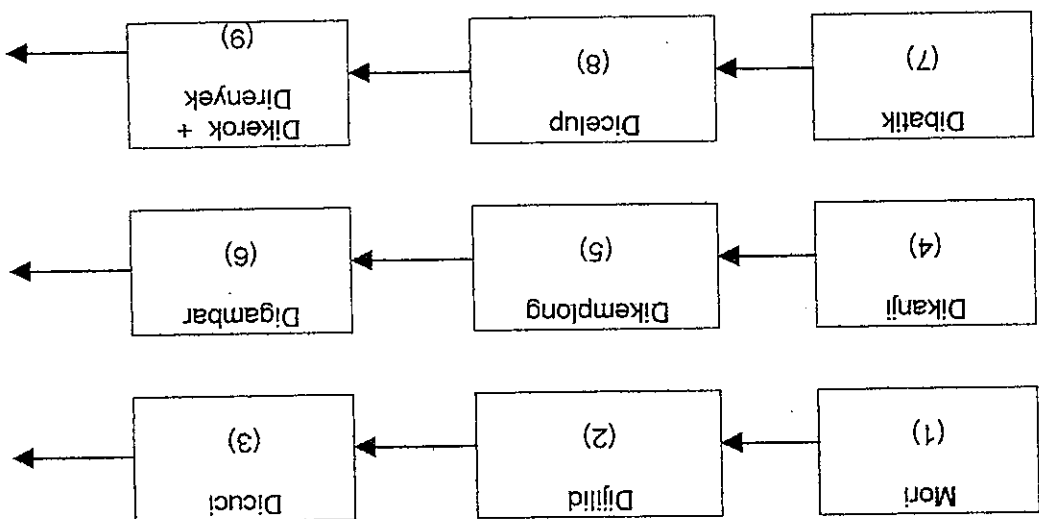
(16) diberi kanji lagi ;

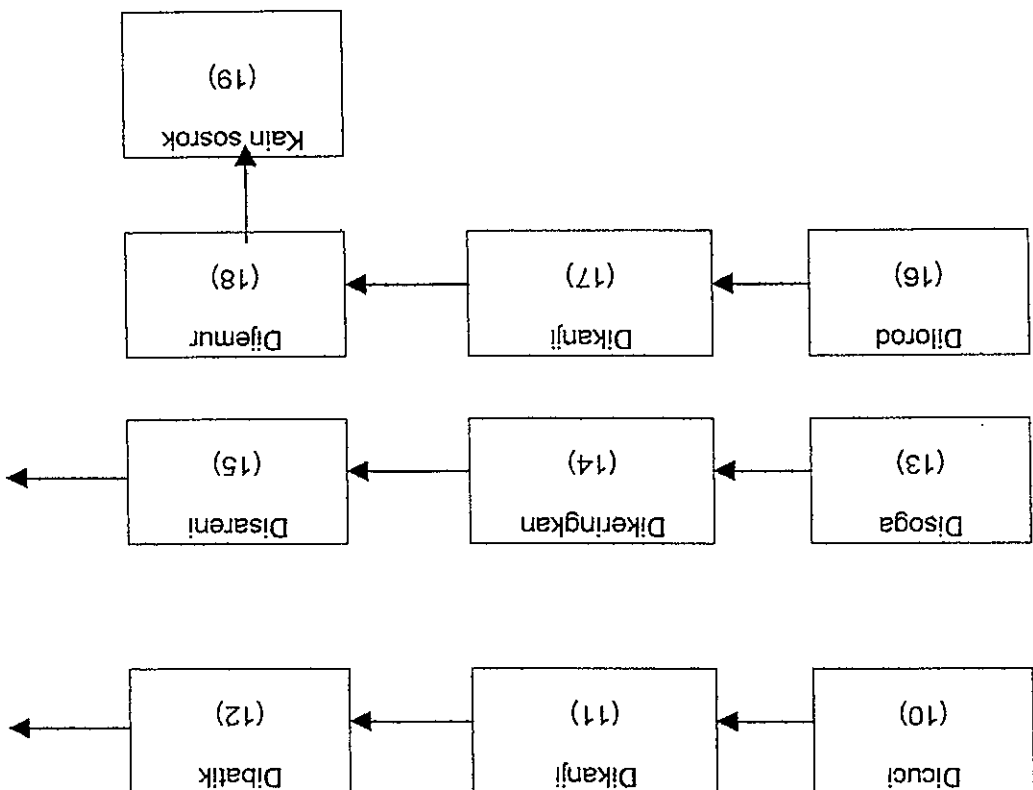
(17) dikeringkan dengan cara dijemur sinar matahari ;

(18) bila sudah kering, maka sudah menjadi kain sosrok.

Untuk lebih jelasnya, maka teknik pembuatan desain kain Batik Banyumasan sosrok, dibuat dalam bagan sebagai berikut ;

Bagan II. Teknik pembuatan desain kain Batik Banyumasan sosrok





Kemudian teknik pembuatan desain kain Batik Banyumasan
Jonas ;

- 1) mori dipotong menurut ukuran yang ditentukan. Potongan tersebut ada yang dua setengah kacu dan ada yang dua seperempat kacu, menurut standar perusahaan ;
- 2) setelah dipotong, lalu dijilid dengan menggunakan mesin jahit pada ujung sebelah kiri dan kanan ;
- 3) dicuci dengan air bersih tujuannya untuk menghilangkan kotoran-kotoran dan sisa-sisa minyak yang masih melekat pada mori ;
- 4) dikarji dengan pati ubi kayu/tapioka ;

5) dikeringkan, baik dijemur menggunakan sinar matahari

maupun diangin-anginkan ;

6) digambar, yaitu pada plangkahannya/buketannya ;

7) dibatik, yaitu pada plangkahannya saja, sedangkan bagian lainnya dipopok, sehingga disebut juga batikan popokan ;

8) dipingiri, artinya untuk ujung sebelah kiri dan kanan dari mori selebar satu setengah sampai dua centimeter ditutup dengan malam, hal ini bertujuan supaya bagian tersebut berwarna kuning polos dan tidak ada desain ;

9) dikerek dan direyek, yaitu alat yang digunakan adalah cawuk, dibuat dari pelat besi selebar satu setengah meter. Kain wedelan yang hendak dihilangkan malam rengrenannya hendaknya dibasahi dulu dengan air dingin. Bagian yang pertama dikerok adalah bagian rengrenan, hal ini disebabkan karena bagian rengrenan lebih tipis jika dibandingkan dengan liliin/malam bagian terusan. Apabila bagian rengrenan selesai dikerok seluruhnya lalu dikeringkan. Setelah kering lalu bagian terusan dapat mudah dihilangkan dengan cara diyek/diremas. Ngreyek maksudnya adalah membuat pecah liliin/malam dengan teratur dan rata agar supaya sogat dapat masuk dalam liliin/malam ;

10) dikani dengan pati ubi/tapioka ;

11) dikeringkan, dengan cari diangin-anginkan, tetapi tidak boleh dijemur dengan sinar matahari, karena sogu tersebut dapat rusak ;

12) dibatik, biasanya disebut nerusi dan mironi artinya memperbaiki malam yang rusak dan menutup dengan malam agar supaya bagian tersebut tetap biru/tidak kena sogu ;

13) dibatik, pada coraknya, misalnya apakah akan diberi corak ukel, grinsing, puger, blarak sinered dan sebagainya (nemboki) dan menutup bagian-bagian yang dibiarakan agar tetap biru tidak terkena sogu (mbironi) ;

14) dilorod, biasanya nglorod disebut juga mbabar, yaitu membuka corak malam atau menghilangkan malam seluruhnya. Oleh karena malam sifatnya keras, maka untuk menghilangkankannya dimasukkan ke dalam air panas ;

15) disareni, yaitu menyareni dengan air kapur, tujuannya adalah agar sogu tidak luntur. Kain sebelum disareni dengan air kapur harus benar-benar kering ;

16) disareni, menyareni di sini tidak dengan air kapur, akan tetapi dengan obat batik, yaitu garam ;

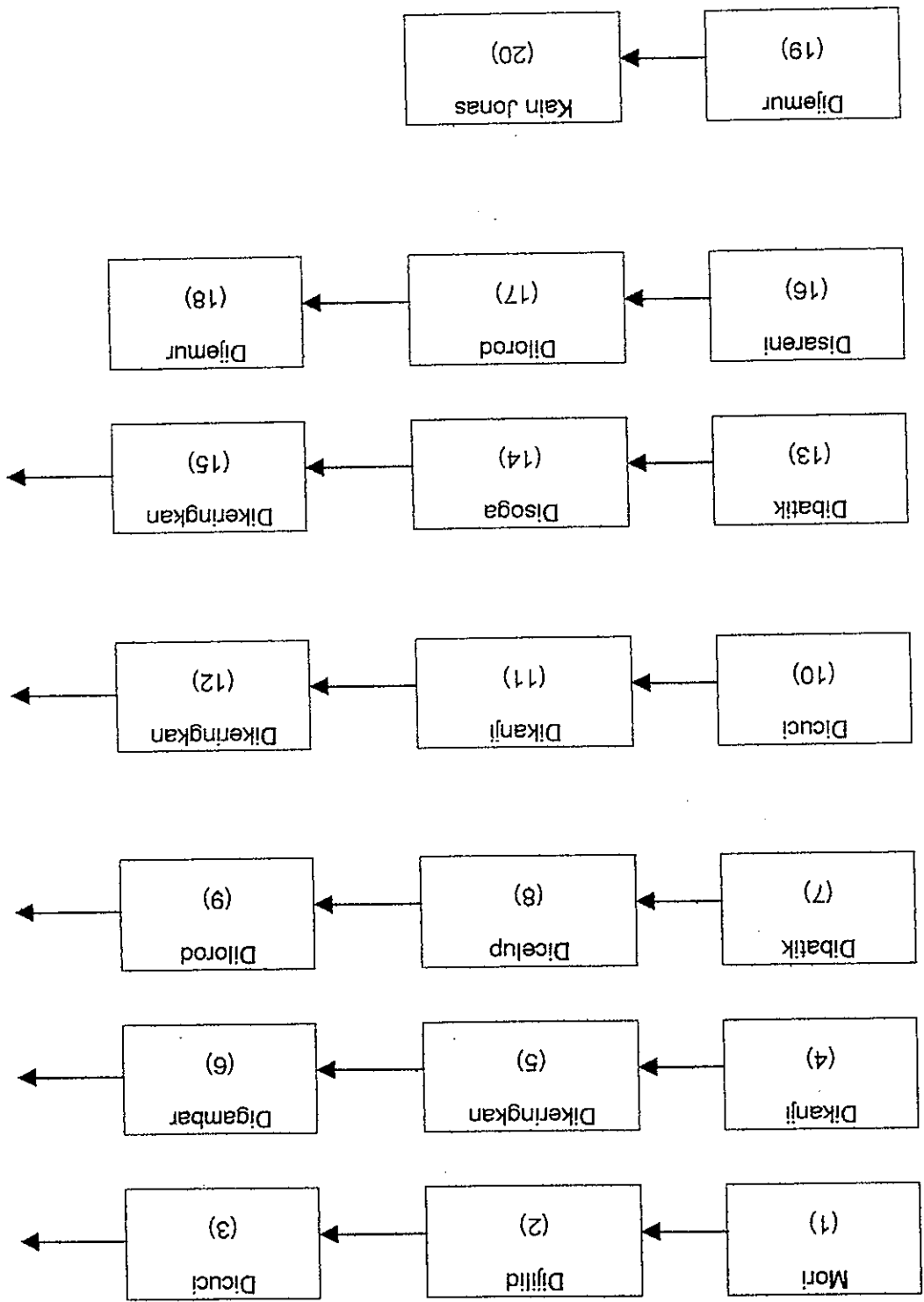
17) diberi kanji lagi ;

18) dikeringkan dengan cara dijemur sinar matahari ;

19) bila sudah kering, maka sudah menjadi kain jonas.

Untuk lebih jelasnya, maka teknik pembuatan desain kain Batik

Banyumasan jonas, dibuat dalam bagan sebagai berikut :



Bagan III. Teknik pembuatan desain kain Batik Banyumasan jonas

Perlindungan sementara yang dilakukan oleh perajin Batik Banyumasan, selain pada penggolongan desain batik dan teknik pembuatan, juga pada bahan-bahan yang digunakan untuk membuat desain kain Batik Banyumasan, antara lain kain mori/white *cambrics*, lilin batik/malam, obat-obatan batik, kapur/gamping dan tepung kanji/tapioka, keterangannya sebagai berikut : ⁹⁷⁾

1) mori (*white cambrics*), jenis mori yang digunakan oleh perusahaan batik dan perajin yang ada di daerah Banyumas, yaitu :

a) mori primissima, jenis mori ini adalah yang paling halus di antara kain mori yang ada, jenis ini dikenal oleh masyarakat dengan istilah mori cap sen/cent.

b) mori prima, mori ini mempunyai ukuran yang sama dengan mori primissima yaitu lebar 42 inch dan panjang 17,5 yards dalam 1 pis, namun mempunyai kualitas di bawah mori primissima. Saat ini mori prima juga ada yang berukuran 35 yards dalam 1 pis.

c) mori biru, mori jenis ini lebih rendah kualitasnya daripada mori prima, berukuran lebar 42 inch dan panjang 48 yards. Banyak perusahaan batik yang menggunakan jenis mori ini, hal ini disebabkan karena harga batik yang

⁹⁷⁾ *Ibid*, wawancara 2-3 Maret 2002.

menggunakan jenis mori ini, sesuai dengan selera dan kemampuan masyarakat golongan menengah ;

d) mori jenis ini adalah yang paling rendah kualitasnya, mempunyai ukuran lebar 95 cm sampai 100 cm, panjangnya tidak tetap sebab dihasilkan oleh perusahaan tekstil yang berbeda-beda, biasa disebut mori meteran, sebab dijual berdasarkan ukuran meter bukan dalam satuan pis.

2) malam batik. Malam batik adalah suatu kumpulan yang terdiri dari ;

a) malam tawon/microwas/ malam bekas, merupakan malam asli dari tawon/lebah. Sifat-sifat dari malam tawon adalah mudah hancur, menghaluskan tapak lilin, tahan lama dan tapak lilin tidak berubah dengan hawa. Karena sulitnya mendapatkan malam tawon dan adanya resiko dimakannya malam tawon oleh sejenis binatang pada waktu disimpan, maka digunakan malam sintetis yang disebut microwas, microwas harganya lebih murah daripada malam tawon dan mempunyai kualitas yang lebih jelek daripada malam tawon. Untuk efisiensi, maka pengusaha juga menggunakan malam bekas kerakan batik dan lebaran waktu melorod, setelah dimasak lagi

untuk menghilangkan kotoran-kotorannya sebagai malam

batik ;

- b) songka, mempunyai sifat-sifat susah larut, mudah melekat, mudah panas dan sering pecah. Songka dahulu merupakan barang impor, tetapi sekarang sudah dapat dihasilkan di dalam negeri.
- c) paraffin, juga disebut lilin putih, mempunyai sifat-sifat mudah hancur, sering lepas dan mengandung minyak ;
- d) kendal/minyak kelapa, mempunyai sifat-sifat mudah hancur dan lemas. Kendal biasanya berasal dari sapi atau kerbau, biasanya dihasilkan oleh daerah Ajibarang dan Kebumen dan harganya murah ;
- e) mata kucing, merupakan getah dari pohon pinus/damar, mempunyai sifat-sifat sukar hancur dan cepat keras.

3) obat-obatan batik, fungsinya untuk memberikan warna pada kain putih/mori. Obat-obatan batik yang praktis adalah warna-warna cat kimia yang diproduksi di Jerman, Inggris, Perancis, Swiss, Belanda dan Jepang. Warna-warna cat kimia ini yang sekarang banyak digunakan oleh perajin Batik Banyumasan. Obat-obatan batik tersebut, antara lain naphthol AS, naphthol AS-G, naphthol AS-D, naphthol AS-OL, naphthol AS-LB, naphthol AS-BG, naphthol AS-GR, naphthol AS-BO, garam kuning G, garam orange GG, garam GR, garam GG, garam

- hitam B, garam merah, garam 3 GL spescial, garam violet B, garam biru B, garam biru B, garam biru BB, caustic soda, turks rood olie/minyak belanda, garuda sog a chrom geel 26262 kuning, garuda sog a chrom geel 26282 kuning, garuda sog a chrom geel 26305 kuning, garuda sog a chrom geel rood 26296 merah, garuda sog a chrom geel bruin 26140 cokelat, garuda sog a chrom zwart 26751 hitam, garuda sog a kuning RN, garuda sog a kuning mas, garuda sog a kuning 16261, garuda sog a kuning 16282, garuda sog a orange R, garuda sog a orange 16094, indigosolgrin 1B, indigosolviolet ABBF, indigosol 04B, garuda sog a orange 16262, garuda sog a merah 16263, garuda sog a merah 16264, garuda sog a merah 16264, garuda sog a bruin 16263, garuda sog a hitam II, indigosoldgelb IRK dan indigosolrosa IR extra ;
- 4) kapur/gamping, supaya sog a yang telah melekat pada kain biron tidak luntur, maka kain biron tersebut harus disareni dengan air kapur. Kapur juga digunakan untuk membuat bahan celepas/wadelan, yaitu dengan ditambah bahan celepas yang lain seperti halnya nila basah atau indigopasta 50 persen dan tunjung ;
- 5) pati ubi kayu/tapioka, digunakan untuk mengkaji kain putih sebelum dicap atau dibatik. Manfaat dari mengkaji adalah :
- a) memperkuat mori agar tidak lembek ;

- b) menahan lilin agar tidak meresap ke dalam benang-
benang ;

- c) memperludah lepasnya lilin dari babaran waktu melorod.
Setelah dilorod kain batik yang sudah jadi, sebelum difinish
harus dikanjil lagi, jadi dalam proses produksi mori mengalami
tiga kali pengkajian, yaitu :

- (1) sekali pada waktu akan dicap/dibatik yang pertama ;
- (2) sekali pada waktu akan dicap/dibatik yang kedua ;
- (3) sekali pada waktu akan difinish.

Menurut para perajin Batik Banyumasan, satu potong kain
batik banyumasan memerlukan rata-rata sebanyak 1 ons
pati.

A.2. Prinsip kebaruan/*novelty* desain industri Batik Banyumasan

Sifat masyarakat Banyumas yang komunal dan menganggap bahwa suatu desain adalah milik bersama, sehingga sangat menyulitkan untuk memenuhi syarat pendaftaran desain industri, yaitu suatu desain yang dihasilkan harus mengandung unsur kebaruan atau *novelty*. Perajin Batik Banyumasan cukup puas bila hasil dari membatik, dapat memenuhi kebutuhan hidup rumah tangganya. Bagi mereka penemuan baru desain batik adalah milik keluarga atau bersama, karena itu tukar menukar desain cap dan desain tulis adalah suatu hal yang lumrah. Perajin Batik

Banyumasan justru merasa bangga bila desainnya dipakai atau dijiplak oleh orang lain, karena bagi mereka dapat membuat terkenal dan sebagai wujud berbagi atau peduli kepada sesama perajin Batik Banyumasan.

Biaya untuk mendaftarkan satu desain yang bagi mereka terasa terlalu mahal, menyebabkan mereka tidak tertarik untuk mendaftarkan desain batiknya. Apalagi bila terdapat masalah dalam proses pendaftaran desain industri, maka biaya satu klaim sebesar Rp. 150.000 juga sangat memberatkan, belum lagi biaya tambahan untuk biaya yang tak terduga. Jelas mereka lebih memilih untuk terus bekerja mencari penghasilan, daripada mengurus pendaftaran desain batiknya. Hal sebenarnya sangat berbahaya, karena perajin Batik Banyumasan belum sepenuhnya menyadari manfaat ekonomi yang ada dalam perlindungan hukum desain industri, sehingga para perajin Batik Banyumasan menengah dan besar yang kebanyakan beretnis Cina, justru banyak memanfaatkan perlindungan HAKI dan bukan tidak mungkin sebentar lagi mereka akan mendaftarkan desain batiknya, hal tentu saja akan mengakibatkan kehancuran perajin Batik Banyumasan tradisional yang tidak mendaftarkan desain mereka.

Produk yang dihasilkan perajin Batik Banyumasan adalah kain batik, namun dihasilkan pula produk-produk , seperti halnya sarung, selendang, jait, baju, ikat kepala, taplak meja, hiasan

dinding, sandaran kursi, sarung bantal, sarung guling, seprei dan sebagainya.

a. Pandangan perajin Batik Banyumasan terhadap kebaruan

(novelty) pada desain batik

Sebagian besar desain batik yang dihasilkan oleh perajin Batik Banyumasan adalah desain batik tulis tradisional. Batik tulis adalah desain ragam hias yang dibuat dengan cara menapakan alat gambar di atas kain, dengan menggunakan canting dan kuas. Tulisan atau penggambaran batik langsung dikendalikan oleh tangan, oleh karena itu batik tulis merupakan hasil kerajinan tangan, sebab faktor keterampilan menulis atau menggambar tergantung pada keterampilan tangan.

Ciri batik tulis tradisional Banyumas dapat dilihat dari beberapa faktor, antara lain adanya penggunaan alat berupa canting dan kuas, bahan, proses dan keterampilan pengrajin. Pada batik tulis, sulit dijumpai pola ulang yang dikerjakan sama persis, karena pasti akan ditemukan perbedaan. Tetapi kekurangan ini merupakan kelebihan dari hasil pekerjaan tangan, karena pada proses pembatikkan sering terjadi gerakan-gerakan spontan yang tidak dipertimbangkan sebelumnya.

Saat ini perajin Batik Banyumasan, banyak menciptakan desain batik tulis Banyumasan modern. Desain batik tulis

Banyumasan modern ini, banyak diproduksi untuk memenuhi selera dan permintaan masyarakat. Sayangnya desain batik tulis modern tersebut, tidak diminatkan pendaftaran perlindungan desain industrinya. Karena para perajin Batik Banyumasan, menganggap bahwa mengurus pendaftaran desain industri, hanya akan membuang-buang uang dan tenaga saja. Padahal mereka membutuhkan uang tunai secara cepat, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Para perajin Batik Banyumasan sudah merasa cukup puas, bila hasil desain batik tulis modern mereka, banyak diminati oleh masyarakat. Mereka tidak mau terlibat dalam urusan birokrasi yang berkepanjangan, hanya untuk mengurus pendaftaran desain industri. Selain itu mereka sama sekali belum memahami, bahwa bila desain batik tulis modern didaftarkan, maka akan memberikan manfaat ekonomi yang lebih pada mereka.

Batik Banyumasan modern merupakan batik tulisan tangan dengan menggunakan desain non-geometris yang terdiri dari ornamen bunga, daun, pohon, binatang, burung garuda dan sebagainya. Desain batik tulis modern juga menggunakan warna hijau, biru violet dan merah untuk ornamen memakai colet dengan kuas. Desain batik tulis modern, antara lain corak sekar jagad, corak wahyu temurun, corak watu sinom, corak suket grinting, corak babon angrem, corak pringsedapur, corak pisanng ball, corak beras wutah dan corak kembang wijayakusuma. Untuk mempermudah

melihat ragam desain kain Batik Banyumasan modern, ditampilkan dalam bentuk tabel sebagai berikut;

Tabel IV. Ragam desain kain Batik Banyumasan modern

No	Ragam corak kain Batik Banyumasan modern
1	Sekar jagad
2	Wahyu temurun
3	Watu sinom
4	Suket griting
5	Babon angrem
6	Pringsedapur
7	Pisang bali
8	Beras wulah
9	Kembang wijayakusuma

Selain menghasilkan desain batik modern, perajin Batik Banyumasan, juga menciptakan desain batik baru, yaitu batik gaya bebas atau gaya baru. Gambar pada batik ini diperoleh dari gambar yang pola dasarnya dibuat dari lukisan lilin pada kain tersebut dan kemudian diselesaikan secara batik, yaitu diberi isen-isen, sesek, ukel dan garis-garis atau sesuatu ornamen, sehingga batik ini mendekati/mirip seperti lukisan. Perkembangan lebih lanjut dari batik gaya baru adalah kain lukisan, yang dalam pembuatannya bukan lilin yang dilukiskan, tetapi langsung pewarnaanya.⁹⁸⁾

98) Teguh Djivanto, *Analisis Faktor-Faktor Penghambat Pengembangan Batik Tradisional di Kabupaten Dati II Banyumas dan Pekalongan*, FE Unsoed, Purwokerto, 1989, hal 19.

Dampak kehadiran teknologi batik printing besar sekali terhadap masalah penjiplakkan/pembajakan, hasil produksi dan penggunaan tenaga kerja. Teknologi batik printing tersebut dapat menghasilkan desain hasil jiplakkan/bajakan dengan kualitas yang baik, harga lebih murah, meningkatkan kapasitas produksi dan

b. Masalah penjiplakkan/pembajakan desain batik yang dihadapi oleh perajin Batik Banyumasan

Desain batik tulis Banyumasan modern dan gaya baru, sulit dibuat secara massal dan dengan standar ketepatan yang sama, sehingga apabila batik dikerjakan oleh banyak orang, maka akan terjadi perbedaan-perbedaan sekalipun sudah dilakukan penyunggingan sebelumnya. Usaha untuk mendekati kesamaan adalah dengan melakukan spesialisasi, misalnya untuk membuat isen-isen, klowongan, popokan, dodosan dan tonyok, masing-masing diserahkan kepada orang tertentu. Walaupun cara tersebut dilakukan, tetap akan ada perbedaan, misalnya pada ketebalan, tarikan atau lengkungan garis dan runtutan titik. Hal ini masih ditambah lamanya proses pembatikan, maka peluang adanya perbedaan akan semakin terbuka, sebab pembuatan batik banyak terpengaruh oleh cuaca, baik pada saat batik harus diangin-anginkan, dijemur, maupun pada saat diberi malam.

menghemat tenaga kerja. Untuk mendirikan satu unit usaha pembatikan printing diperlukan modal yang sangat besar, sehingga hanya pengusaha besar saja yang mampu mendirikan usaha batik printing.

Perkembangan teknologi printing banyak menimbulkan keluhan terutama bagi perajin Batik Banyumasan tulis dan maupun batik cap. Keunggulan teknologi printing sebenarnya terletak pada kemampuan menghasilkan jumlah produksi yang tinggi dengan biaya produksi yang murah. Secara umum keterampilan membuat diperoleh secara turun menurun. Namun sekarang dengan kehadiran teknologi batik printing, maka penguasaan terhadap keterampilan membuat derajat kepentingannya menjadi nisbi. Proses penyebaran keterampilan membuat batik berubah, sekarang keterampilan yang disebarkan lebih ke penyebaran penguasaan teknologi batik printing dan dilakukan secara formal melalui berbagai jenis pendidikan, misalnya untuk keterampilan menggambar atau membuat desain, dengan adanya teknik fotocopy maka berbagai jenis desain yang paling sulit sekalipun sekarang bisa dijiplak/dibajak dengan mudah.

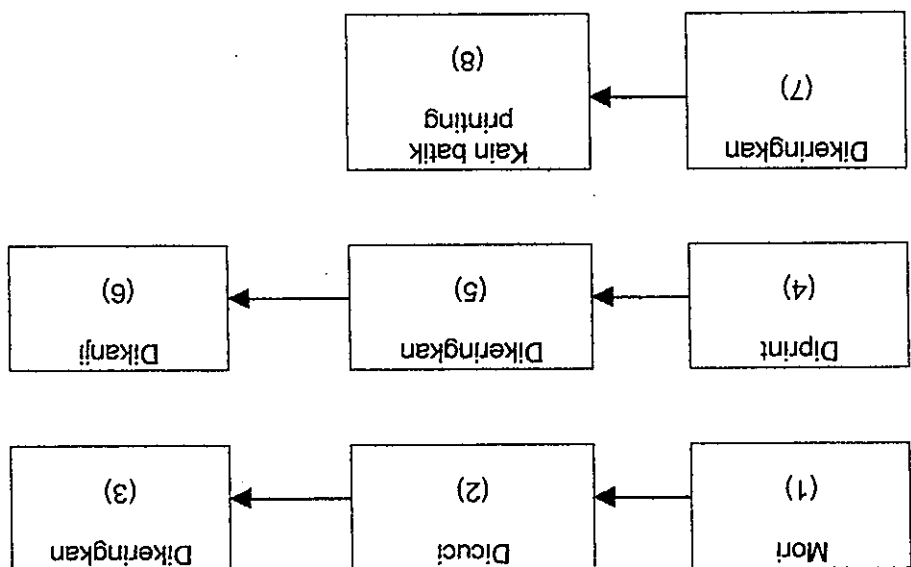
Biasanya usaha batik printing dilakukan oleh pengusaha Batik Banyumasan menengah dan besar, karena membutuhkan modal yang cukup besar. Batik printing ini bisa diproduksi lebih banyak, mempunyai mutu yang cukup baik, harga yang murah dan

tahan lama. Batik printing juga mampu menjiplak desain paling sulit sekali pun, sehingga kalangan awam sangat sulit membedakan antara batik printing dengan batik tulis dan batik cap. Terkecuali untuk keterampilan warna masih mempunyai posisi yang sangat penting dalam industri perbatikan.

Teknik pembuatan desain batik printing lebih sederhana, bila dibandingkan dengan proses batik tradisional. Adapun prosesnya sebagai berikut ; ⁹⁹⁾

- 1) mori yang akan digunakan terlebih dahulu dicuci dengan typol ataupun tanpa typol bila dipandang sudah cukup bersih, setelah dicuci dikeringkan/dijemur ;
- 2) mori yang sudah dibersihkan tersebut direntang pada bantalan printing ;
- 3) dilakukan proses printing sesuai dengan desain yang diinginkan;
- 4) setelah proses printing dilakukan, kain diangkat dari bantalan printing untuk selanjutnya dijemur ;
- 5) setelah dijemur beberapa saat, kemudian dikanti dan dikeringkan lagi ;
- 6) selanjutnya disetrika, lalu dikemas dan siap untuk dipasarkan.

Bagan IV. Teknik pembuatan kain batik printing/sablon



Adanya teknologi batik printing harus diakui tidak selalu merugikan, disatu pihak memang akan menisbikan penguasaan keterampilan membuat tulis, misalnya pada saat yang sama orang juga dituntut atau harus menguasai keterampilan baru, yaitu teknik printing. Di pihak lain, dilihat dari segi kualitas hasil produksi, teknologi produksi batik printing mampu menghasilkan kain batik yang sama kualitasnya dengan batik tulis atau cap. Sekarang orang awam akan kesulitan membedakan mana batik tulis, mana batik printing. Bahkan terkadang mata telanjang seorang pakar batik pun sulit membedakannya. Karena batik printing sanggup menjiplak desain batik tulis dan batik cap, sampai sama mirip dengan yang asli dan dengan kualitas yang lebih baik.

Sebagian besar desain batik printing jelas-jelas menjiplak/membajak batik tulis dan batik cap tradisional, yang dibuat oleh para perajin batik banyumasan. Sebenarnya batik tulis dan batik cap tradisional, lebih unggul karena memiliki kebhinekaan desain, ketajaman tapak garis dan titik, serta dibuat bolak-balik. Desain batik tulis dan cap tradisional, memiliki unsur artistik yang dibuat secara rinci cukup mengagumkan. Keunggulan desain batik tulis dan batik cap tradisional terletak pada kemampuan artistik dan imajinasi dari perajinnya. Sikap masyarakat sebagai konsumen pada batik printing mendua, dari sisi artistik konsumen menolak batik printing, tetapi dari sisi harga konsumen tertarik dengan batik printing. Bagi konsumen kalangan menengah ke atas, adanya batik printing tidak berpengaruh banyak, tetapi bagi kalangan menengah ke bawah adanya batik printing sangatlah berpengaruh.

c. Pelaksanaan dan sosialisasi desain industri pada perajin Batik

Banyumasan

Perkembangan desain batik mempunyai dua kecenderungan, yaitu batik tradisional dan batik inovasi. Batik tradisional masih dibuat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang setia menjadi peminatnya, sedangkan batik inovatif dibuat untuk memenuhi kebutuhan akan mode, yang mengangkat sandang dan kebutuhan interior.

Perkembangan batik tradisional mengalami masa pasang surut, walaupun demikian peminatnya masih cukup banyak, untuk batik tulis halus biasanya banyak disukai kalangan menengah ke atas, sedangkan batik cap dengan desain baru biasanya banyak disukai oleh kalangan menengah ke bawah.

Beberapa hal yang coba dilaksanakan oleh Disperindagkop Kabupaten Banyumas dalam upaya praktek pembinaan dan pengembangan desain industri, walaupun belum secara langsung pada perajin Batik Banyumasan, antara lain :¹⁰⁰⁾

- 1) mengadakan pelatihan yang terkait dengan desain produk ;
- 2) mengadakan penyuluhan dan pembinaan tentang pentingnya identitas produk yang memberikan kesan mudah diingat, kesan positif dan tepat untuk promosi, sehingga terhindar dari kemungkinan pemalsuan ;
- 3) mengadakan pembinaan upaya peningkatan mutu produk usaha kecil ;
- 4) mengadakan pelatihan upaya peningkatan mutu standar kerja sesuai dengan aturan yang telah diterapkan ;

5) mengadakan pembinaan peningkatan kemampuan teknologi produksi sehingga mampu mengembangkan desain industri dan teknologi baru.

Tetapi sayang semua hal yang dilakukan Disperindagkop Kabupaten Banyumas, masih terbatas pada rencana dan wacana,

¹⁰⁰⁾ Wawancara dengan Disperindagkop Kabupaten Banyumas, pada tanggal 4-5 Maret 2002.

sehingga masih ditunggu pelaksanaan secara nyata di lapangan. Sedikitnya tenaga ahli masalah desain industri dan keterbatasan dana, menjadi masalah utama terhadapnya sosialisasi desain industri pada perajin Batik Banyuwasan.

Selain aparat Disperindagkop Kabupaten Banyumas, aparat Kejaksaan Kabupaten Banyumas juga mencoba menyelenggarakan fungsi pelaksanaan penegakan hukum baik represif maupun preventif di bidang desain industri. Secara represif adalah melakukan penuntutan dalam perkara pidana desain industri (Pasal 54 ayat 1 dan 2 UUD), karena tindak pidana terhadap desain industri merupakan delik aduan. Delik aduan adalah delik yang hanya bisa dituntut oleh pihak yang menderita kerugian, bila mengajukan pengaduan. Delik pengaduan hanya terdiri atas kejahatan, sedangkan pengaduan terhadap pelanggaran tidak dikenal. Secara preventif, aparat Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan seperti upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat di bidang desain industri, seperti halnya melakukan penyuluhan dan penerangan hukum, serta pengamanan kebijaksanaan dalam penegakkan hukum desain industri.¹⁰¹⁾

Rencana kejaksaan Kabupaten Banyumas dalam penyelenggaraan fungsi penegakkan hukum secara represif dalam

¹⁰¹⁾ Zainuddin Jahisa, *Peran Jaksa Dalam Penegakan Undang-Undang Desain Industri dan Merek, Masalah Seminar Nasional Implementasi Undang-Undang Desain Industri dan Merek*, Surakarta, 2002, hal 5.

bidang desain industri, dirasakan sangat kurang tepat. Karena selain masih baru, desain industri membutuhkan sosialisasi yang maksimal pada masyarakat, karena banyak yang belum mengetahui dan memahami. Masalah desain industri alangkah baiknya, tidak hanya dilihat dari sisi hukum saja sehingga dilakukan secara represif, tetapi harus memperhatikan sisi ekonomi, perindustrian dan perdagangan, serta sosial dan budaya masyarakat, sehingga masalah desain industri dapat ditangani secara maksimal.

A.3. Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh pengusaha Batik Banyumasan untuk melindungi desain industrinya

Sikap perajin Batik Banyumasan yang apatis terhadap aparat pemerintah yang bertanggung jawab pada masalah HAKI menjadi masalah yang cukup berat untuk diselesaikan. Peran Penda Kabupaten Banyumas, Disperindagkop Kabupaten Banyumas dan Ditjen HAKI, yang terkesan lamban dan seadanya dalam mengadakan sosialisasi, penyuluhan dan pelatihan terhadap masalah HAKI pada umumnya dan desain industri pada khususnya, menjadi masalah yang cukup sulit untuk diatasi.

Perajin Batik Banyumasan merasa tidak mendapat cukup perhatian dari aparat pemerintah tersebut dan berbagai keluhan juga ditanggapi dengan sikap kurang memuskan, menyebabkan mereka enggan berurusan dengan aparat pemerintah. Dengan

adanya kendala tersebut, maka perajin Batik Banyumasan mengalami kesulitan untuk melindungi desain batiknya. Permasalahan perajin Batik Banyumasan dapat dikelompokkan antara lain :

- a) pemahaman HAKI pada umumnya, khusus pada desain industri rendah ;
- b) tidak mempunyai modal yang cukup untuk mengurus pendaftaran desain batiknya ;

- c) sosialisasi desain industri dari aparat terkait yang lemah ;
- d) adanya penurunan jumlah perusahaan batik banyumasan ;
- e) jumlah perajin/pekerja batik banyumasan yang semakin menurun ;

- f) jumlah produk yang dihasilkan semakin menurun ;

- g) adanya penurunan kualitas produk ;

- h) adanya penurunan konsumen pada batik tradisional ;

- i) munculnya pesaing baru, yaitu batik printing/sablon.

Selanjutnya akan disajikan berbagai permasalahan dan hambatan dari perajin batik banyumasan, untuk melindungi desain batiknya.

a. Keterbelakangan perajin Batik Banyumasan dalam menjalankan usahanya

Keterbelakangan industri Batik Banyumasan dapat terlihat dari gambaran umum perajin, pedagang dan konsumen Batik Banyumasan, diantara mereka tercipta hubungan yang saling mempengaruhi satu sama lain.¹⁰²⁾

Gambaran umum perajin Batik Banyumasan, antara lain :

1) sebagian besar dari perajin Batik Banyumasan adalah wanita, dan biasanya mereka mengerjakan batik tulis tradisional. Kegiatan yang biasa dilakukan oleh perajin Batik Banyumasan wanita adalah membuat plangkah, mbironi, nerosi dan ngerok. Sedangkan sebagian kecil perajin Batik Banyumasan adalah pria, biasanya mereka melakukan pekerjaan mengecap, menyoga, medel, ngerok dan mbabar;

2) sebagian besar dari perajin Batik Banyumasan adalah berusia di atas 40 tahun, sedangkan sisanya adalah berusia 20 tahun ke atas. Kebanyakan kaum muda tidak menyukai pekerjaan, sebagai perajin Batik Banyumasan, hal ini disebabkan karena membuat membutuhkan ketelitian, kesabaran, kerajinan dan seni yang tinggi, padahal untuk itu semua terkadang mendapat

102) Penelitian di lapangan pada perajin, pedagang dan konsumen batik banyumasan di daerah Sokaraja, Banyumas dan Purwokerto, 8-10 Maret 2002.

upah/penghasilan yang kurang memadai. Beberapa pemuda memang menekuni sebagai perajin Batik Banyumasan, hal disebabkan karena mereka harus meneruskan usaha batik orang tuanya, yang diwariskan secara turun menurun dan mereka pula yang saat ini berusaha menciptakan dan mencari desain baru ;

3) sebagian besar keterampilan membuat, diwariskan secara turun menurun dari orang tua mereka, sedangkan sebagian kecil belajar membuat sendiri, pada sanak keluarga dan ikut pada perajin batik yang sudah senior ;

4) sebagian besar perajin Batik Banyumasan, mempunyai tingkat pendidikan SD sampai SMP (biasanya sudah menjadi perajin batik lebih dari 10 tahun) dan sebagian kecil SMA sampai Sarjana (biasanya menjadi perajin kurang dari 5 tahun) ;

5) sebagian besar perajin Batik Banyumasan melaksanakan kegiatan usaha di rumah sendiri, hanya beberapa perajin saja yang mengerjakan batik tidak di rumah.

Dari gambaran umum perajin Batik Banyumasan tersebut diatas, maka akan terlihat bahwa kekurangan kemampuan perajin Batik Banyumasan, untuk beradaptasi dengan perkembangan zaman, menjadi salah satu penyebab tertinggalnya Batik Banyumasan tradisional.

- Gambaran umum pedagang Batik Banyumasan, antara lain :
- 1) pedagang batik yang merangkap perajin batik, yaitu pedagang batik yang memasarkan produk yang dibuatnya, dengan produk perajin daerah lain sebagai produk pedamping ;
 - 2) pedagang batik yang bukan perajin batik, yaitu pedagang batik yang membeli secara kulakan pada perajin batik, baik itu Batik Banyumasan maupun batik daerah lain dan menjual baik batik tulis, batik cap, maupun batik printing/sablon ;
 - 3) pedagang Batik Banyumasan, biasanya menempati lokasi, yaitu rumah sendiri, kios, toko, pasar, dipasarkan dari rumah ke rumah dan ke luar daerah ;
 - 4) pedagang Batik Banyumasan, dapat digolongkan menjadi pedagang besar, menengah dan kecil ;
 - 5) biasanya selain menjual Batik Banyumasan, mereka juga menjual batik Solo, Jogja, Tasikmalaya, Wonogiri, Cirebon, Pekalongan, Lasem, Tegal dan sebagainya ;
 - 6) pendidikan para pedagang batik, sebagian besar SD sampai SMP, sisanya adalah SMA dan Sarjana ;
 - 7) sebagian besar kegiatan perdagangan batik adalah warisan dari orangtuanya (sudah berdagang lebih dari 10 tahun),

sedangkan sisanya adalah merintis sendiri (baru berdagang

kurang dari 5 tahun) ;

8) menurut para pedagang Batik Banyumasan, batik yang banyak terjual adalah batik printing/sablon, baru kemudian batik cap dan batik tulis.

Gambaran umum konsumen Batik Banyumasan, antara lain ;

1) sebagian besar konsumen kain batik pada umumnya adalah orang tua, hanya sebagian kecil adalah kaum muda, itu pun membeli batik yang tidak berbentuk kain atau sarung ;

2) sebagian konsumen batik di daerah Banyumas, membeli kain Batik Banyumasan, seperti konsumen membeli batik Solo, Jogja dan Pekalongan, sisanya membeli batik dari daerah lain ;

3) biasanya batik dipakai atau digunakan pada saat resepsi pernikahan, hari besar nasional, hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, perkantoran, seragam sekolah, acara adat dan sebagainya ;

4) telah terjadi erosi dari desain Batik Banyumasan, yaitu dari sekitar 115 jumlah desain Batik Banyumasan, yang dikenal dan biasa dipakai konsumen hanya 43 desain Batik Banyumasan. Desain Batik Banyumasan yang banyak dikenal dan biasa dipakai konsumen, yaitu sidamukti, udan

liris, parang rusak, truntum, parang kusuma, barang, kawung picis, sekar jagat, parang curiga, semen romo, kembang gedang, cewiri, sida luhur, kawung beton, blaburan, kopi pecah, tirta tejo, wirasat, parikesit, parang barang, suket grinting, latar putih, parang kilik, gedong kosong, rujak sente, latar ireng buketan, pugur, daun keladi, retno wulu, ceplok, baris kondur, blarak sinered, nitik, ula nglangi seling barong, wahyu temurun, banji, limaranjahe selimpang, beras wutah, gandasuli, waljinah, grinsing dan pring sedapur.

Untuk mempermudah melihat ragam desain kain Batik Banyumasan yang belum terkena erosi dan masih dikenal oleh masyarakat, maka akan ditampilkan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Tabel V Ragam desain kain Batik Banyumasan yang masih dikenal oleh masyarakat

No	Ragam corak kain Batik Banyumasan yang masih dikenal oleh masyarakat
1	Sida mukti
2	Udan liris
3	Parang rusak
4	Truntum
5	Parang kusuma
6	Barong
7	Kawung picis

8	Sekar jagad
9	Parang curiga
10	Semen room
11	Kembang gedang
12	Cewiri
13	Sida luhur
14	Kawung beton
15	Blaburan
16	Kopi pecah
17	Tirto tejo
18	Wirasat
19	Parikesit
20	Parang barong
21	Suket griting
22	Latar putih
23	Parang kilik
24	Gedong kosong
25	Rujak sente
26	Latar ireng buketan
27	Puger
28	Daun keladi
29	Retno wulu
30	Ceplok
31	Baris kondur
32	Blarak sinered
33	Nitik
34	Ula nglangi seling barong

35	Wahyu temurun
36	Banji
37	Limaran
38	Jahe selimpang
39	Beras wutah
40	Ganda suli
41	Waljinah
42	Grinsing
43	Pring sedayur

Adanya gambaran dari perajin, pedagang dan konsumen Batik

Banyumasan tersebut, memperlihatkan bahwa saat ini telah terjadi keterbelakangan pada industri Batik Banyumasan. Selain masalah tersebut, masih ada pula alasan-alasan sebagian besar masyarakat yang tidak mau lagi membeli kain Batik Banyumasan dan alasan-alasan sebagian kecil masyarakat yang masih setia membeli kain Batik Banyumasan.

Alasan-alasan masyarakat tidak mau mengenakan atau membeli kain Batik Banyumasan antara lain ; ¹⁰³⁾

1) sebagian besar mengatakan bahwa harga kain batik lebih mahal daripada bahan-bahan yang lain ;

2) menggunakan kain batik dirasakan kurang praktis, terlalu resmi, perawatannya sulit dan takut dianggap sudah tua dan bagi kaum muda merasa tidak trendi ;

¹⁰³⁾ *Ibid*, penelitian 8-10 Maret 2002.

3) membuat baju atau rok dari bahan kain batik, apabila bahannya kurang sedikit saja, tetap harus membeli satu lembar kain batik, juga bagi pembeli wanita untuk pola desain tertentu misalnya lereng agak sulit untuk mengatur polanya, apabila bahan tersebut akan dibikin baju atau rok.

Alasan-alasan masyarakat untuk memilih dan membeli batik printing adalah :

1) harga yang ditawarkan cukup murah dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat ;
 2) banyak memiliki pilihan desain, serta diproduksi dalam jumlah yang banyak ;

3) desain yang dihasilkan lebih rapi, sehingga cukup menarik ;
 4) mempunyai banyak pilihan warna dan warna yang dihasilkan lebih cerah ;

5) mudah dipasarkan dan persediaan barang yang cukup banyak ;
 6) desain mengikuti selera pasar/konsumen ;

7) desain dapat untuk berbagai kalangan usia

Sedangkan alasan-alasan masyarakat yang masih membeli dan memakai batik tradisional Banyumasan adalah sebagai berikut;

1) mempunyai daya seni tersendiri dan khas ;
 2) lebih awet atau tahan lama ;
 3) mempunyai kualitas mutu produk yang lebih baik ;
 4) sudah mempunyai peminat yang fanatik ;

5) adanya faktor kebanggaan/prestise bila memakainya ;

6) membantu perajin batik dalam melangsungkan usahanya, karena kebanyakan dari perajin batik adalah masyarakat kecil ;

7) bila dipakai lebih terasa nyaman dan dingin ;

8) sering digunakan untuk upacara adat/keagamaan ;

9) merupakan bagian dari kekayaan budaya dan adat.

Hal-hal tersebut menjadi tantangan bagi perajin batik tradisional banyumasan, untuk segera berbenah dari segala bentuk keterbelakangan dan ketinggiannya dari perkembangan zaman.

b. Pengelolaan usaha batik oleh perajin Batik Banyumasan

Dalam mengelola industri Batik Banyumasan tradisional, biasanya para pengusaha dan perajin Batik Banyumasan, masih menggunakan management keluarga. Perusahaan batik adalah orang-orang yang memproduksi batik dengan menggunakan atau memiliki meja untuk menggecap dan alat-alat untuk membuat tulis, sedangkan yang hanya memiliki alat-alat untuk membuat tulis saja, disebut perajin. Saat ini terjadi penurunan jumlah pengusaha dan perajin Batik Banyumasan, hal disebabkan antara lain karena tidak mempunyai kemampuan mengelola perusahaan dengan baik. Penurunan jumlah pengusaha dan perajin Batik Banyumasan, disebabkan karena faktor-faktor, antara lain ; ¹⁰⁴⁾

¹⁰⁴⁾ Teguh Djiwanto, *op.cit.*, 1989, hal 61.

1) hampir sebagian bentuk perusahaan Batik Banyumasan, merupakan usaha kecil atau industri rumah tangga ;

2) perusahaan batik banyumasan, dalam mengelola usahanya menggunakan management keluarga dan tanpa adanya pembukuan yang jelas, baik itu mengenai masalah keuangan, maupun masalah desain batik, cara pembuatan, percampuran warna, perwana yang digunakan, semuanya tidak ada yang tertulis dan tersusun secara sistematis ;

3) hampir semua perajin Batik Banyumasan adalah meneruskan usaha keluarga, yang diwariskan secara turun menurun, sehingga mereka tidak mempunyai gairah atau semangat untuk meneruskan dan mengembangkan usahanya, sehingga bila mereka menemui kendala atau hambatan, maka mereka lebih memilih menutup usahanya dan berpindah ke lapangan pekerjaan yang lain ;

4) tersendatnya proses regenerasi atau peremajaan kepada perajin yang muda, mereka lebih memilih untuk bersekolah di luar kota dan setelah selesai mereka tidak mau kembali untuk meneruskan usaha orang tuanya, tetapi mencari pekerjaan di kota besar yang lebih menjanjikan ;

5) munculnya batik printing pada tahun 1970-an, memukul usaha Batik Banyumasan tradisional, karena jumlah produksi dan

pemasaran yang terus merosot, sehingga banyak yang menutup

usahanya ;

6) kurangnya kemampuan perajin Batik Banyumasan dalam menangani masalah organisasi perusahaan dan tidak adanya

modal usaha ;

7) minimnya perhatiannya dari Pemda dan aparat terkait, sehingga perajin Batik Banyumasan, menjadi sangat apatis terhadap pemerintah ;

8) kurangnya penyuluhan, pembinaan dan pelatihan terhadap usaha kecil Batik Banyumasan ;

9) rendahnya pemahaman mereka tentang Hak Atas Kekayaan intelektual pada umumnya dan desain industri pada khususnya.

Secara garis besar perajin Batik Banyumasan, dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu :

1) perajin pemilik, yaitu perajin yang dengan modal sendiri membuat batik ;

2) perajin pengobeng, yaitu perajin yang bersifat ngobeng atau bekerja dengan memperoleh upah dari pengusaha, jadi statusnya adalah sebagai buruh.

Para perajin Batik Banyumasan mempunyai pekerjaan yang bervariasi, kebanyakan dari mereka bekerja di sektor pertanian, yaitu sebagai petani padi dan palawija, serta buruh tani. Sedangkan yang lainnya bekerja sebagai peternak, pedagang hasil bumi, sandang

termasuk batik, kebutuhan rumah tangga dan sembako. Usaha kerajinan Batik Banyumasan, kebanyakan hanya merupakan pekerjaan sampingan untuk menambah penghasilan mereka, mengisi waktu senggang dan menyalurkan hobi atau kegemaran saja.

c. Pengaruh kebijaksanaan pemerintah pada industri Batik

Banyumasan

Adanya kebijaksanaan pemerintah untuk melaksanakan program pembangunan dengan menitikberatkan pada peningkatan pendapatan nasional yang tinggi, telah menyebabkan efek negatif pada industri kecil Batik Banyumasan. Akibat negatif muncul disebabkan kurang jelasnya batasan dalam pengelompokan industri, serta batasan macam produk yang termasuk dalam industri perbatikan sehingga keadaan pasar batik menjadi ruwet.

Industri kecil Batik Banyumasan, terpaksa bersaing dengan industri besar yang mempunyai biaya produksi rendah. Target pertumbuhan produk tekstil daerah dan nasional dapat dicapai, tetapi pengaruh negatif dengan berkurangnya jumlah industri kecil Batik Banyumasan, menyebabkan banyak tenaga kerja Batik Banyumasan kehilangan lapangan pekerjaan.

Berkembangnya industri kecil Batik Banyumasan, sangat bergantung pada tenaga kerja sampingan yang berkaitan erat dengan pertanian. Berkurangnya jumlah kegiatan di luar usaha pertanian

menyebabkan kesinambungan antara pertanian dengan kegiatan di luar usaha pertanian menjadi terputus. Padahal pertanian sendiri dengan adanya teknologi baru, telah mengalami kejenuhan dalam menyediakan lapangan pekerjaan, sehingga kesempatan bekerja di pedesaan semakin terbatas. Oleh karena itu pendapatan petani dan daya beli masyarakat pedesaan, yang pada umumnya merupakan pembeli utama Batik Banyuwasan tradisional, menurun sehingga mempersulit perajin batik dan pedagang Batik Banyuwasan untuk memasarkan hasilnya.

Dari penelitian di lapangan, pemasaran batik tulis dan batik cap, maupun produk batik tradisional yang lain semakin lesu. Beberapa hal yang mempengaruhi lesunya pemasaran produk batik, antara lain;

1) adanya persaingan produk batik tradisional dengan industri batik printing, terutama di kota besar yang memiliki teknologi tinggi, sehingga biaya produksi per unitnya murah, harga produk batik printing yang murah mempengaruhi selera masyarakat, termasuk masyarakat pedesaan yang selama ini menjadi konsumen utama produk batik tradisional, murahanya harga produk batik printing menyebabkan konsumen batik tradisional berpindah, sehingga permintaan pada produk batik tradisional hasil kerajinan rakyat menjadi berkurang :

- 2) produk batik tradisional, khususnya batik tulis, biasanya mempunyai desain yang tidak berkembang, sehingga permintaan masyarakat/konsumen tidak terpenuhi ;
- 3) permintaan pada produk batik tradisional biasa berfluktuasi, pada bulan-bulan tertentu saja dalam sepanjang tahun, misalnya pada saat lebaran, lebaran haji, pernikahan dan acara adat ;
- 4) perajin batik tradisional yang mempunyai modal usaha yang kecil, tidak mampu untuk melakukan kegiatan usaha sepanjang tahun secara teratur, sehingga tingkat pekerjaan disesuaikan dengan kemampuan modal mereka, pada saat permintaan tinggi maka mereka baru memulai kembali usaha mereka ;
- 5) perajin batik tradisional kesulitan untuk memperoleh tenaga kerja pada bulan-bulan tertentu saat permintaan tinggi, hal ini disebabkan karena industri besar yang mempunyai modal lebih besar dan mampu memproduksi sepanjang tahun, mengambil tenaga kerja dari perajin batik tradisional dengan upah yang lebih tinggi, hal ini menyebabkan perajin tradisional harus menutup usahanya karena tidak mampu memberikan upah tinggi dan kekurangan tenaga kerja ;
- 6) menurunnya daya beli masyarakat/konsumen batik, hal ini disebabkan karena ;
 - a) krisis multi dimensional yang masih melanda negeri ini ;
 - b) tingginya harga bahan-bahan kebutuhan pokok ;

- c) dicabutnya berbagai macam subsidi yang menyangkut penghidupan masyarakat banyak ;
- d) juga terbatasnya lapangan pekerjaan yang tersedia, sehingga

terjadi penumpukan pengangguran.

Alasan utama yang dikemukakan oleh para pengusaha Batik

Banyumasan adalah ketidakmampuan mereka menghadapi persaingan dengan industri batik printing, seiring dengan kebijaksanaan pemerintah yang berpihak pada industri batik besar.

Masa keemasan industri kecil Batik Banyumasan adalah tahun 1950- an sampai 1970-an, saat itu batik tulis dan batik cap laku keras, pada saat itu walaupun terjadi persaingan keras, permintaan batik tulis dan batik cap di pasaran masih cukup banyak sehingga pengusaha tetap mampu memproduksi kedua jenis produk tersebut dengan penuh.

Situasi berubah sesudah tahun 1970-an dengan munculnya industri batik printing, dampak munculnya batik printing sangat dirasakan oleh pengusaha industri batik kecil yang kebanyakan menghasilkan batik tulis kasar dan cap. Rendahnya kualitas produk mereka tidak mampu menyaingi produk industri batik printing yang berkualitas lebih tinggi. Situasi menjadi lebih parah karena adanya proteksi yang dilakukan oleh negara-negara yang semula mengimpor batik dari Indonesia untuk melindungi industri batik dalam negeri mereka, misalnya Malaysia, hal ini menyebabkan pasar batik di dalam negeri menjadi jenuh.

Untuk mengatasi masalah tersebut, maka para pengusaha industri kecil Batik Banyumasan banyak melakukan hal-hal sebagai berikut :

- 1) mengubah usaha batik mereka menjadi usaha sambilan, kemudian mengerjakan pekerjaan lain untuk menambah pendapatan mereka ;
- 2) menghentikan sama sekali usaha mereka dan hanya bekerja sebagai penjual batik eceran ;

- 3) beralih profesi yang sama sekali tidak berhubungan dengan batik ;
- 4) menciptakan desain batik yang tidak dapat ditiru oleh industri batik printing, seperti halnya desain batik klasik.

Usaha pemerintah daerah untuk membantu para pengusaha industri kecil Batik Banyumasan mengatasi permasalahan pemasaran dengan mendirikan koperasi gagal mencapai tujuannya. Kematian koperasi juga tidak dapat dilepaskan karena ketidakmampuan untuk melindungi anggotanya dari persaingan industri batik printing. Untuk mempermudah melihat data perusahaan Batik Banyumasan maka akan ditampilkan dalam bentuk tabel sebagai berikut;

No	Kecamatan	Jumlah Unit Usaha	Tenaga Kerja	Investasi Alat (Rp. 000)
1	Banyumas	573	845	38.965
2	Kebasen	50	50	2.500
3	Patikraja	5	5	250
4	Sokaraja	214	328	11.660
5	Purwokerto Timur	3	27	10.875
Jumlah		845	1.255	54.250

Tabel VII. Data pengusaha/perajin batik Per-Kecamatan

No	Tahun	Jumlah Unit Usaha	Tenaga Kerja	Investasi Alat (Rp. 000)
1	1997	845	1.255	54.250
2	1998	624	985	53.125
3	1999	624	985	53.125
4	2000	794	1.200	49.818
5	2001	794	1.200	49.818

Tabel VI. Data industri batik di Kabupaten Banyumas¹⁰⁵⁾

B. Pembahasan

Bertitik tolak dari hasil penelitian dan kajian pustaka terhadap perlindungan hukum desain industri Batik Banyumasan, prinsip kebaruan/*novelty* desain industri batik banyumasan dan hambatan-hambatan yang dihadapi oleh para pengusaha Batik Banyumasan untuk melindungi desain industrinya, maka dapat dilakukan pembahasan sebagai berikut ;

B.1. Perlindungan hukum desain industri Batik Banyumasan

Dari hasil penelitian, maka sudah disajikan bagaimana perlunya perlindungan hukum desain industri pada industri Batik Banyumasan. Tetapi mengingat bahwa kerajinan batik adalah bukan asli berasal dari kerajinan rakyat Banyumas, maka perlu disajikan pula pembahasan tentang perlindungan hukum desain industri batik pada umumnya. Hal ini perlu dilakukan karena kerajinan batik merupakan kerajinan rakyat Indonesia, sehingga banyak daerah yang mempunyai sentral batik dan masing-masing memiliki desain yang berbeda-beda, serta sebagian besar dari usaha mereka juga tidak mendapatkan perlindungan hukum desain industri. Seandainya mereka dioptimalkan perannya untuk menciptakan desain baru dan melindungi desain batiknya, maka dapat menghasilkan kegiatan ekonomi rakyat yang besar, sehingga batik mempunyai nilai ekonomi yang tinggi, hal ini juga

Pembatik sambilan umumnya bekerja sebagai pembatik apabila sedang tidak mengerjakan pekerjaan utama mereka atau pada saat mereka mempunyai waktu luang saja, sehingga pembatik sambilan ini tidak mempunyai waktu kerja yang teratur.

Batik sebagai kegiatan sambilan kalangan masyarakat kecil sampai sekarang masih dilakukan di pedesaan atau pinggiran kota. Mata pencarian utama kalangan masyarakat kecil tersebut, pada umumnya pertanian, perikanan, peternakan dan industri rumah tangga.

1) kegiatan membatik dilakukan untuk kegiatan sambilan kalangan masyarakat kecil dan menengah ;

Dalam industri batik, desain batik telah mengalami banyak perkembangan dan perubahan. Tetapi sayangnya perkembangan dan perubahan tersebut, tidak diikuti dengan pendataan desain batiknya. Perkembangan dan perubahan desain batik, dapat digolongkan dari latar belakang dan tradisi budaya, dari para perajin batik, antara lain ;¹⁰⁶⁾

a. Penggolongan desain batik oleh perajin Batik Banyumasan yang perlu dilindungi

menyebabkan terbukanya lapangan kerja untuk mengatasi banyaknya pengangguran yang ada saat ini.

Desain batik yang mereka buat pada umumnya adalah desain batik yang secara turun temurun sudah dikenal dan menjadi tradisi di daerah tersebut. Sedangkan untuk warna yang digunakan menyesuaikan dengan tradisi yang berkembang di daerah yang bersangkutan.

Pada umumnya pembatik kalangan kecil tidak memiliki modal yang cukup, kurang mempunyai wawasan dagang, menggunakan manajemen keluarga, tidak ada pembukuan atau catatan kegiatan produksi yang akurat dan pemasaran yang terbatas. Batik kalangan kecil ini biasanya, proses pengerjaannya sangat cepat dan spontan, sehingga batik yang dihasilkan kurang halus dan harga murah. Mutu dan desain batiknya juga tidak standar, sehingga sukar menemukan kesamaan satu sama lain, biasanya batik kalangan kecil dan menengah untuk memenuhi kebutuhan lokal dan tradisional, sehingga kebanyakan berupa jarit atau sarung.

2) batik sebagai barang dagangan ;

Batik sebagai barang dagangan banyak dikembangkan oleh para wirausahawan baik di pasar lokal, nasional dan internasional. Para wirausahawan ini dapat muncul dari kalangan usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar, asalkan mempunyai pengetahuan tentang pasar sehingga dapat melihat celah untuk mendapatkan keuntungan dan hal ini

menjadi motivasi untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas

produksi.

Perubahan desain batik dan warna batik sebagai barang

dagangan, pada umumnya mengacu pada permintaan pembeli, karena permintaan pasar pada umumnya sangat berpengaruh pada produksi batik. Para pedagang batik sadar bahwa

permintaan pasar cepat berubah, sehingga desain batik dan

warna harus mengikuti perubahan yang terjadi di pasar.

Perubahan fungsi batik juga cepat diantisipasi, sesuai dengan

permintaan pasar, sehingga bentuk batik yang dihasilkan dapat

beragam seperti halnya untuk selendang, ikat, sorban,

perlengkapan tempat tidur, gaun, kemeja, celana dan

sebagainya, tidak hanya terbatas pada jarit dan sarung saja.

Batik sebagai barang dagangan menuntut desain yang

dinamis, keanekaragaman kebutuhan, penyelesaian yang cepat,

proses yang efisien dan mutu yang baik. Tempat perdagangan

batik dapat dilakukan pada pasar lokal, pasar antarkota, pasar

antardaerah, pasar antarpulau dan pasar mancanegara.

Segmen pembeli batik juga bermacam-macam, sehingga desain

batik juga beraneka ragam sesuai dengan mutu dan harga yang

berbeda-beda pula. Tingkatan mutu batik juga bermacam-

macam, dari yang halus sampai yang kasar dan dari tradisional

sampai modern. Batik juga dibuat untuk berbagai keperluan

sesuai dengan tuntutan pasar, bahan batik juga bermacam-macam dari kain yang tebal sampai yang tipis.

Batik sebagai barang dagangan diproduksi oleh para wirausahawan dan diperdagangkan oleh para pedagang di sepanjang pesisir utara Pulau Jawa dari Indramayu, Cirebon, Tegal, Pekalongan, Kudus, Rembang, Lasem, Tuban Gresik, Bangkalan, Sampang, Pamekasan, hingga Sidoarjo. Di jalur tengah dan selatan Pulau Jawa batik diproduksi di Mojokerto, Tulungagung, Trenggalek, Ponorogo, Pacitan, Wonogiri, Solo, Klaten, Yogyakarta, Banyumas dan Tasikmalaya. Dahulu daerah Garut, Ciamis, Lampung dan Jambi menghasilkan batik sebagai barang dagangan, tetapi sekarang tidak lagi.

Pengusaha batik sekarang ini lebih memilih menggunakan bahan pewarna sintetis (indigosol, nattoi dan rapid) daripada pewarna alam (mengkudu dan nila), karena lebih banyak memberikan alternatif dalam memilih warna, serta lebih efisien dan efektif, bahan pewarna alam saat ini semakin sulit diperoleh sehingga jarang dipakai.

3) batik sebagai kegiatan tradisi pada kalangan bangsawan ;

Batik dari kalangan bangsawan, dikenal sebagai batik klasik atau batik keraton, yang dibuat untuk mewujudkan nilai-nilai budaya Jawa sebagai suatu tradisi. Dalam budaya Jawa, khususnya lingkungan keraton terdapat ketentuan-ketentuan

yang menyangkut keluarga raja dan pejabat keraton dalam berpakaian agar sesuai dengan aturan keraton.

Keraton memandang perlu untuk membuat aturan supaya kedudukan raja tetap kuat dan mutlak, aturan tersebut membangkitkan feodalisme, yaitu suatu sikap mental yang memperlakukan secara khusus orang-orang tertentu karena usia atau kedudukannya. Feodalisme tampak dalam bahasa rupa, yaitu dalam memilih kain, menetapkan dan mengamarkan desain dan memilih warna terkait dengan tujuan pencapaian tingkatan yang lebih halus atau sopan, khususnya bagi kalangan keraton.

Ketetapan-ketetapan raja yang menyangkut busana keraton dapat diartikan sebagai perintah untuk meningkatkan keterampilan, kerajinan, ketelitian dan kehalusan dalam tata busana keraton. Keraton menetapkan aturan yang melarang desain batik tertentu didasarkan atas pertimbangan feodalistik, dimana raja menyatakan bahwa batik telah kehilangan sifat-sifat eksklusif yang dahulu. Karena kini dibuat oleh para perajin Jawa dari kalangan biasa, sehingga pangkat atau kedudukan tidak lagi dihubungkan dengan produk itu sendiri atau rumah tangga kerajan, terpaksa memuat rancangan pola dikerjakan secara teliti dan terperinci, untuk menunjukkan para pemakai batik dari keluarga kerajan dan membedakan mereka dari pemakai lain.

Terdapat beberapa desain batik yang diperuntukkan khusus untuk keperluan pribadi keraton, sehingga keraton mengeluarkan pembatasan-pembatasan terhadap desain batik parang rusak, sawat, lar, cumangkirang dan udan liris. Desain dalam batik klasik atau batik keraton bukan hanya dimaksudkan untuk membedakan status atau tingkat kebangsawanan, tetapi juga dikaitkan dengan waktu dan bentuk upacara yang ada dalam tradisi Jawa.

4) batik sebagai usaha dagangan sebagian orang Cina dan Belanda-Indo, yang ragam hias dan fungsinya ditujukan untuk kalangan terbatas ;

Pengusaha batik Cina pada mulanya hanya berdagang untuk kalangan terbatas, yaitu untuk kebutuhan keluarga di kalangan mereka sendiri, tetapi lama kelamaan berkembang dan mempunyai pasar sendiri yang cukup besar. Pengusaha batik Cina umumnya tinggal di daerah Indramayu, Cirebon, Pekalongan, Banyumas, Lasem dan Sidoarjo.

Para pengusaha batik Cina pada masa penjajahan Belanda dipercaya sebagai pedagang menengah, yang menjembatani kepentingan pemerintah dan pedagang Belanda dengan pribumi. Semua yang dijual penduduk pribumi kepada orang-orang Eropa mereka jual melalui orang-orang Cina dan semua yang dibeli oleh penduduk pribumi dari orang-orang

Ciri ragam hias batik mereka banyak dilhami lukisan tradisional, keramik dan ragam hias yang banyak dipakai sebagai lambang mitologi Cina. Ragam hias batik Cina juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan selera konsumen.

yang baik terhadap katun.

bersifat mudah larut dalam air sehingga memiliki daya afinitas tahan terhadap gosokan dan sinar matahari, indigosol juga jenis pewarna yang biasanya dipakai indigosol yang menggunakan warna-warna terang dan beraneka macam warna. tersebut. Batik produksi perusahaan Cina cenderung perusahaan ataupun rahasia dagang dari para perusahaan Cina hasil eksperimen ini biasanya disimpan sebagai rahasia pertama melakukan eksperimen pewarna sintetis untuk batik, baik dan terjaga. Perusahaan Cina merupakan orang yang ketat, sehingga mutu batik produksi perusahaan Cina biasanya umumnya dikerjakan oleh para pekerja pribumi dengan disiplin Batik yang diproduksi oleh perusahaan Cina pada

Cina dapat memperoleh keuntungan yang berlipat ganda.

membeli lebih mahal daripada perusahaan Cina dan perusahaan menjual kepada penduduk pribumi, sehingga perusahaan pribumi keperluan batik, pedagang Cina yang dipercaya untuk tekstil dan kimia di Eropa memproduksi bahan-bahan untuk Eropa mereka beli melalui orang-orang Cina. Maka ketika pabrik

Seperti halnya di Lasem ragam hias batik Cina lebih rumit dengan latar tanahan yang rinci, warna yang digunakan antara lain merah. Biru, ungu, kuning dan cokelat. Sedangkan batik Cina dari Banyumas mendapat banyak pengaruh dari batik tradisional Solo-Jogya, dengan ragam hias semen, kawung dan lereng, warna yang digunakan cenderung biru, cokelat, putih dan krem.

Sedangkan pengusaha batik Indo-Belanda pada awalnya juga bukan merupakan komoditas yang diperdagangkan secara luas, tetapi hanya untuk kalangan terbatas. Kegiatan usaha pengusaha batik Belanda dibantu oleh para pekerja pribumi, awalnya mereka biasanya membuat desain pada sarung bantal, taplak, sputangan, hiasan dinding, baju tidur dan sebagainya.

Desain batik pengusaha batik Indo-Belanda adalah figur manusia yang berada di taman, binatang pemeliharaan, unggas dan tanaman bunga. Warna batik cenderung kontras seperti halnya, merah, merah dan biru, biru dan putih, juga soga. Walaupun banyak dibantu oleh batik pribumi tetapi hasil karyanya selalu dibubuhi tanda tangan mereka. Setelah mereka mengenal pewarna sintetis indigisol, produk yang dihasilkan mempunyai corak warna yang lembut dan beraneka macam warna.

Dengan adanya perkembangan dalam desain batik, maka sekarang ini secara umum dapat dibedakan penggolongan dan pembagian desain batik sebagai berikut ;¹⁰⁷⁾

- 1) golongan geometris yang dapat dipakai menjadi motif banji, ganggong, ceplok, anyaman dan parang ;

- 2) golongan semen yang ornamen utamanya terdiri dari tumbuhan, meru, burung/lar-laran dan binatang. Golongan semen dapat dibagi menjadi motif semen yang tersusun dari ornamen tumbuh-tumbuhan saja yaitu bagian bunga atau kuncup dan daun, motif semen yang tersusun dari ornamen tumbuhan dan binatang yaitu bunga atau daun dan binatang, motif semen yang ornamen-ornamennya berupa tumbuh-tumbuhan, binatang dan lar-laran atau binatang bersayap ;

- 3) golongan yang disebut motif buketan, yang menempatkan bidang untuk ornamen atau gambarnya tidak sama. Di satu bidang penuh dengan gambar-gambar, sedangkan pada sisi bidang yang hampir kosong, yang terkenal dalam golongan ini adalah batik terang bulan ;

Batik sebagai kebutuhan seni atau desain dengan konsep kontemporer muncul pada akhir abad ke-20, seiring dengan surutnya batik sebagai pakaian tradisional dan mulai pada saat itu pula produksi batik tradisional mulai merosot. Saat ini batik lebih

¹⁰⁷⁾ Teguh Djivanto, *Mengenal dan Melestarikan Batik Tradisional Kabupaten Dati II Banyumas*, FE Unsoed, Purwokerto, 1992, hal 9.

dilihat sebagai teknik rintang warna yang memiliki kelebihan efek visual daripada teknik langsung warna. Terdapat berbagai kemungkinan kreatif atau inovatif pada batik yang menyangkut bahan baku kain, desain benang, bangun anyaman dan paduan serat. Prospek kreatif atau inovatif pada ragam hias, batik olahan malam, bahan pewarna kimia, proses penyempurnaan lainnya, serta pengembangan fungsi batik, baik sebagai desain atau seni. Batik sebagai salah satu citra budaya bangsa Indonesia, juga memiliki kekhasan pada kerajinan, kerumitan dan keluasan ragam hias. Perlu digali potensi pembatik/pendesain batik muda yang potensial untuk menghasilkan hasil karya yang sesuai dengan selera konsumen dan perkembangan jaman, sehingga produksi batik dapat kembali tumbuh dan berkembang seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

b. Teknik pembuatan desain batik oleh perajin Batik Banyumasan yang perlu dilindungi

Teknik pembuatan batik di Indonesia berdasarkan pada prinsip *Resist Dyed Technique*, sebagai bahan untuk *resist dyed* pada mulanya dipakai bubuk ketan dengan alat untuk membuatnya semacam pensil dari bambu, batik yang dihasilkan adalah batik simbut. Kemudian dikenal atau ditemukan *resist dyed* dari malam

tawon yang kemudian dikembangkan menjadi lilin batik Indonesia yang susunan campurannya sangat unik.¹⁰⁸⁾

Bahan-bahan campurannya adalah lilin tawon/lancing, gondorukem, parafin, mata kucing (damar), micro-wax, kendal/minyak kelapa. Untuk lebih efisien, lilin bekas kerokan dan lordan setelah dimasak dapat dijadikan bahan lilin batik. Alat yang digunakan untuk membuat lukisan lilin pada kain, mula-mula dipakai canting tulis dari tembaga. Pekerjaan menulis dengan lilin disebut membatik (mbatik/nyerat). Pada tahun 1815 dibuat stempel dari tembaga untuk membuat lukisan lilin pada kain dengan cara dicapkan. Alat ini kemudian disebut cap, mengerjakannya disebut mencap dan batik yang dihasilkan disebut batik cap. Pada tahun 1902 pernah dibuat stempel dari kayu, tetapi alat ini tidak dapat berkembang pada pembatikan di Pulau Jawa, berkembangnya alat ini di Pulau Sumatera (Bukit Tinggi).

Pada tahun 1966 muncul beberapa pelukis antara lain, Bagong Kusudiarjo, Abas Alibasah, Amir Yahya, Mardiono, Bambang Oetoro, Sularjo dan Sumihardjo, yang memiliki pengetahuan teknik batik dan kemudian memperdalam seni lukis. Mereka awalnya membuat batik secara kombinasi, dengan sistem painting dan batik tulis, alat untuk painting lilin adalah kuas dan sendok. Batik painting ini berkembang pada tahun 1967, terkenal dengan nama batik modern/batik gaya bebas/batik painting. Pada

tahun 1970 mulai dicoba pembuatan batik secara printing/sablon, ternyata batik jenis ini yang berkembang pesat dan menjadi utama batik tulis, batik cap dan batik kombinasi.

Pada awalnya bahan dasar yang digunakan membuat batik di Indonesia adalah kain yang berwarna putih. Kain putih ini di kalangan pembatik dikenal dengan tiga istilah, yaitu *mori*, muslim dan *cambric*. Kata *mori* berasal dari *bombyx mori*, yaitu suatu jenis ulat sutera yang menghasilkan sutera putih dan halus, pada jaman dahulu batik yang halus dibuat dari kain sutera. Kata muslim berasal dari kata muslim, yaitu kependekan dari *moussuline* semacam kain cita yang berwarna putih. Sedangkan istilah *cambric*, artinya *fine linen* atau kain batis, yaitu kain putih. Batis berasal dari kata *batist*, yaitu dari kata *bates* (India) merupakan nama kain cita putih. Ada yang mengatakan bahwa nama tersebut berhubungan dengan Batisse Cambray, yaitu nama seorang penenun kenamaan Perancis. Saat ini istilah *mori* lebih banyak dipakai daripada muslim dan *cambric*.

Dilihat dari bahan dasarnya, kain *mori* dapat berasal dari katun, sutera asli atau sutera tiruan, tetapi *mori* katun yang biasanya umum untuk dipakai. Berdasarkan kehalusannya, *mori* dari katun dapat digolongkan menjadi empat, yaitu ; ¹⁰⁹⁾

1) golongan yang sangat halus disebut *primissima* yang berasal dari kata *Primus prima*, artinya yang utama dari kelas satu. Pada

¹⁰⁹⁾ Daryanto, *Teknik Pembuatan Batik dan Sablon*, Aneka Ilmu, Semarang, 1981, hal 5.

Kalangan umum mori jenis ini dikenal juga dengan nama mori cap sen sebab jenis mori yang paling halus adalah mori cap cent, yaitu kepingan logam masa Hindia Belanda yang bernilai satu sen ;

2) golongan halus disebut prima, yang artinya kelas *satu/first class prime* ;

3) golongan sedang yang disebut biru, sebab biasanya mori jenis ini merknya dicetak dengan warna biru ;

4) golongan kasar, biasanya disebut kain grey atau blaco, disebut juga mori merah, sebab biasanya merknya diberikan warna cap merah.

Sebelum tahun 1970 mori primissima dan prima harus diimpor dari Belanda, Jepang, RRC dan India, tetapi untuk sekarang ini moris jenis tersebut dapat diproduksi di dalam negeri. Selain mori, sekarang banyak bahan dasar yang digunakan untuk membuat batik, antara lain lurik, tetoron, syantung, geogette, polysima dan sutera.

B.2. Prinsip kebaruan/*novelty* desain industri Batik Banyumasan

Adanya pengaruh budaya yang cukup berperan dalam perkembangan usaha kecil, antara lain budaya komunal dimana sifat berbagi adalah sifat yang terpuji, sehingga memanfaatkan desain secara bersama-sama adalah hal yang wajar, juga bila

desainnya ditiru oleh orang lain hal tersebut merupakan suatu kebanggaan.

Pengusaha batik sudah cepat puas apabila pendapatannya sudah mencukupi dan mampu memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Hal tersebut menyebabkan pengusaha batik kurang berani mengambil resiko, tidak tanggap terhadap perubahan pasar dan tidak berani melakukan inovasi baru untuk menghasilkan desain baru. Oleh karena diperlukan usaha keras, untuk mengubah cara pandang tradisional para pengusaha industri Batik Banyumasan, dengan cara pandang baru yang lebih modern dan tentu saja disesuaikan dengan situasi yang kondusif, dalam menjalankan usahanya.

a. Pandangan perajin Batik Banyumasan terhadap keberuan (novelty) pada desain batik

Desain dipandang sebagai obyek bentuk semata dan hanya ditilik dari bentuk fungsionalnya. Perusahaan kecil Batik Banyumasan kurang menyadari bahwa desain memiliki nilai ekonomis dan tidak menganggap bahwa desain adalah aset yang harus dilindungi dan dikembangkan. Pasar yang terus berkembang akhirnya menjadi bosan dengan desain yang terbatas hanya itu saja, sehingga memilih produk lain yang lebih inovatif, akibatnya

penjualan menurun dan keuntungan ekonomis yang diperoleh berkurang.

Pengusaha kecil Batik Banyumasan merasa bahwa melindungi desain bukanlah hal yang penting. Inovasi desain tidak banyak dilakukan sehingga perkembangan desain menjadi statis. Pasar yang terus berkembang akhirnya menjadi bosan dengan desain yang itu-itu juga, sehingga memilih produk lain yang lebih inovatif, akibatnya penjualan menurun dan keuntungan ekonomis yang diperoleh berkurang.

Padahal dalam menjalankan kegiatan usaha batik, terdapat tiga komponen utama yang harus terpenuhi, yaitu :

- 1) modal usaha ;
- 2) asset yang berwujud, dapat berupa tanah, bangunan, mesin-mesin dan peralatan yang dimiliki ;
- 3) asset yang tak berwujud, dapat berupa desain industri, merek, paten, hak cipta, rahasia dagang dan desain tata letak sirkuit.

Terdapat tiga penilaian yang dapat digunakan untuk menilai desain industri sebagai suatu asset perusahaan, yaitu : ¹¹⁰⁾

- 1) penilaian berdasarkan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh suatu desain industri. Apabila desain sudah ada maka tujuannya adalah untuk menghitung perkiraan biaya untuk membuat reproduksi dari desain tersebut. Biaya tidak sama

110) Priyo Pratomo, *Penilaian dan Manajemen Desain Industrial Dalam Skala Usaha Kecil dan Menengah*, Makalah Seminar Nasional Perlindungan Desain Industri Sebagai Salah Satu Asset Perusahaan, Klinik HAKI Undip, Semarang, 2001, hal 3.

dengan nilai, apabila tidak ada keuntungan ekonomis yang diperoleh dari kepemilikan desain, maka nilai desain sangat rendah, tanpa melihat berapapun biaya yang sudah dikeluarkan untuk memperoleh desain tersebut. Asumsi yang mendasari pendekatan ini adalah bahwa biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan desain akan sama dengan keuntungan yang dapat dihasilkan pada jangka waktu penggunaan desain tersebut. Biaya yang diperhitungkan dalam penilaian ini, antara lain :

a) total biaya tenaga kerja mulai desainer sampai dengan staff pendukungnya ;

b) biaya untuk fasilitas riset dan pembuatan desain baru ;

c) bahan mentah yang digunakan dalam proses pembuatan;

d) biaya untuk pembuatan *prototype* dan biaya pengtesan ;

e) biaya untuk membayar pengurusan sertifikat desain industri.

Pendekatan ini merupakan metode yang paling mudah dan murah untuk menentukan nilai desain industri, akan tetapi ada beberapa kekurangan yang belum terakomodasi dalam metode tersebut, yaitu :

a) tidak memperhitungkan keuntungan ekonomis yang diberikan oleh desain tersebut, karena adanya desain seperti tersebut, maka ada keuntungan yang diakibatkan karena permintaan atas produk tersebut ;

- b) tidak memperhitungkan keuntungan ekonomis akibat trend/kecenderungan permintaan pasar. Desain yang memberi keuntungan ekonomis dengan tingkat pertumbuhan yang naik akan lebih berharga, dibandingkan desain yang trendnya menurun ;
- c) tidak memperhitungkan jangka waktu/lamanya sebuah desain bisa memberikan keuntungan ekonomis, usia ekonomis dari suatu desain merupakan komponen vital atas penilaian untuk sebuah desain ;
- d) tidak memperhitungkan adanya resiko yang berkaitan dengan penerimaan keuntungan ekonomis, apabila resiko tinggi maka nilai desain menurun ;
- e) tidak memperhitungkan biaya yang dikeluarkan untuk melakukan penyesuaian/perbaikan yang diperlukan seiring makin bertambahnya usia suatu asset desain industri.
- 2) nilai desain sebagai asset dihitung dari pendapatan yang diperoleh atas pendayagunaan desain dalam produksi. Faktor-faktor dalam penilaian ini, yaitu :
- a) besarnya keuntungan ekonomis yang dapat diharapkan dari kepemilikan desain ;
- b) berapa lama dapat diperoleh keuntungan ekonomis dari suatu desain ;

c) tipe dan besarnya resiko yang terkait dengan menerima keuntungan yang diharapkan.

Perolehan ekonomis dari desain tersebut di masa yang akan datang adalah diukur dengan besarnya keuntungan yang diterima dari penjualan produk dengan desain yang dimaksud, dengan terlebih dahulu mengurangi pendapatan dengan biaya-operasional dan kemungkinan tambahan investasi yang diperlukan. Selisihnya merupakan keuntungan ekonomis yang diperoleh dari kepemilikan desain. Akan tetapi untuk rencana perolehan keuntungan usaha di masa yang akan datang, tidak hanya dipengaruhi oleh management saja, tetapi juga dipengaruhi oleh ekonomi, persaingan dan kebutuhan modal.

3) adalah dengan mempertimbangkan harga yang dibayar untuk desain yang sama oleh pihak lain. Untuk desain pendekatan ini sulit dilakukan karena informasi atas transaksi pihak lain yang berhubungan dengan desain sulit didapat, karena berkaitan dengan rahasia dagang perusahaan.

Tahapan dalam management desain yang dapat dilakukan, antara lain : ¹¹¹⁾

1) portofolio, yaitu mengidentifikasi setiap desain atau rencana desain yang dimiliki oleh suatu usaha ;

2) klasifikasi, yaitu menggolongkan desain dalam tiga kategori (masih dipakai, akan dipakai dan tidak dipakai). Untuk desain

yang tidak akan dipakai lagi, apakah akan dilisensi atau akan dibiarkan ;

3) strategi, yaitu menentukan strategi agar desain yang dimiliki memberikan kontribusi yang maksimal bagi pendapatan usaha ;

4) melakukan penilaian aset berdasarkan *cost approach*, *income approach* dan *market approach* ;

5) penilaian atas kemampuan aset untuk bersaing dengan perusahaan kompetitor), yaitu dilakukan pemetaan desain baik yang dimiliki oleh perusahaan maupun oleh pesaing ;

6) investasi, yaitu perusahaan menentukan apakah perlu membeli

desain industri dari pihak lain, atau melakukan riset/percobaan sendiri.

Pandangan para pengusaha Batik Banyumasan, tentang

desain harus segera diubah, karena desain mempunyai manfaat ekonomi, yang sangat berguna bagi pengembangan usaha mereka.

Dengan membuat desain batik baru dan mendaftarkannya untuk mendapatkan perlindungan desain industri, adalah salah satu alternatif untuk meningkatkan pemasaran produk batik

banyumasan.

b. Masalah penjiplakan/pembajakan desain batik yang dihadapi oleh perajin Batik Banyumasan

Masalah penjiplakan/pembajakan produk suatu industri batik, merupakan tindakan yang biasa terjadi di kalangan pengusaha industri Batik Banyumasan. Hal tersebut merupakan suatu konsekuensi dari sifat dasar industri batik tersebut yang sangat terbuka bagi siapa saja untuk berkunjung dan mendapatkan keterangan tentang desain atau pola yang dikembangkan oleh pengusaha industri kecil batik tersebut.

Seperti halnya industri kecil lainnya, di kalangan pengusaha kecil industri batik tidak ada kebudayaan untuk melindungi karya atau desain mereka dengan cara mengajukan hak desain industri atas karya atau desain yang mereka buat. Hal ini sangat berbeda dengan perusahaan batik industri besar yang sangat ketat melindungi desain atau pola dasar mereka sehingga sulit ditiru oleh industri batik lainnya, ditambah dengan kemampuan mereka menyewa desainer atau perancang desain batik guna memperluas pasaran produk. Penjiplakan/pembajakan desain batik di kalangan industri kecil batik salah satu penyebabnya adalah mereka tidak mampu menyewa perancang motif batik.

Undang-Undang Desain Industri yang disahkan DPR pada 20 Desember 2000, dalam pelaksanaannya tidak tertutup kemungkinan dapat menimbulkan sengketa antara usaha kecil dengan usaha

besar. Hal ini dapat terjadi dengan mulai berlakunya klaim atas desain industri yang telah didaftarkan pada 6 November 2001. Sejak dibukanya pendaftaran mulai 6 Agustus 2001, sampai saat ini telah masuk 103 desain industri, baik dari pendaftar asing maupun domestik.¹¹²⁾ Desain yang terdaftar tersebut sebagian besar merupakan produk yang sudah banyak digunakan usaha kecil selama ini, antara lain pakaian, peralatan rumah tangga dan meubel. Dengan terdapatnya desain industri suatu produk, maka merek yang menggunakannya tanpa sepengetahuan pendesain akan terkena klaim. Besarnya klaim Rp. 150.000 untuk setiap desain. Hal ini tentu saja akan menimbulkan sengketa di kalangan pengusaha kecil dan menengah yang selama ini menggunakan desain tersebut dan mereka tidak mengetahui tentang ketentuan tersebut. Mekanisme untuk penyelesaian klaim dan mengatasi sengketa yang mungkin terjadi, juga belum disiapkan secara sempurna..

Sementara itu dari kantor Ristek dan Ditjen HAKI, hanya mampu mengeluarkan pernyataan sikap menyangkan, tanpa melakukan sosialisasi yang berarti, kepada tindakan para kaum intelektual, para pengusaha dan industriawan yang belum memandang pentingnya HAKI. Menurut mereka, seharusnya sejak tahun Indonesia masuk WIPO (1974) dan meratifikasi TRIP's

¹¹²⁾ Kompas, *Pendaftaran Undang-Undang Desain Industri Mengundang Konflik*, 16 November 2001, hal 8.

(1994), HAKI telah membudaya dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Mereka juga mengingatkan bahwa ketidak pedulian masyarakat terhadap TRIPs akan menimbulkan dampak negatif yang besar yang besar, terutama terhadap kegiatan perdagangan di dalam negeri dan dunia. Karena HAKI telah menjadi alat persaingan dagang di era globalisasi. Konsekuensi utama yang perlu disadari adalah apabila ada negara anggota WTO melakukan pelanggaran atas perjanjian TRIPs, maka akan ada pembalasan silang (*cross retaliation*), terhadap kegiatan perdagangan negara tersebut oleh negara yang dilanggar haknya. Cara ini adalah sah menurut hukum internasional. Indonesia akan mengalami kesulitan mencari devisa untuk proses pembangunannya karena produk ekspornya tidak memiliki nomor hak eksklusif dari rezim HAKI, sekalipun produk tersebut sangat inovatif dan berwawasan lingkungan, sehingga produk tersebut akan ditahan terlebih dahulu di pelabuhan negara tujuan.

Dengan diberlakukannya undang-undang tersebut, maka masyarakat usaha kecil Indonesia akan masuk dalam sistem perlindungan kekayaan intelektual baru yang sebelumnya tidak mereka kenal, karena itu diperlukan persiapan yang matang. Muncunya dampak bagi pendesain lokal dan industri kecil perajin Indonesia yang umumnya belum mengetahui dan memahami

Undang-Undang Desain Industri dengan beberapa kemungkinan,

yaitu :

1) mereka tidak mendaftarkan desain produknya ;

2) mereka tidak mendaftarkan tetapi mempublikasikan produknya ;

3) mendaftarkan tetapi tidak memelihara ;

4) mendaftarkan dan memelihara hanya untuk beberapa tahun saja.

Untuk kasus penggunaan suatu desain yang tidak terdaftar tetapi dipublikasikan, maka ada resiko desain tersebut ditiru orang lain. Tetapi dengan adanya publikasi dapat digunakan untuk menyanggah pendaftaran orang lain. Namun untuk menyanggah harus terlebih dahulu membaca berita desain produk, lalu harus membayar biaya penyanggahan sebesar Rp. 150.000.

Suatu desain produk yang didaftarkan harus bersifat baru, desain produk tersebut harus bersifat dua atau tiga dimensi, yang diperhatikan adalah bentuknya, bukan fungsinya dan bukan materialnya. Hasil kerajinan tangan dan produk-produk industri kecil Indonesia masuk dalam kategori ini, misalnya bentuk batik, cangkir, meja, kursi, teko, mobil, tas, kap lampu dan sebagainya termasuk dalam desain produk. Sistem pendaftaran desain industri di Indonesia mengacu pada ketentuan *first to file*, yaitu siapa yang mendaftarkan terlebih dahulu, maka ia yang dianggap sebagai pemilik desain tersebut. Hal ini dipilih karena sistem pendokumentasian di Indonesia tergolong lemah. Sementara di negara lain mengacu

pada *first to invent* yang harus didukung dengan dokumentasi tentang proses penemuan suatu produk atau desain yang didaftarkan.

Beberapa permohonan desain industri di Direktorat Jenderal HAKI akan ditampilkan dalam bentuk tabel, sebagai berikut ;

Tabel VIII. Permohonan desain industri¹¹³⁾

Periode 13 Agustus-13 November 2001

	Nomor	Tanggal	Judul	Nama
1	A00200100467	01/08/2001	Kursi Kayu	ITB, Bandung
2	A00200100188	26/06/2001	Sikat Gigi	Koninklijke Philips Electronics N.V. Belanda
3	A00200100198	22/06/2001	Desain Antena Televisi	Hendra Kusnadi, Bandung
4	A00200100219	22/06/2001	Fuse Box 12 Group	Fudyanto, Jakarta
5	A00200100220	22/06/2001	Mainan Ring/Lingkaran	Kimam Purwo, Jakarta
6	A00200100162	22/06/2001	Korset	Park Kim, Korea Selatan
7	A00200100152	22/06/2001	Pengetat Pinggang	Park Kim, Korea Selatan
8	A00200100158	22/06/2001	Kutang	Park Kim, Korea Selatan
9	A00200100135	21/06/2001	Desain Container Previa	PT Kirana Pacific Luas, Jakarta
10	A00200100148	22/06/2001	Celana Dalam Wanita	Park Kim, Korea Selatan
11	A00200100136	21/06/2001	Paper Cup dengan	PT Pola Paperindo

Beberapa contoh tersebut memperlihatkan, bahwa sampai saat ini belum ada yang mendaftarkan desain batik. Dan yang patut disayangkan, bahwa para pengusaha besar lokal dan internasional yang mendaftarkan desain produknya, bukan para pengusaha lokal industri kecil. Hal ini harus segera diantisipasi oleh Ditjen HAKI, Ristek, Disperindagkop dan Depkeh, karena begitu banyak industri kecil di Indonesia, antara lain industri batik yang tidak mempunyai perlindungan desain industri. Padahal itu adalah sumber pendapatan mereka untuk hidup dan membuka banyak lapangan pekerjaan di daerah dan pedesaan.

c. Pelaksanaan dan sosialisasi desain industri pada perajin Batik Banyumasan

Tampaknya agak sulit untuk menilai Direktorat Jenderal HAKI yang menangani proses pendaftaran desain industri, karena selain instansi tersebut masih baru, juga karena Undang-Undang Desain Industri baru diundangkan sejak tanggal 20 Desember 2000 dan pelaksanaannya dimulai pada pertengahan Juni 2001.

Para aparat dari Ditjen HAKI, banyak berasal dari Direktorat Paten, sehingga pengaruh sistem paten masih sering terbawa. Sebagai contoh, dalam Undang-Undang Desain Industri dinyatakan secara tegas bahwa yang diterbitkan adalah Sertifikat Desain Industri, tetapi dalam prakteknya yang diterbitkan adalah Surat

Desain Industri. Penyimpangan ini dapat disebabkan karena pengaruh sistem paten yang menyatakan surat paten terhadap invensi yang telah memenuhi persyaratan dan diterima permohonan, padahal sistem desain industri Indonesia berbeda dengan sistem paten. Walau sebagian memetik persyaratan kebaruan untuk setiap desain industri yang dapat didaftar yang juga terdapat pada sistem paten, namun sistem desain industri lebih dekat pada sistem hak cipta yang tidak menerapkan pemeriksaan substansi terhadap setiap pendaftaran yang diterima oleh Ditjen HAKI.

Selain masalah tersebut, Ditjen HAKI sering meminta kepada pemohon pendaftaran desain industri agar dalam permohonannya dicantumkan klaim. Padahal istilah klaim tidak ada dalam sistem desain industri Indonesia, karena klaim hanya ada dalam sistem paten. Di samping itu, proses jangka waktu pendaftaran pun masih belum tepat waktu sebagaimana yang dicantumkan dalam Undang-Undang Desain Industri. Pelanggaran terhadap Undang-Undang Desain Industri tersebut, terasa sangat ironis. Karena justru dilakukan oleh aparat instansi yang mengurus masalah desain industri, yaitu Ditjen HAKI, hal ini harus segera dibenahi sebelum terlambat.

Masih tersendatnya pelaksanaan dan sosialisasi desain industri, disebabkan faktor-faktor sebagai berikut :¹¹⁴⁾

- 1) penegakkan hukum terhadap desain industri belum berjalan efektif, hal ini disebabkan karena faktor sosial, budaya, ekonomi dan hukum. Jika dilihat dari faktor sosial budaya, dapat dikatakan bahwa sistem desain industri bersifat perdata dan individualitis belum meresap dalam budaya dan sosial, dikalangan para penegak hukum dan masyarakat Indonesia, sehingga sosialisasi sistem desain industri belum berjalan lancar seperti yang diharapkan ;
- 2) faktor hukum juga dapat menjadi alasan mengapa efektivitas pelaksanaan Undang-Undang Desain Industri berjalan lambat. Budaya hukum belum menjadi bagian dalam kehidupan masyarakat, aparat penegak hukum dan aparat Diteg HAKI. Faktor hukum yang melekat pada Undang-Undang Desain Industri masih sulit untuk dipahami dan dimengerti oleh masyarakat karena begitu birokratis, berbelit-belit dan tidak berpihak pada usaha kecil dan menengah, selain itu karena sistem desain industri relatif baru dalam sistem hukum nasional;
- 3) faktor ekonomi juga menjadi alasan tersendiri mengapa implementasi Undang-Undang Desain Industri belum optimal dilaksanakan. Para pengusaha, khususnya usaha kecil dan

menengah belum melekatkan sistem desain industri sebagai bagian dari strategi bisnis, karena adanya anggapan bahwa hukum tidak berkaitan dengan masalah ekonomi. Masalah lain adalah Dijen HAKI berada di bawah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dan bukan berada di bawah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan koperasi. Krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia sejak tahun 1997, juga sangat berpengaruh pada masyarakat, pengusaha dan aparat penegak hukum, serta berpengaruh pula pada mental aparat Dijen HAKI, sehingga mempengaruhi efektivitas pelaksanaan dan sosialisasi Undang-Undang Desain Industri.

Sosialisasi terhadap Undang-Undang Desain Industri, belum menampakkan hasil yang memadai, meskipun sosialisasi undang-undang tersebut telah dilakukan sejak awal tahun 2001 sampai saat ini. Hal ini bisa dilihat dari jumlah pendaftaran desain industri yang diajukan oleh pengusaha nasional masih relatif sedikit dibandingkan dengan pihak asing. Dikawatirkan kesadaran pengusaha nasional untuk mendaftarkan desain industri mengalami nasib serupa dengan jumlah permintaan paten dari investor nasional yang hanya sekitar 3 % dari total permintaan paten yang mencapai lebih dari 27.000 permintaan paten sejak tahun 1991. Hal ini sedikit berbeda dengan sosialisasi dan pemahaman masyarakat terutama para pengusaha nasional, terhadap Undang-Undang Merek cukup

memadai. Hal ini dapat dilihat dari jumlah permintaan merek yang mencapai 50% dari jumlah permintaan merek yang mencapai 20.000 permintaan merek per tahun.

Sosialisasi HAKI dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain ;¹¹⁵⁾

1) intensitas sosialisasi HAKI semakin sering dilakukan baik oleh pemerintah (terutama oleh Ditjen HAKI, Depkeh, Ristek dan Disperindagkop) maupun lembaga swadaya masyarakat yang tumbuh di dalam dan diluar perguruan tinggi dan sosialisasi HAKI dilakukan tidak hanya untuk kalangan perguruan tinggi, masyarakat akademisi dan para penegak hukum saja tetapi juga kepada para usahawan dengan mengadakan seminar, lokakarya dan pelatihan-pelatihan ;

2) mata kuliah HAKI mulai diajarkan di berbagai perguruan tinggi negeri dan swasta dan mata kuliah itu tidak hanya diajarkan di fakultas hukum saja, tetapi juga di fakultas lainnya, misalnya di fakultas ekonomi dan teknik ;

3) informasi tentang HAKI sebagai ilmu pengetahuan dalam bentuk karya tulis dan buku-buku, serta sosialisasi HAKI dalam rangka penegakan hukumnya semakin sering diberitakan oleh media cetak dan elektronik.

Selama ini sosialisasi undang-undang desain industri, lebih memfokuskan pada kalangan para penegak hukum dan akademisi

di fakultas hukum. Alangkah lebih baiknya bila sosialisasi tersebut dilakukan pada para usahawan, khususnya kecil dan menengah secara langsung di lapangan, sehingga dapat diketahui pula permasalahan dan kendala mereka dalam menerima atau memahami undang-undang desain industri. Walaupun sosialisasi desain industri telah dilakukan, meskipun masih terbatas, tetapi hanya menekankan pada aspek hukum dan penegakan hukumnya saja. Padahal masalah HAKI, khususnya desain industri ini sangat terkait dengan masalah ekonomi, perindustrian dan perdagangan, jadi penekanan harus kepada masalah hukum dan ekonomi karena kedua berkaitan erat.

Sampai saat ini sosialisasi desain industri yang juga melakukan penekanan pada masalah ekonomi, perindustrian dan perdagangan, selain masalah murni hukum, masih jarang. Padahal para usahawan, kreator dan desainer akan memiliki kesadaran hukum yang baik dan benar terhadap undang-undang desain industri, apabila mereka dapat memahami bahwa desain industri juga akan memberikan manfaat ekonomi bagi kegiatan usahanya. Karena tidak ada suatu barang yang dapat dihasilkan, tanpa membuat desain barang tersebut terlebih dahulu, oleh karena itu desain barang tersebut harus dilindungi karena mempunyai nilai ekonomis dan akan dikonsumsi oleh masyarakat secara luas.

B.3. Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh pengusaha Batik Banyumasan untuk melindungi desain industrinya

Dari hasil penelitian, maka sudah disajikan bagaimana banyaknya hambatan yang dihadapi perajin Batik Banyumasan, dalam usahanya untuk melindungi desain batiknya. Tetapi mengingat bahwa perajin Batik Banyumasan adalah sebagian kecil dari seluruh bagian perajin batik dalam lingkup nasional, maka perlu disajikan pula pembahasan tentang hambatan yang terjadi secara umum pada pengusaha industri kecil batik di Indonesia. Hal ini perlu dilakukan karena hambatan yang ada pada perajin Batik Banyumasan, terjadi pula pada perajin industri kecil batik di Indonesia pada umumnya. Karakteristik industri kecil batik di Indonesia, antara lain : ¹¹⁶⁾

- a. produk, yang dihasilkan masih merupakan pekerjaan tangan atau semi mesin, dengan bentuk-bentuk desain yang umum atau tradisional;
- b. management, dari sifat kepemilikan usaha biasanya merupakan milik keluarga atau sekelompok orang yang saling mengenal, dengan sistem operasional yang bersifat turun temurun dan modal yang terbatas ;
- c. sumber daya manusia, biasanya merupakan usaha padat karya, dimana peningkatan jumlah produksi akan dibarengi dengan penambahan tenaga kerja. Sifat keahlian dari tenaga kerja lebih

¹¹⁶⁾ Priyo Pratomo, *op.cit.*, hal 1.

mengandalkan keterampilan atau pengalaman karena proses pembelajaran. Pengembangan wawasan bersifat turun temurun, dengan bentuk pakem dasar yang sulit berubah, yaitu sistematis tetapi belum efisien dan efektif dan kurang mengantisipasi adanya teknologi ;

d. pemasarannya, dilakukan di pasar lokal dan regional biasanya mengandalkan makelar, membuka kios, menitipkan ke toko dan mengikuti pameran.

Sedangkan ciri-ciri umum keterbelakangan industri kecil di Indonesia, antara lain ; ¹¹⁷⁾

- a. masalah modalan ;
- b. sebagian besar tidak mampu memenuhi persyaratan administratif untuk memperoleh bantuan dari bank ;
- c. sebagian besar masih menggunakan teknologi tradisional ;
- d. pangsa pasar cenderung menurun ;
- e. mempunyai tingkat ketergantungan yang besar terhadap fasilitas dari pemerintah ;

- f. jarang memiliki rencana usaha yang matang ;
- g. struktur organisasi masih sederhana ;
- h. jumlah tenaga kerja terbatas dan pembagian kerja kurang jelas ;
- i. tidak ada pemisahan antara kekayaan pribadi dengan kekayaan pemerintah ;
- j. tidak memiliki sistem akuntansi yang baik

¹¹⁷⁾ Resvrisond Baswir, *Agenda Ekonomi Kerakyatan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1997, hal 49.

k. pemasaran yang terbatas ;

l. keuntungan sangat tipis.

a. Keterbelakangan perajin Batik Banyumasan dalam menjalankan

usahnya

Sifat kewiraswastaan para pengusaha industri kecil batik

mempunyai ciri khas, yaitu ; ¹¹⁸⁾

1) kebanyakan industri batik yang ada merupakan industri

keluarga;

2) semua pengusaha berlatar kebudayaan Islam.

Dua ciri khas tersebut sangat mempengaruhi perkembangan industri kecil batik. Di kalangan keluarga pengusaha sering terjadi untuk mendirikan perusahaan batik sendiri-sendiri, walaupun biasanya perusahaan diwariskan pada anak atau anak laki-laki, terkadang diantara para pengusaha yang berasal dari satu keluarga tersebut sering terjadi persaingan.

Keinginan untuk mendirikan perusahaan sendiri di kalangan keluarga pengusaha batik, menyebabkan timbulnya usaha perbatikan kecil baik dari skala usaha, modal, maupun kemampuan mereka untuk mengantisipasi perubahan yang terjadi dalam dunia perbatikan. Usaha mereka akhirnya banyak yang mati

118) Loeckman Soetrisno, *Demokratisasi Ekonomi dan Pertumbuhan Politik*, Kanisius, Yogyakarta, 1997, hal 57.

karena tidak mampu bersaing dengan industri batik besar atau karena persaingan antar mereka sendiri.

Pemerintah dalam usahanya memperkokoh kedudukan pengusaha industri kecil batik, telah mendirikan koperasi batik. Tetapi karena tingginya semangat persaingan antar pengusaha batik dan tingginya semangat persaingan antar pengusaha batik dan tingginya semangat individualisme mereka, koperasi sering berubah menjadi ajang persaingan antar keluarga pengusaha dengan tujuan menguasai koperasi untuk kepentingan usaha keluarga mereka masing-masing. Akibatnya koperasi tersebut mati sebelum berhasil mencapai tujuannya. Terdapat dua jenis pengusaha industri kecil batik, yaitu : ¹¹⁹⁾

1) pengusaha batik asli, yaitu pengusaha yang berasal dari pengusaha kecil tetapi memiliki kesetiaan tinggi, walaupun mereka menyadari bahwa usaha ini tidak akan membuat mereka menjadi cepat kaya. Kebanyakan mereka sangat berhati-hati dalam berusaha, karena menyadari bahwa modal mereka terbatas dan mau bekerja keras ;

2) bukan pengusaha asli batik, yaitu terdiri dari pengusaha batik yang ingin usahanya cepat berhasil dan cepat menjadi kaya dengan cara memproduksi batik dengan desain populer yang mereka ambil dari produsen batik lainnya. Kelompok pengusaha batik ini banyak terdapat pada pengusaha batik kelas menengah

ke atas. Berbeda dengan pengusaha batik asli, maka bukan pengusaha asli batik, terkesan tidak memperdulikan masalah yang dihadapi oleh industri kecil batik. Mereka lebih berpikir bagaimana cara memperoleh keuntungan besar dan cepat, tanpa berpikir panjang akan akibatnya terhadap masa depan industri batik di Indonesia secara keseluruhan. Mereka menganjiri pasar batik dengan berbagai produk yang mereka tiru dari produk yang dihasilkan oleh produsen batik lainnya, akibatnya pasar batik cepat jenuh dan harga batik di pasaran menjadi tidak menentu.

Berdasarkan penelitian di lapangan, bahwa kebanyakan bukan pengusaha asli batik mempunyai sifat mudah meniru, dengan demikian tidak memiliki jiwa wiraswasta tulen. Biasanya mereka memperoleh pemodalan dengan mudah karena mempunyai dukungan fasilitas. Mereka ingin segera berhasil dengan meniru keberhasilan pengusaha lain, tanpa menyadari bahwa keberhasilan wiraswasta tulen sebenarnya mempunyai proses yang panjang. Sifat kelatihan dan ingin cepat berhasil ini, menyebabkan para bukan pengusaha asli batik kurang berhati-hati dalam menggunakan pemodalan, kurang memperhatikan gelombang usaha dan pasang surutnya kondisi perekonomian. Walaupun mereka memperhatikan gelombang usaha, mereka kurang mampu menjaga kelangsungan usahanya karena latar belakang kewiraswastaannya.

Sebagai akibatnya banyak pengusaha asli batik yang mengambil langkah aman, dengan segera berpindah pada kegiatan lain, yang lebih dapat diharapkan tanpa lebih jauh mempertimbangkan untung rugi dalam pemindahan kegiatan usaha ini, walaupun ada juga kemungkinan langkah tersebut membawa keberhasilan di bidang usaha lain. Oleh karena itu pada waktu usaha perbatikkan tampak cerah, ditambah lagi karena dukungan fasilitas dari pengusaha yang cukup merangsang, muncullah pengusaha-pengusaha batik baru yang sebagian besar tidak menguasai usaha perbatikkan.

Meningkatnya jumlah pengusaha batik akan menyebabkan penawaran batik meningkat, sehingga pasar batik menjadi jenuh dan produk melimpah, akibatnya harga jual merosot padahal mereka sudah terlanjur mempergunakan fasilitas dari pemerintah, antara lain kredit. Viraswasta semu yang tidak dapat mempertahankan usahanya, secara beramai-ramai mereka pun memindahkan kegiatan usahanya pada usaha lain. Namun, sayangnya usaha perbatikkan sering kali masih dipakai kedok sebagai alat untuk mendapatkan fasilitas dari pengusaha.

Di daerah penelitian banyak dijumpai tradisi bahwa usaha batik diserahkan pada anak tertua atau anak laki-laki untuk melanjutkan usahanya, bahkan sering dijumpai adanya pewarisan usaha batik kepada semua anaknya. Padahal jiwa wiraswasta orang

Perusahaan batik besar memiliki sendiri perusahaan pemintalan benang, pertemuan, industri kimia dan juga industri konveksi pakaian. Ongkos produksi dapat ditekan serendah-rendahnya, perkembangannya ini akan mematikan industri lain yang lebih kecil, terlihat dari adanya penurunan harga jual batik oleh industri besar di bawah ongkos produksi. Untuk sementara perusahaan batik besar tersebut akan mengalami kerugian, tetapi dalam jangka relatif panjang industri lain yang lebih kecil, tidak mengarah kepada semacam industri multinasional.

Di lain pihak pengusaha batik besar (printing), yang mendapatkan angin segar dengan peraturan pemerintah dapat memanfaatkannya. Industri batik berkembang dengan cepat dan terdapat tendensi untuk menguasai pasar, gejala oligopoli dan bahkan mengarah ke monopoli terlihat dalam pola usaha industri skala besar tersebut, terlebih lagi terlihat adanya tendensi yang persaingan di antara mereka sendiri.

antara perusahaan yang terpecah tersebut, bahkan seringkali terjadi menjadi semakin berat dengan tidak adanya kerja sama yang baik terpecah menjadi kecil, sesuai dengan jumlah anaknya, keadaan ini yang relatif rendah. Dengan cara pewarisan ini jelas skala usaha tersebut masih ditambah dengan latar belakang pendidikan formal perbatikan yang diperoleh dari orang tuanya juga terbatas, hal tuanya belum tentu diwarisi oleh anaknya, pengetahuan dalam hal

akan mampu menyimpan persediaan produk terpaksa mengurangi

kegiatannya.

Pengaruh tersebut paling dirasakan oleh industri batik yang tidak tergabung dalam suatu ikatan (subkontrak) dengan perusahaan lain. Pasar batik dikuasai oleh industri besar, disertai dengan kekuatan dalam menentukan tingkat harga, penawaran batik meningkatkan padahal permintaan di dalam negeri semakin menyempit, sedangkan pasar batik di luar negeri masih terbatas.

Kadaan tersebut dihipadapatkan pada kenyataan, bahwa beberapa negara lain juga menghasilkan produk serupa, bahkan mungkin dengan harga lebih rendah dan kualitas yang lebih baik, karena menggunakan teknologi yang lebih maju. Adanya pembatasan impor oleh konsumen batik Indonesia, seperti halnya dilakukan oleh Amerika Serikat, menyebabkan pasar batik ekspor berpindah ke dalam negeri. Kejenuhan pasar di dalam negeri tampaknya menghantui industri batik di Indonesia, kerajinan batik rakyat menghadapi kesulitan dengan semakin terbatasnya pembeli lokal masyarakat pedesaan, mendapat tekanan lebih berat lagi dengan melimpahnya produk yang seharusnya memasuki pasar ke luar negeri.

b. Pengelolaan usaha batik oleh perajin Batik Banyumasan

Sistem produksi pada industri batik yang berkembang saat ini adalah sistem subkontrak. Sistem subkontrak adalah hubungan kemitraan antara perusahaan mitra usaha dengan kelompok mitra usaha yang memproduksi kebutuhan yang diperlukan oleh perusahaan sebagai bagian dari komponen produksinya. Dalam rangka efisiensi kinerja perusahaan, bentuk kemitraan ini telah banyak diterapkan dalam kemitraan yang dilaksanakan antara pengusaha kecil dengan pengusaha besar dan menengah. Ciri khas dari bentuk kemitraan subkontrak adalah membuat kontrak bersama yang mencantumkan volume, harga dan waktu.¹²⁰⁾

Kemitraan pola subkontrak mempunyai keuntungan yang dapat mendorong terciptanya alih teknologi, modal dan keterampilan serta menjamin pemasaran produk kelompok mitra usaha. Tetapi juga terdapat beberapa kelemahan yang dijumpai dalam pelaksanaan kemitraan subkontrak. Kemitraan subkontrak seringkali memberikan kecenderungan mengisolasi produsen kecil sebagai subkontrak pada satu bentuk hubungan monopoli dan monopsoni, terutama penyediaan bahan baku dan pemasaran, yaitu terjadi penekanan terhadap harga input yang tinggi dan harga produk yang rendah, kontrol kualitas produk yang ketat dan sistem

¹²⁰⁾ Muhammad Jafar Hafid, *Kemitraan Usaha Konsep dan Strategi*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2000, hal 72.

pembayaran yang sering terlambat, serta sering terjadi eksploitasi tenaga untuk mengejar target produksi.

Kelemahan pola komitmen subkontrak terjadi pula pada industri batik, karena sejak masa pemerintahan Hindia Belanda sampai dengan sekarang perajin batik selalu berada pada posisi yang lemah dan selalu mengalami ketergantungan baik dari segi penyediaan bahan baku, modal kerja dan pemasaran. Peraturan yang berlaku saat ini belum mendukung berkembangnya industri kecil batik pada khususnya. Walaupun keberadaan industri batik sudah cukup lama, namun tidak mengalami perkembangan dari segi kemampuan mengakumulasi modal, teknologi, management dan pemasaran.¹²¹⁾

Pembinaan terhadap pelaksanaan pola subkontrak sangat dibutuhkan, baik oleh pemerintah yang memberikan pembinaan secara berkelanjutan melalui penerapan kebijaksanaan yang tegas dan tindakan yang kongkret secara konsisten di dalam pelaksanaan komitmen tersebut, dalam rangka melindungi pengusaha kecil terhadap penyimpangan dari pelaksanaan hubungan komitmen tersebut.

Sistem subkontrak atas dua pelaku utama, yaitu pihak prinsipal (kontraktor) yang menyediakan modal berupa kain mori dan pihak subkontraktor yang mengerjakan proses pembuatan batik. Pihak subkontraktor mempunyai kewajiban menyerahkan

¹²¹⁾ *Ibid*, hal 73.

hasil pekerjaannya kepada kontraktor yang akan memasarkan hasil produksinya. Pada dasarnya subkontraktor adalah buruh/pekerja, pihak subkontraktor memperoleh pendapatan dari selisih antara upah subkontraktor yang diberikan oleh kontraktor dan biaya produksi yang dikeluarkan. Biaya produksi yang dikeluarkan oleh pihak subkontraktor mencakup upah tenaga kerja, bahan bakar dan pewarna.¹²²⁾

Pada industri batik, pembagian kerja berdasarkan usia dan jenis kelamin. Tafsiran tentang bobot dan kepantasan pekerjaan berbeda-beda pada setiap masyarakat dan juga berubah menurut perkembangan zaman. Nilai yang dianut, baik agama, norma, adat istiadat sangat mempengaruhi penilaian masyarakat tentang bobot dan kepantasan pekerjaan. Jenis pekerjaan yang dulu dianggap berat sehingga tidak pantas dikerjakan oleh perempuan, sekarang bisa dianggap wajar bila dilakukan oleh perempuan.

Pembagian kerja tersebut antara lain untuk melakukan jenis pekerjaan ngelir atau nglorot dan melipat kain, biasanya dikerjakan oleh buruh/pekerja laki-laki karena pekerjaan tersebut cukup berat. Sedangkan buruh/pekerja perempuan, biasanya membironi, mopok atau melapis lilin dan menggunakan canting. Hal penting dari pembagian kerja tersebut adalah perbedaan upah, antara buruh/pekerja laki-laki dan perempuan. Perbedaan itu tidak pernah

¹²²⁾ Dedi Haryadi dan Indrasari Tjandraningsih, *Buruh Anak dan Dinamika Industri Kecil*, Akatiga, Bandung, 1995, hal 38.

muncul sebagai suatu masalah hubungan kerja yang perlu diselesaikan. Hal ini disebabkan bahwa pihak majikan, buruh/pekerja laki-laki dan perempuan menganggap hal tersebut adalah suatu kenyataan yang memang sudah harus sewajarnya terjadi.

Para pekerja tersebut juga tidak memandang adanya unsur diskriminatif dalam hal upah, karena yang menjadi dasar penentuan upah bukanlah jenis kelamin, melainkan berat ringannya pekerjaan. Pembagian kerja antara perempuan dan laki-laki juga terlihat pada tingkat majikan. Hampir semua unit usaha pembatikan dikelola laki-laki. Sebagian besar pengambilan keputusan yang berkaitan dengan alokasi penggunaan faktor-faktor produksi sepenuhnya berada di tangan laki-laki. Perempuan dalam pengelolaan jenis industri ini mengambil peran kecil saja, misalnya ikut membayarkan upah ketika hari pembayaran upah tiba. Memang ada juga perempuan yang menjadi pengelola usaha, namun hal ini terjadi karena suaminya meninggal atau telah bercerai.

Unit usaha pada industri batik dimiliki oleh pihak kontraktor dan pihak subkontraktor dengan skala usaha berbeda. Skala unit usaha batik subkontraktor lebih kecil dari skala unit usaha kontraktor. Skala unit usaha batik subkontraktor juga berbeda-beda menurut kemampuan produksinya. Kemampuan produksi unit usaha subkontraktor, pada umumnya adalah antara 30-100 kodil. Unit

usaha tersebut umumnya hanya masalah produksi, sedangkan pemasaran dan pengadaan bahan baku, biasanya merupakan tanggung jawab kontraktor. Kemampuan masing-masing unit usaha menyerap tenaga kerja berbeda-beda tergantung pada kemampuan produksi.¹²³⁾

Tetapi secara umum satu unit usaha mempunyai tenaga kerja antara 5-30 orang. Menurut pemilik unit usaha, dari jumlah tenaga kerja yang diserap dapat dibuat klasifikasi skala usaha, unit usaha kecil mempekerjakan 1-5 orang tenaga kerja, unit usaha menengah 6-15 orang dan unit usaha besar mempekerjakan lebih dari 15 orang tenaga kerja. Sebagian besar diantara buruh yang diambil itu adalah perempuan, kecuali untuk jenis batik abstrak yang dikerjakan oleh laki-laki.

Masing-masing skala usaha menghadapi masalah ketenagakerjaan yang berlainan. Unit usaha skala besar, misalnya memberikan upah sedikit lebih tinggi dibandingkan pengusaha lain sehingga kesulitan mencari tenaga ahli tidak begitu dirasakan. Bagi unit usaha skala kecil karena tidak bisa memberikan insentif yang lebih menarik, agak menghadapi kesulitan untuk merekrut tenaga ahli, seperti halnya tukang nglorot dan tukang mencampur warna. Biasanya kalau tukang nglorot tidak masuk, maka pemilik usaha sendiri yang mengantikannya.

Usaha rumah tangga rata-rata mengalami kesulitan dalam merekrut buruh, karena buruh pembatik lebih suka bekerja di pabrik daripada di unit usaha rumah tangga. Pekerjaan di pabrik menawarkan tingkat upah yang tetap, meskipun bisa jadi lebih rendah dari tingkat upah yang ditawarkan unit usaha rumah tangga. Bekerja di pabrik juga menawarkan kontinuitas kerja sepanjang tahun. Hal ini sangat berbeda dengan bekerja di unit usaha rumah tangga yang bekerja secara musiman. Kerja musiman dipengaruhi oleh pergantian musim kemarau dan musim penghujan. Pada musim penghujan kegiatan pembuatan batik bisa berhenti karena proses penjemuran tidak bisa dilakukan. Sementara pada unit usaha rumah tangga, pekerjaan dipengaruhi pula oleh kontinuitas order. Bagi subkontraktor kontinuitas order sangat menentukan adanya pekerjaan sepanjang tahun.

Permintaan tenaga kerja industri batik secara kualitatif dan kuantitatif, biasanya diambil dari pasar tenaga kerja setempat. Tingkat pendidikan formal buruh/pekerja umumnya rendah, berkisar antara yang tidak sekolah, putus sekolah SD, lulus SD, putus sekolah SMP dan lulus SMP. Buruh perempuan umumnya mempunyai tingkat pendidikan yang lebih rendah dari buruh laki-laki. Rendahnya tingkat pendidikan formal antara lain tercermin dari kemampuan berbahasa Indonesia, terutama untuk buruh/pekerja yang sudah berusia lanjut. Buruh/pekerja yang lebih muda dengan

tingkat pendidikan lebih baik mempunyai kemampuan berkomunikasi dalam bahasa Indonesia yang lebih baik.

Perbedaan tingkat pendidikan tidak menjelaskan masalah upah, karena memang sistem upah yang berlaku dalam industri batik tidak mengedepankan pendidikan sebagai ukuran dalam pemberian upah. Latar belakang buruh kebanyakan tidak berbeda jauh dengan latar belakang orang tuanya, artinya kebanyakan buruh batik sekarang adalah anak dari orang tua yang juga berstatus sebagai buruh/pekerja batik. Kualifikasi buruh/pekerja yang dibutuhkan industri batik bermacam-macam, sesuai dengan tahap proses produksi.

Setiap tahap proses produksi mempunyai tingkat kesulitan tertentu. Pekerjaan paling sulit dalam industri batik adalah menjadi tukang obat (pewarna). Kesulitan terletak pada menciptakan warna-warna tertentu, seorang tukang warna dituntut untuk bisa menghasilkan warna biru yang lebih menarik, sehingga memiliki konsumen. Buruh yang menguasai jenis keterampilan ini dianggap sebagai ahli, biasanya buruh yang mempunyai keahlian ini kemudian akan mencoba membuka usaha pembatikkan sendiri.

Pemilik unit-unit usaha rumah tangga pembatikkan biasanya menguasai teknologi pewarnaan. Tukang menggambar dalam pembuatan batik tulis juga dapat dikategorikan sebagai ahli. Seorang tukang gambar dituntut untuk selalu kreatif dan inovatif

Sistem upah yang dikenal dalam industri batik ada dua macam, yaitu sistem upah harian dan sistem upah borongan. Jenis pekerjaan yang dikenal sistem upah harian adalah ngelir dan nglorot, sedangkan jenis pekerjaan lain dikenalkan upah borongan. Sistem upah harian memungkinkan seorang buruh nglorot mendapatkan upah relatif tetap, karena jam kerja tercurah juga relatif tetap. Sementara upah bagi buruh yang dikenali sistem upah borongan, dipengaruhi oleh volume kerja yang diselesaikan per satu satuan waktu. Besar upah buruh selain dipengaruhi sistem upah

seorang pekerja bisa meningkatkan pendapatannya.

upah borongan penguasaan keterampilan mencap inilah maka sistem upah yang dipakai adalah sistem borongan. Dengan sistem diberlakukan adalah sistem harian, sedangkan sebagai tukang cap menjadi tukang nyuci atau tukang nglorot sistem upah yang keterampilan, juga pada perubahan sistem pengupahan. Pada saat tukang cap. Perpindahan ini selain menuntut perlunya penguasaan laki-laki berganti pekerjaan dari tukang nyuci atau nglorot menjadi dengan cara melakukan alih pekerjaan, misalnya seorang pekerja Meningkatkan pendapatan atau upah pekerja bisa dilakukan

mempertahankan kelangsungan hidup usaha batik.

menghasilkan desain baru atau menui desain lain dengan tambahan kreativitas baru. Kreativitas dalam pewarnaan dan desain merupakan unsur sangat penting untuk menjaga dan

juga dipengaruhi jenis pekerjaan serta bahan kain yang digunakan. Untuk jenis pekerjaan yang sama, upah membuat pada kain sutera lebih tinggi dibandingkan upah membuat di atas kain mori. Pekerjaan ngelir dan nglorot yang dikategorikan pekerjaan berat mendapat upah lebih tinggi dibandingkan dengan pekerjaan nembok atau membironi.

Bekerja dengan sistem upah harian, membuat jam kerja menjadi tetap dan teratur. Dalam sehari buruh/pekerja bekerja selama 8 jam, dengan diselingi 1 jam istirahat pada siang hari dan tidak dikenal jam kerja lembur. Berbeda dengan buruh yang dikenai sistem upah harian, waktu kerja buruh/pekerja yang dikenal sistem upah borongan, waktu kerjanya tidak tetap dan tidak teratur. Jam kerja mereka sangat akan berpengaruh pada volume pekerjaan yang berhasil diselesaikan. Dengan demikian maka upah yang mereka terima akan dipengaruhi pula jam kerja yang ada. Walau pun jam kerjanya tidak terikat dalam satu ukuran waktu tertentu, namun dapat dihitung curahan jam kerja buruh/pekerja borongan rata-rata sama dengan waktu jam kerja buruh/pekerja harian, yaitu sekitar 8 jam per hari.

Dalam struktur pengupahan industri batik, upah untuk buruh/pekerja laki-laki lebih tinggi daripada upah buruh/pekerja perempuan, hal ini disebabkan karena jenis pekerjaannya. Pengaturan jam kerja yang paling leluasa ditemukan pada

buruh/pekerja yang bekerja di unit-unit rumah tangga. Mereka adalah ibu rumah tangga yang mengambil pekerjaan membatik dari seorang juragan batik. Mereka mengambil pekerjaan itu dari seorang majikan kemudian dibawa ke rumah dan dikerjakan secara bersama dengan atau tanpa anak perempuan dan tetangganya, pekerjaan yang biasa mereka lakukan adalah mbironi, nombok dan nyolet. dengan cara demikian, maka pekerjaan rumah tangga seperti halnya mengasuh anak dan memasak bisa dilakukan bersamaan dengan kegiatan membatik, untuk mencari penghasilan.¹²⁴⁾

Bagi pengusaha industri kecil batik, keterkaitannya dengan pertanian menimbulkan masalah tersendiri dalam usaha untuk mengembangkan industrinya. Masalah yang muncul dari keterkaitan tersebut adalah bagaimana memperoleh pekerja/buruh batik yang mau bekerja sebagian pekerja/buruh tetap dalam industri kecil batik. Biasanya buruh di industri kecil batik akan meninggalkan pekerjaan mereka ketika musim tanam di pertanian tiba. Masalah ini akan menjadi serius bagi pengusaha industri batik, apabila waktu bagi industri batik datang bersamaan dengan waktu di sektor pertanian, seperti halnya pada bulan-bulan menjelang hari raya. Pada bulan-bulan tersebut para pengusaha industri kecil batik membutuhkan banyak buruh batik untuk mengejar target produksi dalam memenuhi kebutuhan akan kain batik.

Untuk memecahkan masalah ini para pengusaha industri batik kecil terpaksa harus menaikkan upah buruh agar tetap bekerja di perusahaan mereka. Namun usaha ini tidak selalu berhasil, karena para pengusaha industri batik kecil, juga harus bersaing dengan industri batik besar. Seperti halnya pengusaha industri batik kecil, para pengusaha besar batik juga membutuhkan banyak buruh batik, dalam menghadapi kemungkinan naiknya permintaan kain batik pada hari raya. Untuk mencapai tujuan ini, biasanya sejak dini para pengusaha industri batik telah mengirimkan orang mereka, di daerah pedesaan yang menjadi sentra pembatikan untuk merekrut buruh batik. Kepada para buruh tersebut kemudian diberikan uang panjer, dengan janji mereka akan bekerja di perusahaan industri besar batik pada bulan-bulan menjelang hari raya, tentu saja dengan upah lebih tinggi daripada yang mereka terima, apabila tetap bekerja di perusahaan industri kecil batik.

Akibatnya para pengusaha industri kecil batik tidak mampu menggunakan kesempatan untuk memperoleh keuntungan ketika terjadi kenaikan permintaan kain batik. Para pekerja/buruh yang semula bekerja di sawah atau bekerja di industri besar batik akan kembali ke desa ketika hari raya tiba, sehingga keberadaan mereka di desa tidak lagi dapat dimanfaatkan oleh para pengusaha industri kecil batik, untuk memperoleh keuntungan dari naiknya permintaan kain batik.

Pada dasarnya pasaran batik tradisional bagi kain batik kasar

produksi industri kecil batik adalah kaum ibu di daerah pedesaan. Hal ini berarti bahwa permintaan kain batik kasar tersebut sangat tergantung dari tinggi rendahnya pendapatan keluarga petani di daerah pedesaan. Pendapatan petani yang rendah, akan mempersempit kemampuan mereka untuk membeli kain batik.

Masalahnya menjadi lebih rumit bagi para pengusaha industri kecil batik, ketika terjadi perubahan cita rasa di kalangan penduduk pedesaan sebagai akibat dari membanjirnya produk industri besar seperti batik printing yang mempunyai kualitas lebih bagus. Modernisasi masyarakat pedesaan juga mempengaruhi cita rasa penduduk pedesaan, khususnya generasi muda perempuan pedesaan yang lebih suka memakai baju rok daripada mengenakan kain batik, seperti yang semula digunakan oleh ibu-ibu mereka. Keadaan ini berbeda dengan di India, di mana kalangan perempuan India baik di pedesaan maupun di perkotaan, masih tetap memakai kain sari, sehingga industri kecil penghasil kain sari, tidak mengalami kesulitan untuk memasarkan produk mereka di dalam negeri.

c. Pengaruh kebijaksanaan pemerintah pada perajin Batik

Banyumasan

Pada awal tahun 1900, pemerintah Hindia Belanda menerbitkan dokumen, yang berisi tentang status perkonomian rakyat di Indonesia, khususnya di Jawa. Dokumen tersebut berisi tentang Status Perusahaan Batik di Indonesia, dokumen itu kemudian dikenal dengan *Batik Rapport*.¹²⁵⁾

Dokumen tersebut dikeluarkan karena pada saat itu terjadi penurunan kesejahteraan pada anggota masyarakat pedesaan yang menumpukan hidup pada sektor industri rumah tangga, khususnya usaha perbatikan. Industri rumah tangga perbatikan yang pada saat itu menjadi tumpuan hidup rakyat pedesaan, menghadapi kesulitan besar karena kebijaksanaan pemerintah Hindia Belanda menjadikan Indonesia sebagai pasar bagi tekstil impor dari Belanda.

Kebijaksanaannya yang dikeluarkan adalah penggunaan teknologi baru, yaitu teknologi cap dan adanya monopoli bahan mentah batik oleh sekelompok pedagang Cina. Akibatnya industri rumah tangga batik di daerah pedesaan Pulau Jawa mati, mengakibatkan masyarakat di Pulau Jawa kehilangan sumber penghasilan selain pertanian. Para pedagang Cina selain memonopoli bahan mentah yang dibutuhkan oleh pengusaha batik pribumi, tetapi juga menanamkan modal dalam industri batik. Para

¹²⁵⁾ Loekman Soetrisno, *op.cit.*, 1997, hal 24.

c. Pengaruh kebijaksanaan pemerintah pada perajin Batik

Banyumasan

Pada awal tahun 1900, pemerintah Hindia Belanda menerbitkan dokumen, yang berisi tentang status perkonomian rakyat di Indonesia, khususnya di Jawa. Dokumen tersebut berisi tentang Status Perusahaan Batik di Indonesia, dokumen itu kemudian dikenal dengan *Batik Rapport*.¹²⁵⁾

Dokumen tersebut dikeluarkan karena pada saat itu terjadi penurunan kesejahteraan pada anggota masyarakat pedesaan yang menumpukan hidup pada sektor industri rumah tangga, khususnya usaha perbatikan. Industri rumah tangga perbatikan yang pada saat itu menjadi tumpuan hidup rakyat pedesaan, menghadapi kesulitan besar karena kebijaksanaan pemerintah Hindia Belanda menjadikan Indonesia sebagai pasar bagi tekstil impor dari Belanda.

Kebijaksanaannya yang dikeluarkan adalah penggunaan teknologi baru, yaitu teknologi cap dan adanya monopoli bahan mentah batik oleh sekelompok pedagang Cina. Akibatnya industri rumah tangga batik di daerah pedesaan Pulau Jawa mati, mengakibatkan masyarakat di Pulau Jawa kehilangan sumber penghasilan selain pertanian. Para pedagang Cina selain memonopoli bahan mentah yang dibutuhkan oleh pengusaha batik pribumi, tetapi juga menanamkan modal dalam industri batik. Para

¹²⁵⁾ Loekman Soetrisno, *op.cit.*, 1997, hal 24.

pedagang Cina selain mempunyai modal yang kuat, juga mempunyai peralatan yang lebih modern.

Untuk menghadapi persaingan dagang dari para pedagang Cina, maka Haji Samanhudi seorang pedagang dan usahawan batik pribumi, mendirikan organisasi Sarekat Dagang Islam Indonesia, yang beranggotakan pedagang dan usahawan batik pribumi. Walaupun organisasi tersebut mendirikan koperasi yang mampu mematahkan monopoli pedagang Cina dalam penyediaan bahan baku, tetapi gagal membandung masuknya modal pedagang Cina dalam industri batik. Pada akhirnya pengusaha Cina dan Belanda tetap mendominasi industri batik modern, sampai tahun 1942. Walaupun kekuasaan pemerintah Hindia Belanda telah berakhir, sampai saat ini para pedagang dan perajin batik tetap berstatus sebagai pedagang/pengusaha kecil, mereka tidak mampu mengubah diri menjadi pedagang atau pengusaha besar.

Setelah masa kemerdekaan industri batik tradisional kembali berkembang, tetapi hanya berlangsung sampai dengan tahun 1970-an. Karena pemerintah mengeluarkan kebijaksanaan industrial untuk memenuhi kebutuhan tekstil dalam negeri dan ekspor, dengan membuka penanaman modal dan penggunaan teknologi modern. Hasil dari kebijaksanaan ini adalah bermunculan industri tekstil modern, industri pakaian jadi dan industri batik printing.

Pemerintah Orde Baru pada saat itu menghadapi suatu pilihan yang dilematis, ketika mulai melakukan pembangunan industri dan mengatasi kesulitan sandang rakyat Indonesia. Membantu pengembangan industri batik printing berarti dapat memenuhi kebutuhan sandang nasional, tetapi mematikan industri kecil batik atau membantu industri kecil batik tetapi tujuan

kalah bersaing dengan industri batik printing. bila tidak ingin melihat usaha mereka menderita kerugian karena pengusaha industri kecil batik terpaksa harus mengurangi produksi yang lebih murah. Dalam situasi seperti ini para mampu memproduksi kain batik lebih banyak dengan ongkos industri kecil batik untuk bersaing dengan industri batik printing yang Bagi industri kecil batik, maka kebijaksanaan ini memaksa singkat.

mampu meningkatkan produksi kain batik dalam waktu yang target pemerintah, seperti halnya dalam industri batik printing yang industri besar yang mampu meningkatkan produksi sesuai dengan bantuan lain yang disediakan pemerintah akan ditunjukkan bagi besar yang memperoleh keuntungan. Bantuan keuangan maupun meningkatkan produksi, menyebabkan hanya pengusaha bermodal dirugikan. Kebijaksanaan industrial yang ditunjukkan hanya untuk besar bagi negara, tetapi di sisi lain industri kecil batik sangat Mengang kebijaksanaan tersebut memberikan keuntungan

pemenuhan kebutuhan sandang nasional lamban terpenuhi. Jalan keluar yang ditempuh pemerintah untuk mengatasi dilema tersebut, adalah dengan memberikan prioritas kepada tercapainya kebutuhan sandang nasional dengan mendukung berdirinya pabrik-pabrik industri sandang besar seperti halnya industri batik printing, kemudian baru mengulurkan tangan untuk membantu industri kecil batik ketika kebutuhan sandang telah tercukupi. Sayangnya ketika hal tersebut terjadi, industri kecil batik sudah tidak berdaya, karena pasar kain batik telah dikuasai oleh batik hasil industri batik printing.

Salah satu aspek lain yang menarik untuk dicermati dari kebijaksanaan industrial pemerintah dalam pengembangan industri kecil batik, adalah menyangkut falsafah dasar yang digunakan oleh pemerintah untuk mempertahankan dan memelihara batik sebagai peninggalan kebudayaan tradisional. Pemerintah dalam melakukan pembinaan industri kecil batik, tidak memandang batik sebagai bahan perdagangan. Hal ini dapat dilihat bahwa materi penyuluhan yang diberikan oleh para penyuluh lapangan, lebih ditekankan pada peningkatan kemampuan teknis para pengusaha dan buruh batik, seperti halnya dalam memproses kain, mencampur obat dan sebagainya. Sedangkan masalah desain atau rancangan pola baru kain batik, tidak pernah diajarkan oleh para penyuluh.¹²⁶⁾

Padahal saat ini kompetisi batik, justru pada siapa yang mampu menampilkan desain terbaik pada produk kain batiknya,

maka akan menguasai pasar. Desain atau rancang pola yang baik adalah desain atau rancang pola batik yang mampu memenuhi cita rasa manusia modern Indonesia dan manusia modern di luar negeri, apabila ingin mempunyai pasar di dalam negeri dan di luar negeri. Desain atau rancang pola batik yang baru merupakan kunci kemandirian usaha, untuk mampu bersaing di pasar nasional dan internasional. Walaupun terdapat bahan baku dan modal cukup tersedia, tetapi bila desain atau rancang pola batik yang diproduksi tidak menarik, maka perusahaan batik tersebut tetap aman mati, karena tidak ada yang berminat membeli.

Pemerintah dapat membantu para pengusaha industri kecil batik dengan mengoptimalkan para sarjana seni dan sarjana hukum Indonesia, sebagai penyuluh batik. Penyuluh batik bertugas untuk membantu pengusaha industri kecil batik, dalam pembuatan desain atau rancang pola batik baru. Dengan demikian industri kecil batik akan selalu dapat menghasilkan produk yang eksklusif dan kompetitif, sehingga memperluas pemasaran produk. Para penyuluh batik ini juga berfungsi untuk melakukan penyuluhan dan pendampingan, dalam pendaftarkan desain baru tersebut pada Ditjen HAKI. Hal ini dilakukan untuk menjaga agar desain atau rancang pola batik yang dihasilkan oleh industri kecil tersebut tidak ditiru/dijiplak oleh pengusaha industri batik printing atau pengusaha batik yang lain.

Pendaftaran bisa dilakukan atas nama pendesain/desainer sendiri ataupun atas nama koperasi dimana pendesain/desainer tersebut tergabung. Para sarjana seni dan sarjana hukum yang bertugas sebagai penyuluh batik ini, juga harus diperhatikan kesejahteraan dan penghasilan yang layak, sehingga mereka juga terpacu untuk terus mendampingi para pendesain/desainer batik untuk terus menghasilkan karya desain atau rancang pola batik baru. Peran masyarakat dalam mengembangkan industri kecil batik juga sangat penting, semangat nasionalisme harus tumbuh di jiwa masyarakat, bahwa bangsa Indonesia juga mampu menghasilkan produk yang berkualitas dan bisa menjadi tuan rumah di negara sendiri.

Industri batik bila dioptimalkan secara maksimal oleh pemerintah, sebenarnya dapat banyak berperan dalam kegiatan perekonomian saat ini. Industri batik dapat menyediakan alternatif lapangan pekerjaan bagi masyarakat di daerah atau pedesaan, dan juga bagi para sarjana seni dan sarjana hukum yang ingin menjadi penyuluh batik. Bila hal tersebut bisa terlaksana, maka industri batik dapat memberikan sumbangan devisa kepada negara, sekaligus melestarikan budaya bangsa. Macam produk dan desain batik, harus dikembangkan sesuai dengan selera dan permintaan pasar, demikian pula perkembangan teknik produksinya, sejajar dengan perkembangan teknologi industri lain. Pengoptimalan industri batik,

dapat menjadi alternatif pilihan bagi para pembuat kebijaksanaan di negara ini, untuk membuat kebijaksanaan yang lebih adil dan bermanfaat bagi masyarakat secara luas.

PENUTUP

BAB IV

A. Kesimpulan

Bertitik tolak dari hasil penelitian dan kajian pustaka terhadap perlindungan hukum desain industri batik banyumasan, prinsip *kebaruan/novelty* desain industri batik banyumasan dan hambatan-hambatan yang dihadapi oleh para pengusaha batik banyumasan untuk melindungi desain industrinya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Perlindungan hukum desain industri pada perajin batik banyumasan, baru pada tahap sosialisasi dan perencanaan pelatihan oleh Disperindagkop Kabupaten Banyumas yang bekerja sama dengan Ditjen HAKI dan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas. Hal ini dilakukan karena mengingat bahwa desain industri adalah bentuk perlindungan HAKI yang masih baru, sehingga membutuhkan persiapan dan pengenalan yang cukup lama pada perajin batik banyumasan, untuk dapat memahami dan bersedia untuk mendaftarkan desain batiknya. Pada masa sosialisasi desain industri ini, perajin batik banyumasan berinisiatif untuk mengkolongkan desain batik banyumasan yang perlu dilindungi dan teknik pembuatan desain batik banyumasan yang juga perlu mendapatkan perlindungan hukum desain industri, secara swadaya. Pengkolongan desain batik dan teknik

pembuatan batik oleh perajin batik banyumasan, dirasakan perlu dilakukan sebagai perlindungan sementara dan untuk memudahkan bila nanti desain batik tersebut akan didaftarkan desain industrinya.

2. Sifat masyarakat banyumas yang komunal dan menganggap bahwa suatu desain adalah milik bersama, sehingga sangat menyulitkan untuk memenuhi syarat pendaftaran desain industri, yaitu suatu desain yang dihasilkan harus mengandung unsur kebaruan atau *novelty*. Perajin banyumasan cukup puas bila hasil dari membuat, dapat memenuhi kebutuhan hidup rumah tangganya. Bagi mereka penemuan baru desain batik adalah milik keluarga atau bersama, karena itu tukar menukar desain cap dan desain tulis adalah suatu hal yang lumrah. Perajin batik banyumasan justru merasa bangga bila desainnya dipakai atau dijiplak oleh orang lain, karena bagi mereka dapat membuat terkenal dan sebagai wujud berbagi atau peduli kepada sesama perajin batik banyumasan.

3. Sikap perajin batik banyumasan yang apatis terhadap aparat pemerintah yang bertanggung jawab pada masalah HAKI menjadi masalah yang cukup berat untuk diselesaikan. Peran Pemda Kabupaten Banyumas, Disperindagkop Kabupaten Banyumas dan Ditjen HAKI, yang terkesan lamban dan seadanya dalam mengadakan sosialisasi, penyuluhan dan pelatihan terhadap masalah HAKI pada umumnya dan desain industri pada khususnya, menjadi masalah yang cukup sulit untuk diatasi. Perajin batik banyumasan merasa tidak mendapat cukup perhatian dari

aparatus pemerintah tersebut dan berbagai keluhan juga ditanggapi dengan sikap kurang memuaskannya, menyebabkan mereka enggan berurusan dengan aparat pemerintah. Dengan adanya kendala tersebut, maka perajin batik banyuwanas mengalami kesulitan untuk melindungi desain batiknya.

B. Saran

Berikut tolak dari hasil penelitian dan kajian pustaka terhadap perlindungan hukum desain industri pada industri batik banyuwanas, prinsip *kebaruan/novelty* desain industri batik banyuwanas dan hambatan-hambatan yang dihadapi oleh para pengusaha batik banyuwanas untuk melindungi desain industrinya, maka kami memberikan saran sebagai masukan, sebagai berikut :

1. Kerajinan batik merupakan kerajinan rakyat Indonesia, sehingga banyak daerah yang mempunyai sentral batik dan masing-masing memiliki desain yang berbeda-beda, serta sebagian besar dari usaha mereka juga tidak mendapatkan perlindungan hukum desain industri. Seandainya mereka dioptimalkan perannya untuk menciptakan desain baru dan melindungi desain batiknya, maka dapat menghasilkan kegiatan ekonomi rakyat yang besar, sehingga batik mempunyai nilai ekonomi yang tinggi, hal ini juga menyebabkan terbukanya lapangan kerja untuk mengatasi banyaknya pengangguran yang ada saat ini.

2. Diperlukan usaha keras, untuk mengubah cara pandang tradisional para pengusaha industri batik banyumasan, dengan cara pandang baru yang lebih modern dan tentu saja disesuaikan dengan situasi yang kondusif, dalam menjalankan usahanya. Pengusaha batik banyumasan harus berani mengambil resiko dan tanggap terhadap perubahan pasar, serta berani melakukan inovasi baru untuk menghasilkan desain baru.

3. Hambatan-hambatan pada perajin batik banyumasan, seperti halnya masalah permodalan, penggunaan teknologi tradisional, ketergantungan yang besar terhadap fasilitas dari pemerintah, struktur organisasi masih sederhana, jumlah tenaga kerja terbatas dan pembagian kerja kurang jelas, permasalahan yang terbatas. Harus segera dilatasi oleh aparat pemerintah terkait dan bekerja sama dengan perajin batik banyumasan

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arief, Sritua, Pembangunanisme dan Ekonomi Indonesia
Pemberdayaan Rakyat Dalam Arus Globalisasi, Zaman Wacana
Mulia, Bandung, 1998.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendaffaran Praktek*,
Rineka Cipta, Bandung, 1993.
- , *dkk, Ekonomi Kerakyatan*, Muhammadiyah University
Press, Surakarta, 2001.
- Badruzaman, Mariam Darius, *dkk, Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra
Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Baswir, Revisond, *Agenda Ekonomi Kerakyatan*, Pustaka Pelajar,
Yogyakarta, 1997.
- Bintang, Sanusi, dan Dahlan, *Pokok-Pokok Hukum Ekonomi dan
Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Biro Hukum dan Organisasi Disperindagkop, *Terjemahan Resmi
Persetujuan Akhir Putaran Uruguay*, Disperindagkop, Jakarta, 1996.
- Boediono, *Indonesia Menghadapi Ekonomi Global*, BPFE, Yogyakarta,
2001.
- Bowett, D.W., *Hukum Organisasi Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta,
1991.

- Cahyono, Bambang Tri, *Teori dan Praktek Kewiraswastaan Tinjauan Psikologi Industri*, Liberty, Yogyakarta, 1983.
- Daryanto, *Teknik Pembuatan Batik dan Sablon*, Aneka Ilmu, Semarang, 1981.
- Djumhana, Muhamad, *Hukum Desain Industri di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.
- , dan Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual Sejarah Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Gambiro, Ita, *RUU Desain Produk Industri*, Gramedia, Jakarta, 1992.
- Erawaty, Ely, dkk, *Himpunan Makalah Rangkuman Diskusi dan Kesimpulan Seminar, Membenahi Perilaku Bisnis Melalui Undang-Undang no. 5 Tahun 1999, Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Ferryanto, S.G., *Dasar-Dasar Penulisan Teknik Laporan dan Makalah Sains dan Rekayasa*, Gramedia Widiasarana, Indonesia, Jakarta, 1997.
- Fuady, Munir, *Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori dan Praktek*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- , *Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Gambiro, Ita, *RUU Desain Produk Industri*, Gramedia Offset, Jakarta, 1992.

- Gautama, Sudargo, *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Bina Cipta, Jakarta, 1987.
- , *Segi-Segi Hukum Perdagangan Internasional GATT dan GSP*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994.
- , dan Rizawanto Winata, *Hak Atas Kekayaan Intelektual Peraturan Baru Desain Industri*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Habbie, B.J., *dkk*, *Liberasasi Ekonomi Pemerataan dan Kemiskinan*, Tiara Wacana, Yogyakarta, 1995.
- Hafsa, Mohammad Jafar, *Kemitraan Usaha Konsep dan Strategi*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2000.
- Hartono, Sri Redjeki, *Kapita Selekta Hukum Ekonomi*, Mandar Maju, Bandung, 2000.
- Hartono, Sunaryati, *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, Trimitra Mandiri, Jakarta, 1999.
- Haryadi, Dedi, *dkk*, *Tahap Perkembangan Usaha Kecil Suatu Dinamika dan Peta Potensi Petumbuhan*, Akatiga, Bandung, 1998.
- Hasanuddin, *Batik Pesisiran Melacak Pengaruh Etos Dagang Santri Pada Ragam Hias Batik*, Kiblat Buku Utama, Bandung, 2001.
- Kartadjoemena, H.S., *GATT, WTO dan Hasil Uruguay Round*, UI-Press, Jakarta, 1997.
- Koderi, M., *Banyumas Wisata dan Budaya*, Metro Jaya, Purwokerto, 1991.

- Kunio, Yoshihara, *Kapitalisme Semu Asia Tenggara*, LP3ES, Jakarta, 1990.
- Manalu, Paingot Rame, *Hukum Dagang Internasional Pengaruh Globalisasi Ekonomi Terhadap Hukum Nasional Khususnya Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2000.
- Maryatmo, dk, *Kumpulan Tulisan Dari Masalah Usaha Kecil Sampai Masalah Ekonomi Makro*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 1996.
- Maulana, Insan Budi, *Kumpulan Perundang-Undangan di Bidang HAKI*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Mubyarto, *Ekonomi Rakyat Program IDT dan Demokrasi Ekonomi Indonesia*, Aditya Media, Yogyakarta, 1997.
- , *Reformasi Sistem Ekonomi Dari Kapitalisme Menuju Ekonomi Kerakyatan*, Aditya Media, Yogyakarta, 1998.
- Muhammad, **Abdulkadir**, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Moelyatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 1994.
- Nasution, S., *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Tarsito, Bandung, 1992.
- , dan M. Thomas, *Buku Penuntun Membuat Thesis*, Skripsi, Disertasi, Makalah, Bumi Aksara, Jakarta, 2000.

- Rahardjo, Satjpto, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Alumni, Bandung, 1979.
- , *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Ramli, Ahmad, *Hak Atas Kekayaan Intelektual Teori Dasar Perlindungan Rahasia Dagang*, Mandar Maju, Bandung, 2000.
- Riady, Mochtar, *Mencari Peluang di Tengah Krisis*, Universitas Pelita Harapan Press, Jakarta, 1999.
- Ristek, *Berkreasi dan Berprestasi Melalui Hak Kekayaan Intelektual*, Grasindo, Jakarta, 2000.
- Sachari, Agus, *Desain Gaya dan Realitas*, Rajawali, Jakarta, 1986.
- , *Paradigma Desain di Indonesia*, Rajawali, Jakarta, 1986.
- 1986.
- Saidi, Zaim, *Soeharto Menjaring Matahan Tank Ulur Reformasi Ekonomi Orde Baru Pasca 1980*, Mizan, Bandung, 1998.
- Saleh, Ismail, *Hukum dan Ekonomi*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1990.
- Siahaan, Bisuk, *Industrialisasi di Indonesia Sejak Periode Rehabilitasi Sampai Awal Reformasi*, ITB, Bandung, 2000.
- Soekanto, Soerjono, *dkk, Penelitian Hukum Normatif*, Ragrafindo Persada, Jakarta, 2001.
- , *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986.

- Soemitro, Ronny Hanitidjo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Bandung, 1988.
- Soetrisno, Loekman, *Demokratisasi Ekonomi dan Pertumbuhan Politik*, Kanisius, Jakarta, 1997.
- Subekti, *Aneka Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 1987.
- , dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradya Paramita, Jakarta, 1992.
- Sumantri, Adriani Sumampouw, *dkk, Seri Usaha Kecil Memotong Jerat Tradisi*, Limpad, Semarang, 2000.
- Syahmin, A.K., *Hukum Perjanjian Internasional*, Armico, Bandung, 1985.
- The Legal Texts, *The Results of The Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations*, GATT Secretariat, 1994.
- Tjandraningsih, Indrasari, dan Dedi Haryadi, *Buruh Anak dan Dinamika Industri Kecil*, Akatiga, Bandung, 1995.
- Todoaro, Michael P., *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1993.
- Usman, Marzuki, *dkk, Kiat Sukses Pengusaha Kecil dan Menengah*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1997.
- Peng, Martin Khor Kok, *Imperialisme Ekonomi Baru Putaran Uruguay dan Kedaulatan Dunia Ketiga*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1993.
- Porter, Michael E., *Keunggulan Bersaing*, Erlangga, Jakarta, 1985.

Putra, Ida Bagus Wyasa, *Aspek-Aspek Hukum Perdara Internasional dalam Transaksi Bisnis Internasional*, Refika Aditama, Denpasar, 1997.

Widjaja, Gunawan, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.

-----, *Lisensi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.

-----, dan Ahmad Yani, *Kepailitan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999.

-----, dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001.

Widyadharma, Ignatius Ridwan, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Mimbar, Semarang, 2000.

B. Makalah, artikel, jurnal dan karya ilmiah

Budi, Henry Soelistiyo, *Tindakan Pemerintah Dalam Mengantisipasi Pelanggaran di Bidang HAKI*, Newsletter No. 31/VIII/Desember/1997.

Danarhadi, *Indonesian Batik*, Surakarta, 2000.

-----, *Rakyat Yang Gemar Mengukir*, Surakarta, 2000.

-----, *Istilah-Istilah Batik*, Surakarta, 2000.

- Djiwanto, Teguh**, *Analisis Faktor-Faktor Penghambat Pengembangan Batik Tradisional di Kabupaten Dati II Banyumas dan Pekalongan*, FE-Unsoed, Purwokerto, 1989.
- , *Mengenal dan Melestarikan Batik Tradisional Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas*, FE-Unsoed, Purwokerto, 1992.
- Hartono, Ori Timbul**, *Praktek Pembinaan dan Pengembangan Desain Industri Bagi Pengusaha Kecil dan Menengah di Propinsi Jawa Tengah*, Makalah Seminar Nasional Perlindungan Desain Industri Sebagai Salah Satu aset Perusahaan, Semarang, 2001.
- Herdwiyatmi**, *Perlindungan Hak Cipta dan Desain Industri di Indonesia*, Sentra HAKI Lembaga Penelitian UGM, Yogyakarta, 2000.
- Heroepoetri, Arimbi**, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual dan Masyarakat Adat*, Prospek, Peluang dan Tantangan, Internet, Jakarta, 2001.
- Hilman Helianti**, *Profil Pembentukan Lembaga Pengelola Aset Kekayaan Intelektual*, Sentra HAKI Lembaga Penelitian UGM, Yogyakarta, 2000.
- , *Pengelolaan Royalti Terhadap Komersialisasi Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sentra HAKI Lembaga Penelitian UGM, Yogyakarta, 2000.

- Hoi, Tang Juel, *Why, When and Where to Protect Intellectual Property Right*, WIPO National Seminar The Valuation of Intellectual Property In Commerce and Development, Jakarta, 2001.
- Indarto, *Implementasi Undang-Undang Tentang HAKI Berkaitan Dengan Keterbukaan Informasi Pasar Modal*, Newsletter No. 44/III/Maret/2001.
- Jahisa, Zainuddin, *Peran Jaksa Dalam Penegakan Undang-Undang Desain Industri dan Merek*, Seminar Nasional Implementasi Undang-Undang Desain Industri dan Merek, Surakarta, 2002.
- Jened, Rahmi, *Perlindungan Trade Secret Dalam Rangka Persetujuan TRIPs*, Yuridika, Vol 14, No. 1, Januari-Februari, 1999.
- Junus, Emmawati, *Undang-Undang dan Informasi Umum Perlindungan HAKI*, Sentra HAKI Lembaga Penelitian UGM, Yogyakarta, 2000.
- , *The Role and Challenge of The Intellectual Property System in Indonesia*, WIPO National Seminar The Valuation of Intellectual Property In Commerce and Development, Jakarta, 2001.
- Kamil, Sulaeman, *Developing Creativity Through Enhancement of Intellectual Property Protection*, WIPO National Seminar The Valuation of Intellectual Property In Commerce and Development, Jakarta, 2001.

- Kariodimedjo, Dina Widayaputri, *Analisis Terhadap Potensi kekayaan Intelektual Pada Lembaga Pendidikan Tinggi Dalam Menghadapi Otonomi Perguruan Tinggi*, Mimbar Hukum, 2001.
- Keyzer, Patrick, *Design*, Yuridika, No. 3 & 4 Tahun XIII, Mei – Agustus, 1998
- Kompas, *Pendaftaran Undang-Undang Desain Industri Mengundang Konflik*, Edisi 16 November 2001.
- Lumbanradja, Maringan, *Pemahaman Regulasi Desain Industri*, Pelatihan Konsultan HAKI, Klinik HAKI Undip, Semarang, 2002.
- , *Pengadilan Niaga Memang Tidak Beres*, Edisi 20 April 2001.
- Masjuri, Showam, dkk, *Studi Analisis Antara Profil Usaha Kecil dan Menengah di Jawa Tengah*, FE-Unsoed, Purwokerto, 1998.
- Maulana, Insan Budi, *Strategi Sistem Desain Industri Indonesia*, Makalah Temu Wicara, Ditjen HAKI Depkeh, Semarang, 1999.
- , *Undang-Undang Desain Industri dan Merek Qua Vadis*, Makalah Seminar Nasional Implementasi Undang-Undang Desain Industri dan Merek, Surakarta, 2002.
- Marwoto, *Pengalaman Industri dan Dagang Kecil Menengah Dalam Penerapan HAKI di Indonesia*, Seminar Inovasi Perayaan Hari HAKI Sedunia, Jakarta, 2001.
- Nurhayati, Ima, *Tinjauan Terhadap Dikecualikannya Penjualan yang Berkaitan dengan HAKI dalam Undang-Undang Persaingan di*

- Indonesia, Sentra HAKI Lembaga Penelitian UGM, Yogyakarta, 2000.
- Pratomo, Priyo, *Penilaian dan Manajemen Desain Industrial Dalam Skala Usaha Kecil dan Menengah*, Makalah Seminar Nasional Perlindungan Desain Industri Sebagai Salah Satu aset Perusahaan, Semarang, 2001.
- Pretnar, Bojan, *Infrastructure for Promoting Invention and Innovation*, WIPO National Seminar The Valuation of Intellectual Property in Commerce and Development, Jakarta, 2001.
- Pujiono, *Identifikasi Tindak Pidana Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Pelatihan Konsultan HAKI, Klinik HAKI Undip, Semarang, 2002.
- Purba, Achmad Zen Umar, *Menyambut Millenium III : TRIPS Dimensi Baru HAKI dan Kesiapan Kita*, Newsletter No. 39, Desember 1998.
- Rawalis, Fatimah, *Legal Protection of Copynght in Facing Law Environment of TRIPs Agreement*, Yustisia, Jurnal Hukum Fakultas Hukum Unand.
- Ristek, *Prioritas Utama Nasional Riset dan Teknologi*, Kantor Ristek, Jakarta, 2000.
- Salahuddin, *Kekayaan Intelektual dan Modal Ventura*, Sentra HAKI Lembaga Penelitian UGM, Yogyakarta, 2000.
- Simanjuntak, W, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Dalam RUU Desain Industri*, Newsletter No. 43 Desember 2000.

- Sinungan, Ansori, *Sistem Perlindungan Paten*, Makalah seminar Peningkatan Pemahaman HAKI, Sentra HAKI Lembaga Penelitian, Yogyakarta, 2000.
- Sitindaon, J.W., dkk, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Disperindagkop, Yogyakarta, 1999.
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor Sosial Budaya Dalam Perkembangan Hak Milik Perindustrian di Indonesia*, Majalah Hukum dan Pembangunan, Oktober, 1987.
- Soetarto, Noegroho Amien, *Penelitian yang Berorientasi Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sentra HAKI Lembaga Penelitian UGM, Yogyakarta, 2000.
- Supanto, *Penegakan Hukum pidana di Bidang Desain Industri dan Merek, Undang-Undang Desain Industri dan Merek Qua Vadis*, Makalah Seminar Nasional Implementasi Undang-Undang Desain Industri dan Merek, Surakarta, 2002.
- Susanto, Sri Nur Hari, *Eksistensi Hukum Ekonomi dan Masalah Alih Teknologi*, Masalah-Masalah Hukum Undip.
- Susilowati, Ety, *Hak Kekayaan Intelektual Tentang Lisensi*, Pelatihan Konsultan HAKI, Klinik HAKI Undip, Semarang, 2002.
- Takabayashi, Ryu, *Features of Enforcement of Intellectual Property and Related Issues from Japanese Experience*, Makalah Seminar Nasional Implementasi Undang-Undang Desain Industri dan Merek, Surakarta, 2002.

- Tim HAKI IKDK, *Perlindungan Hukum Hak Cipta, Merek, Paten, Rahasia Dagang dan Desain Industri*, Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi, Jakarta, 2000.
- Tsui, Shingo, *Walking Hand under IP Culture*, Makalah Seminar Nasional Implementasi Undang-Undang Desain Industri dan Merek, Surakarta, 2002.
- Tukan, Leo, *Prosedur Registrasi Desain Industri menurut UU Nomor 31 Tahun 2000*, Makalah Seminar Nasional Perlindungan Desain Industri Sebagai Salah Satu aset Perusahaan, Semarang, 2001.
- Watkins, Wayne, *Value and Assessing Intellectual Property Rights*, WIPO National Seminar The Valuation of Intellectual Property In Commerce and Development, Jakarta, 2001.
- , *Management of Intellectual Property Rights of Interprises R&D Organizations and Universities*, WIPO National Seminar The Valuation of Intellectual Property In Commerce and Development, Jakarta, 2001.
- Wibowo, Bajoe, *Importance of Patent Information Related to The PCT*, WIPO National Seminar The Valuation of Intellectual Property In Commerce and Development, Jakarta, 2001.
- Yasui, Koichi, *What is Design*, Makalah Seminar Nasional Perlindungan Desain Industri Sebagai Salah Satu aset Perusahaan, Semarang, 2001.